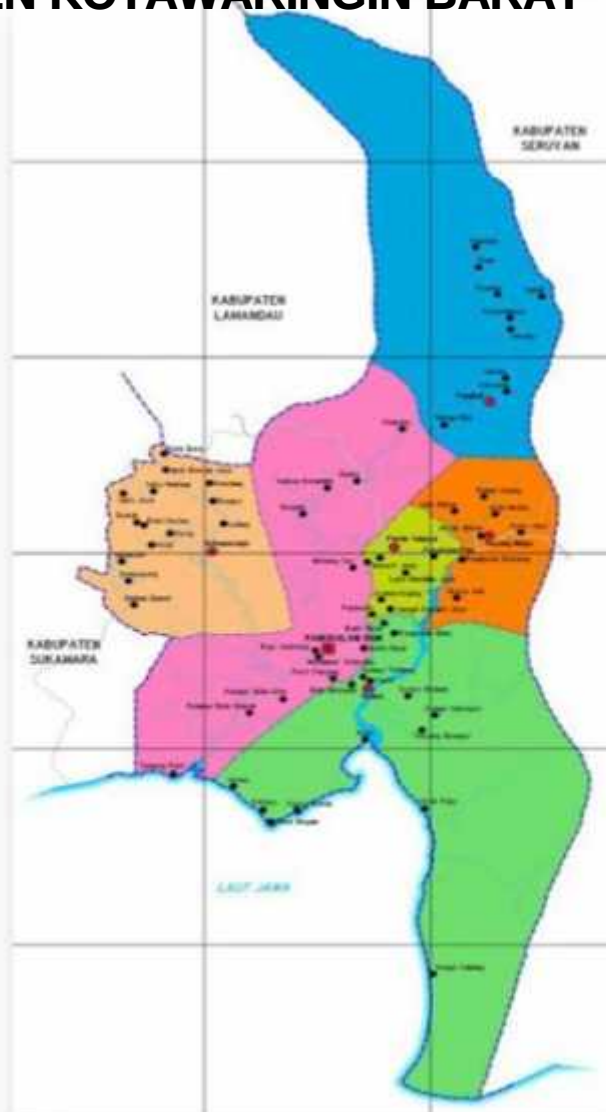




**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Narasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

BAB VI : PENUTUP

- b. Matrik RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 yang memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi :
- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Tahun 2018;
 - b. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018;
 - c. Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018;
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 untuk :

- a. Bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Kotawaringin Barat Tahun 2018 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPd Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dan belum tercantum dalam RKPd Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPd Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal, 7 Agustus 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 7 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



MASRADIN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2015 - 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan serta menjadi pedoman dalam proses penganggaran RAPBD selanjutnya. Untuk itu semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Pangkalan Bun, Agustus 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xi
Daftar Diagram	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-12
1.5. Maksud dan Tujuan	I-14
1.5.1. Maksud	I-14
1.5.2. Tujuan.....	I-14
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-48
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-53
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-55
2.2.1. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib	II-55
2.2.2. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan	II-134
2.3. Permasalahan Pembangunan	II-158
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	II-158
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	II-160
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.2. Laju Inflasi.....	III-15
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-18
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-18
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-22

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Visi dan Misi Pembangunan	IV-2
4.2.	Tujuan dan Sasaran	IV-3
4.2.1.	Tujuan.....	IV-3
4.2.2.	Sasaran	IV-4
4.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018	IV-12
4.3.1.	Tema dan Strategi	IV-12
4.3.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-15
4.3.3.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018	IV- 24
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

**LAMPIRAN RINCIAN, PROGRAM DAN RINCIAN RENCANA KERJA
SETIAP SKPD TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	
	Menurut Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Persentase Tingkat Kemiringan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-3
Tabel 2.3	Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-4
Tabel 2.4	Nama-Nama Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman.....	II-6
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-7
Tabel 2.6	Rencana Pengembangan Perumahan	II-19
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2016.....	II-28
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.....	II-30
Tabel 2.9	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015	II-31
Tabel 2.10	Ekspor dan Impor Kabupaten Kotawaringin Barat (US\$)	II-32
Tabel 2.11	Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) Unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat.	II-37
Tabel 2.12	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenis dan Statusnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016/2017	II-40
Tabel 2.13	Persentase APK dan APM Tahun 2013 – 2016	II-41
Tabel 2.14	Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2016 /2017	II-41
Tabel 2.15	Angka Kelulusan Tiap Jenjang Pendidikan 2014-2016	II-42
Tabel 2.16	Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014 - 2016	II-42
Tabel 2.17	Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-44

Tabel 2.18	Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012 – 2015.....	II-44
Tabel 2.19	Statistik Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-45
Tabel 2.20	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat	II-45
Tabel 2.21	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 – 2016.....	II-46
Tabel 2.22	Kondisi Sarana dan Prasarana pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016	II-46
Tabel 2.23	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 – 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-47
Tabel 2.24	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 – 2016.....	II-47
Tabel 2.25	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-48
Tabel 2.26	Jumlah Dokter Tahun 2012 – 2015.....	II-48
Tabel 2.27	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	II-48
Tabel 2.28	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 – 2015	II-49
Tabel 2.29	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-49
Tabel 2.30	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2012 - 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-49
Tabel 2.31	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 – 2016	II-50
Tabel 2.32	Rasio Tempat Ibadah Tahun 2015.....	II-50
Tabel 2.33	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 - 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-50
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan 2015 - 2016	II-54
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan 2015 - 2016.....	II-58
Tabel 2.36	Jumlah Tempat Sampah Tahun 2011 - 2016	II-70
Tabel 2.37	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2014 – 2016.....	II-71

Tabel 2.38	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2014 – 2016.....	II-72
Tabel 2.39	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2014 – 2016	II-72
Tabel 2.40	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2014 – 2016	II-73
Tabel 2.41	Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2014 - 2016	II-73
Tabel 2.42	Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2015 - 2016	II-74
Tabel 2.43	Jumlah Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-76
Tabel 2.44	Capaian Pembangunan Drainase 2014 – 2016.....	II-77
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015 – 2016.....	II-77
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016	II-79
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2015 – 2016.....	II-82
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015 – 2016.....	II-83
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016...	II-84
Tabel 2.50	Jumlah Koperasi dan Statusnya di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2015 – 2016.....	II-85
Tabel 2.51	Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2015 – 2016.....	II-85
Tabel 2.52	Penilaian Kondisi KSP/ USP di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2015 – 2016	II-86
Tabel 2.53	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catpil	II-86
Tabel 2.54	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 - 2016	II-88
Tabel 2.55	Kondisi Pasar Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat 2013 - 2016....	II-89
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016.....	II-89

Tabel 2.57	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 - 2016	II-97
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015 - 2016	II-100
Tabel 2.59	Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2015 - 2016	II-101
Tabel 2.60	Jumlah Sistem JaringanTransportasi Tahun 2015 - 2016	II-102
Tabel 2.61	Jumlah sarana pendukung keselamatan lalu lintas	II-102
Tabel 2.62	Jumlah Kendaraan Yang di Uji.....	II-102
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 - 2016	II-105
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015 – 2016	II-107
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015 - 2016	II-109
Tabel 2.66	Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016	II-109
Tabel 2.67	Capaian Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016	II-111
Tabel 2.68	Usul dan alokasi formasi PNS Tahun 2010 – 2016	II-112
Tabel 2.69	Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Th.2010 - 2016....	II-113
Tabel 2.70	Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2010-2016	II-113
Tabel 2.71	Data Base Kepegawaian Tahun 2010 – 2016.....	II-114
Tabel 2.72	Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2010 – 2016	II-114
Tabel 2.73	Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2010 – 2016.....	II-115
Tabel 2.74	Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Th. 2010-2016	II-115
Tabel 2.75	Jenis dan Realisasi Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 -2016	II-117
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2016	II-119
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016	II-122

Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016.....	II-124
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	II-125
Tabel 2.80	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2016.....	II-126
Tabel 2.81	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	II-128
Tabel 2.82	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	II-130
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	II-133
Tabel 2.84	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016	II-134
Tabel 2.85	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditas Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016	II-135
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016.....	II-136
Tabel 2.87	Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016	II-136
Tabel 2.88	PAD dari Distanak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	II-137
Tabel 2.89	Potensi Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016	II-137
Tabel 2.90	Luas Areal Perkebunan Per komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2016	II-138
Tabel 2.91	Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2016.....	II-138
Tabel 2.92	Produksi Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2016	II-138
Tabel 2.93	Nama Perusahaan Yang Beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat s/d 2016	II-138
Tabel 2.94	Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016	II-139
Tabel 2.95	Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	II-139

Tabel 2.96	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan Tahun 2016.....	II-139
Tabel 2.97	Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada per Kecamatan Tahun 2016	II-140
Tabel 2.98	Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren per Kecamatan Tahun 2016	II-140
Tabel 2.99	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	II-140
Tabel 2.100	Luas Potensi Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016....	II-141
Tabel 2.101	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Barat 2015 - 2016.....	II-142
Tabel 2.102	Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan 2013 - 2016	II-142
Tabel 2.103	Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan	II-144
Tabel 2.104	Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-145
Tabel 2.105	Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian.....	II-147
Tabel 2.106	Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Peindustrian	II-147
Tabel 2.107	Perkembangan Potensi Industri Kecil Menengah 2013 - 2016	II-147
Tabel 2.108	Perkembangan Jumlah Industri Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2016	II-148
Tabel 2.109	Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2016.....	II-149
Tabel 2.110	Data Transmigran dan Penempatannya Tahun 2014 - 2016	II-1150
Tabel 2.111	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II-153
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2013-2018...	III-1
Tabel 3.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-7
Tabel 3.3	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat	III-9
Tabel 3.4	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK) Kabupaten Kotawaringin Barat	III-11

Tabel 3.5	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK) Tahun 2010 - 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-13
Tabel 3.6	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-14
Tabel 3.7	Nilai dan Target Inflasi Tahun 2011 – 2018 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-15
Tabel 3.8	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2018	III-21
Tabel 3.9	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2018.....	III-27
Tabel 4.1	Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.	IV-4
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program Prioritas SKPD Tahun 2018	IV-15
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	IV-22
Tabel 5.1	Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun 2018	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kab./Kota	I-4
Gambar 2.1	Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Geologi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-5
Gambar 2.3	Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-7
Gambar 2.4.	Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-27
Gambar 3.1.	Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2010-2019.....	III-5

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Persentase Usia Wanita Kawin Pertama Kabupaten Kotawaringin Barat 2016	II-99
Diagram 2.2	Pencapaian Peserta KB Baru 2016.....	II-99
Diagram 2.3	Pencapaian Peserta KB Aktif 2016	II-100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2006-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2006, sedang RPJMD Tahap II (2012-2016) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 dan saat ini sedang menyusun RPJMD tahap III (2017 – 2022).

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2006 - 2025, yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan

tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ini merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017 - 2022.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD dan
- f. Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD Provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik :

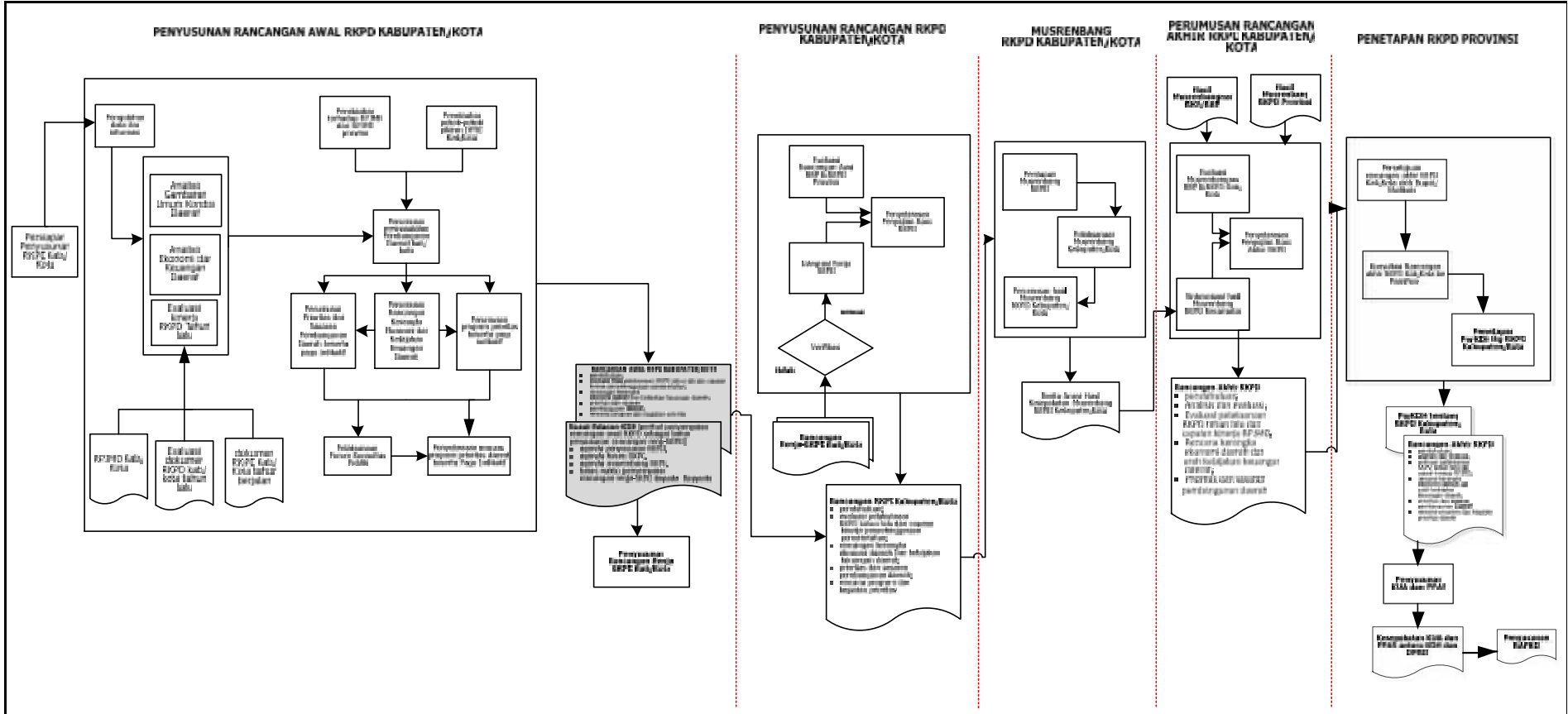
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah,
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2018, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap PD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD pada PD terkait.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 28. *Peraturan Presiden NomorTahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor;*

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115).
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 pasal 8 ayat 1 huruf a dan huruf b. (RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019/Nawa Cita).

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai berikut :

A. RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu : (i) Buku I dengan judul : "Agenda Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul : "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul : "Agenda Pembangunan Wilayah". RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan / regional.

B. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Arah kebijakan dan program prioritas pada tahun 2018 berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur terpilih. Program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018 mengacu Visi dan Misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang Wilayah,
2. Pemerataan Infrastruktur Wilayah,
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai,
4. Stabilitas Ekonomi Daerah,
5. Peningkatan Pendapatan Masyarakat,
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi,
7. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas,
8. Pengelolaan Industri Pariwisata,
9. Pengelolaan SDA Secara Bijaksana yang Berkelanjutan,
10. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.

C. RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat periode ketiga Tahun 2017 - 2021 : memuat visi, misi, program prioritas dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.

Tema RKP Nasional pada Tahun 2018, yaitu “Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan”, tema RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah “Pemantapan Infrastruktur Untuk Mengurangi Disparitas Antar Wilayah di Kotawaringin Barat”.

Adapun perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 merupakan penjabaran Visi: “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas” dan Misi :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan,
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga,
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup,
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat,
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis,
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Rangkaian Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2018, diharapkan dalam setiap penyusunan RKPD Tahun 2018 dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah diantaranya :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam periode RPJMD ketiga dari RPJPD 2006 - 2025 ke dalam RKPD Tahun 2018, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2016,
2. Mengacu RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 sebagai arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Mengacu RPJMN 2015 - 2019 (Program NAWA CITA) yang merupakan program prioritas Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Jusuf Kalla.

D. RENJA – PD

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2018 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2018, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2018, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2018,
2. Mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD 2018 yang disusun ke dalam rancangan Renja PD 2018,
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya,
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD,
6. Memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan
 - 1.5.1. Maksud
 - 1.5.2. Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Realisasi RPJMD
 - 2.2.1. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib
 - 2.2.2. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan
- 2.3. Permasalahan Pembangunan
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
 - 3.1.2. Laju Inflasi
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Visi dan Misi Pembangunan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
 - 4.2.1. Tujuan

4.2.2. Sasaran

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

4.3.1. Tema dan Strategi

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.3.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BABVI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018,
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018.

1.5.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di daerah khatulistiwa diantara 1⁰26' - 3⁰33' Lintang Selatan dan 111⁰13' - 112⁰60' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara;
- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.

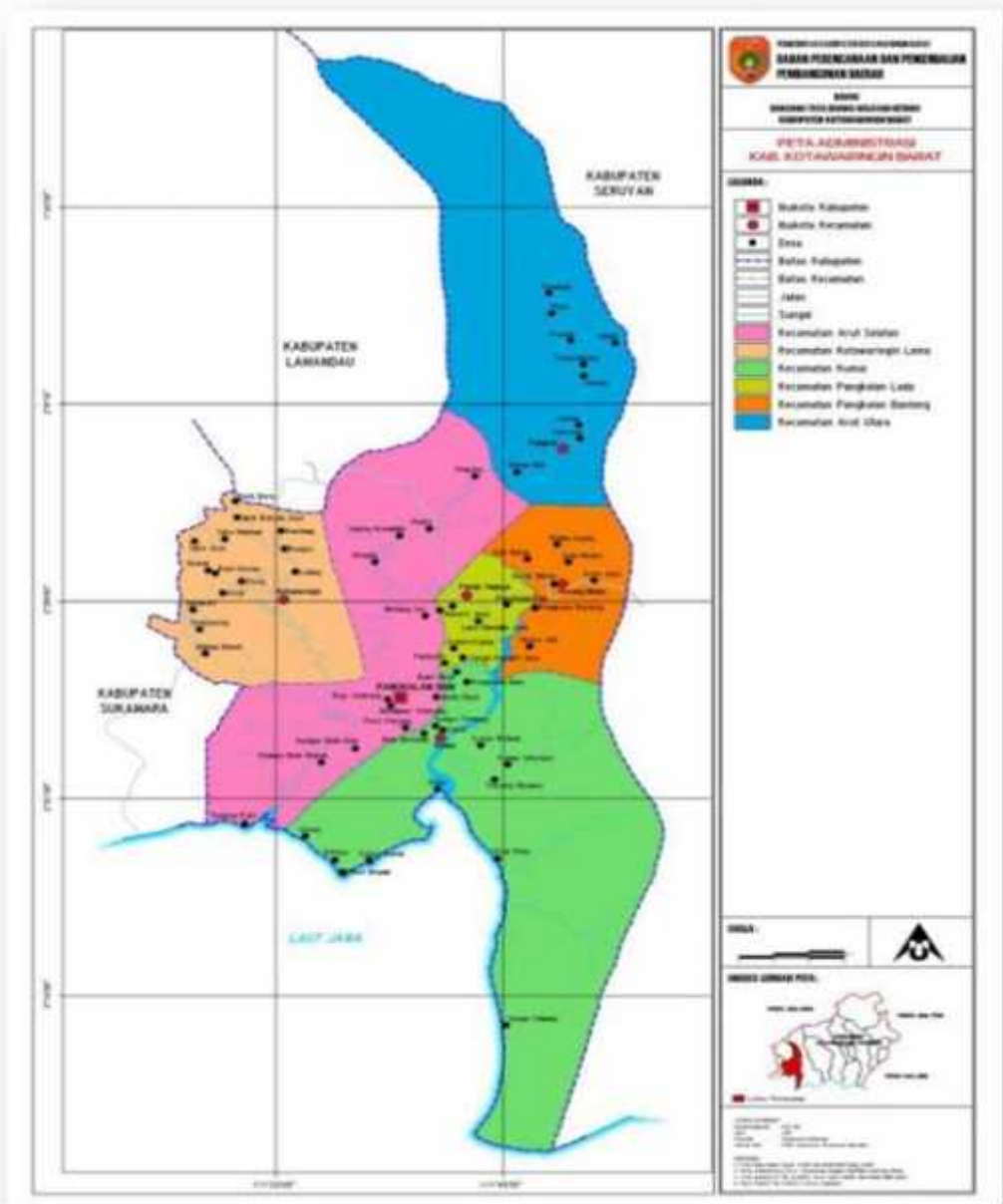
Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini terdiri dari 81 desa dan 13 kelurahan. Adapun Luas Wilayah dan Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas dan Administrasi
Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	JUMLAH		JUMLAH Desa + Kelurahan
			Desa	Kelurahan	
1	Kotawaringin Lama	1.218,0	15	2	17
2	Arut Selatan	2.400,0	13	7	20
3	Kumai	2.921,0	15	3	18
4	Pangkalan Banteng	1.306,0	17	0	17
5	Pangkalan Lada	229,0	11	0	11
6	Arut Utara	2.685,0	10	1	11
JUMLAH		10.759,0	81	13	94

Sumber data : Kobar Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 2.1
Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat
(Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)



B. Kondisi Topografi

Topografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian terdiri dari : dataran, daerah dataran berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada ketinggian 0 - 500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0 - 40%. Ketinggian tempat berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,06 derajat Celsius. Hal tersebut akan menyebabkan semakin tinggi suatu tempat, maka suhu semakin rendah. Dengan demikian ketinggian

merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap tumbuh-tumbuhan.

Tabel 2.2
Persentase Tingkat Kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
	0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah	462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%	46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 33,4°C - 36,4°C dan suhu minimum antara 20,0°C - 22,4°C, kelembaban udara berkisar 89,4% - 90,4%, kecepatan angin maksimal 22 knot.

C. Geologi dan Tanah

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Podsolik Merah Kuning, tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai.

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama.

Kompleks Regosol (Podsol), menyebar di bagian Timur Kecamatan Kumai.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke

bagian tengah kecamatan Kumai.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, tanah ini menyebar di kecamatan Kumai, kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan.

Oksisol (Lateritik), jenis tanah *oksilik* (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit dan bergunung dengan solum tanahnya dalam.

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu :

- 1. Batuan Terobosan Sintang,
- 2. Granit Mandahan,
- 3. Granit Sukadana,
- 4. Batuan GA Berapi,
- 5. Tonalik Sepauk,
- 6. Formasi Dahor,
- 7. Endapan Rawa
- 8. Batuan Gunung Api,
- 9. Alluvium dan
- 10. Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

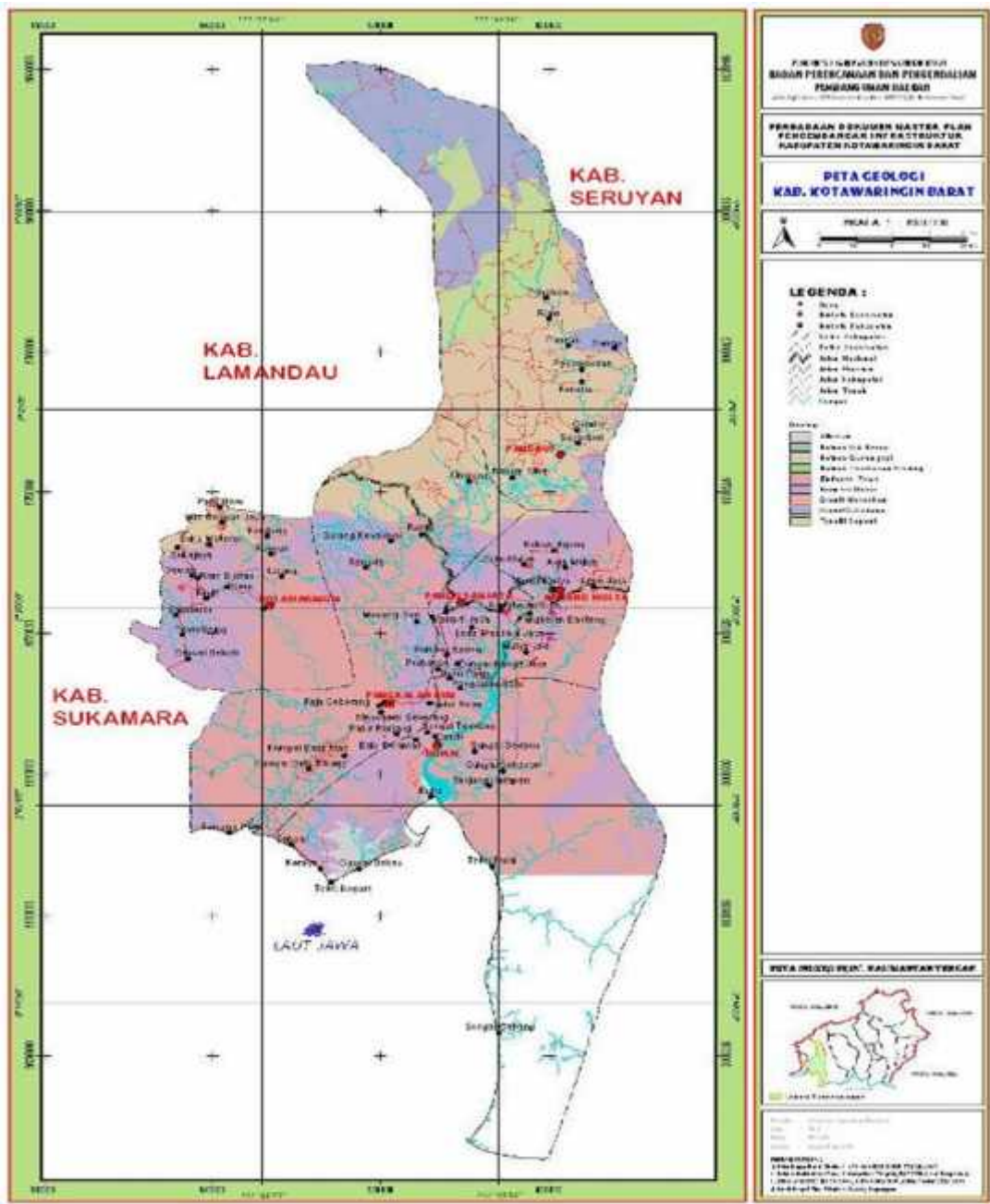
No	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	(%)
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai*	Arut Utara	Pangk. Banteng	Pangk. Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan GA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunung api	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	129,33	6.912,01	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
Jumlah		113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100

Sumber : Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

*Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, terlihat bahwa formasi geologi terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan Rawa dan formasi Dahor. Masing-masing dari formasi tersebut seluas 336.093,50 Ha untuk endapan Rawa dan 223.223,25 Ha untuk formasi Dahor. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, lihat Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Peta Geologi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



D. Hidrologi

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Nama-Nama Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

E. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret tercatat 423,8 mm, jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April yaitu 27 hari. Suhu udara maksimum berkisar antara 33,4°C - 36,4°C dan suhu minimum antara 20,0°C - 22,4°C. Hal ini menyebabkan suhunya relatif panas. Kelembaban udara bervariasi antara 89,4% sampai 90,4%.

F. Potensi Pengembangan Wilayah

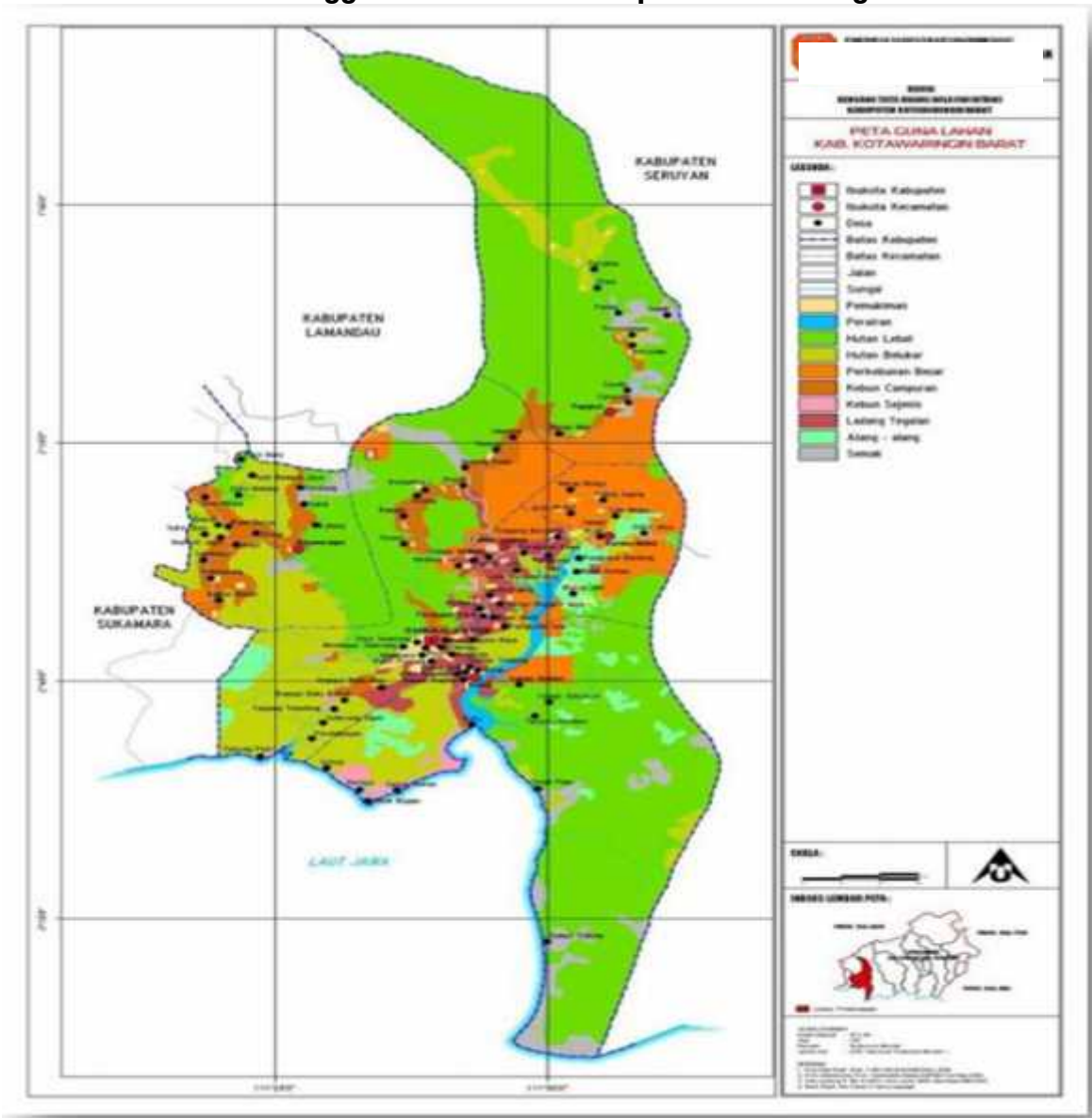
Penggunaan lahan merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan lahan yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan dan sebarannya didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 dan gambar 2.3, berikut :

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lebat	513.917,11	52,11
2.	Ladang/Tegalan	35.635,55	3,61
3.	Perairan	11.258,62	1,14
4.	Alang-Alang	33.968,94	3,44
5.	Semak	46.722,67	4,74
6.	Hutan Belukar	167.255,64	16,96
7.	Kebun Sejenis	8.201,72	0,83
8.	Pemukiman/Kampung	13.042,39	1,32
9.	Kebun Campuran	54.984,28	5,57
10.	Perkebunan Besar	101.299,57	10,27
Jumlah		986.286,49	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 2.3
Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis tanah/lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi : lotosal, kompleks podsolik merah kuning-podsol, laterik, alluvial, regosol podsol, organosal serta danau atau rawa - rawa.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

G. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

a. Hutan Lindung

Tujuan ditetapkan hutan lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Berdasarkan hasil uji konsistensi dengan RTRWP Kalteng Tahun 2011, maka hingga akhir tahun perencanaan 2031, hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pengembangannya menjadi hutan yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi. Pengembangan kawasan untuk ditetapkan menjadi hutan lindung dalam Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini hanya meliputi 10.088,82 Ha.

b. Kawasan Bergambut dan Resapan Air

Kawasan gambut yang perlu dilindungi adalah kawasan yang mempunyai kedalaman > 3 m pada hulu sungai dan rawa, yang berfungsi untuk melindungi hidrologi wilayah. Tanah gambut mempunyai ekosistem hutan gambut. Gambut sendiri mempunyai kemampuan yang besar untuk menyimpan air (dari alam).

Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28.991 Ha yang terbagi di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 Ha, Kecamatan Kumai seluas 5.000 Ha, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6.000 Ha, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 4.500 Ha, Kecamatan Arut Utara seluas 8.000 Ha dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5.000 Ha.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Yang termasuk kedalam Kawasan Perlindungan Setempat yaitu sebagai berikut :

1) Kawasan Sempadan Pantai

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

Peruntukan fungsional kawasan sempadan pantai dimaksudkan dalam upaya melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dengan batas minimal 50 - 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai serta dimaksudkan untuk mengamankan kerusakan lingkungan akibat gerusan, abrasi dan intrusi air laut. Kebijakan pemanfaatan kawasan yang ditempuh antara lain:

- a. Mencegah segala bentuk kawasan kegiatan budidaya disepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai,
- b. Mengendalikan kegiatan yang telah ada,
- c. Mengembalikan fungsi lindung pantai yang telah mengalami kerusakan.

Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih sebesar 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah sebesar 1.560 Ha.

2) Kawasan Sempadan Sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya 100 m di kiri kanan sungai besar, dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai, yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 50 m.

Sempadan sungai perlu dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 m dari kiri dan kanan sungai dan 50 m bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10 - 50 m di kiri-kanan sungai.

Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km². Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km², sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dari Kabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km² dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak-anak sungai memiliki luas 150 Km².

3) Kawasan Sempadan Mata Air

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air. Kawasan mata air merupakan sumber air baku yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untuk kawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) dengan luasan sebesar 1,209.9 Ha.

Kawasan Sempadan Danau/Rawa

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa danau/rawa yang juga perlu dilindungi sebagai pengendali banjir atau digunakan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari maupun untuk kepentingan pertanian dan perkebunan.

Danau-danau yang dimaksud tersebut adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Kotawaringin di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal lahan yang perlu dilindungi adalah selebar 50 - 100 m dari bibir danau ke arah darat.

4) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dan cagar budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Dalam peraturan Menteri Kehutanan P.19 tahun 2004, kawasan suaka alam dan cagar budaya ini termasuk dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Adapun penjelasan dari masing-masing kategori Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam adalah sebagai berikut :

a) *Kawasan Suaka Alam*

Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah

sistem penyangga kehidupan. Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Tanjung Keluang, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan Hutan Lindung.

b) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

Kawasan suaka alam laut di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kawasan konservasi tumbuhan laut seperti padang lamun dan terumbu karang. Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 Ha. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 Ha. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang.

c) Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Kawasan berhutan bakau habitat tumbuhnya di Sungai Mambang Desa Kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 6,973 Ha.

d) Kawasan Suaka Margasatwa

Kawasan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau adalah areal yang terletak di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama. Kawasan ini memiliki luas sebesar 35.822 Ha atau 3,1% dari luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

e) Taman Nasional

Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 698/pkts/UM/XI/78, tanggal 13 November 1978 dan SK Menteri Kehutanan No 687/kpts-II/1996, tanggal 25 Oktober 1996 seluas 415.040 Ha. Taman ini secara geografis terletak antara 2°35' - 3°20' LS dan 111°50' - 112°15' BT sedangkan secara administratif pemerintahan, terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Luas kawasan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah seluas 266.546 Ha.

f) Kawasan Taman Wisata

Taman Wisata Alam Tanjung Keluang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 529, tanggal 12 Desember tahun 2012 seluas 2.563 Ha. Taman Wisata Tanjung Keluang secara administratif pemerintahan, terletak di kecamatan Kumai.

g) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan yang dilindungi karena memiliki nilai sejarah dan pengetahuan. Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning atau Keraton Lawang Agung Bukit Indra Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam Kyai Gede Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambu di Kecamatan Arut Utara.

h) Kawasan Hutan Kota

Kawasan hutan kota telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 Ha, meliputi :

- a. Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 Ha SK. Bupati Nomor : 188.45/2/HUK;
- b. Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 Ha SK. Bupati Nomor : 3 Tahun 2009;
- c. Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 Ha SK. Bupati Nomor : 188.45/16/HUK;
- d. Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 Ha SK. Bupati Nomor : 188.45/1/HUK pebruari Tahun 2007;
- e. Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 Ha;
- f. Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 Ha) dan
- g. Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 Ha).

d. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Kebakaran

Kebakaran hutan merupakan salah satu dari realitas kondisi yang ada saat ini. Dampak dari kebakaran hutan berupa kabut asap tidak hanya dirasakan secara lokal namun juga secara regional (lintas wilayah/negara). Untuk itu perlu dilakukan suatu rencana yang mengakomodir kawasan rawan kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun lokasi dari kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang sebelumnya pernah terjadi kebakaran. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1.122 titik rawan atau seluas 205 km². Kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan rawan kebakaran hutan adalah

kawasan yang terletak di daerah pesisir, dekat pantai dan muara sungai.

Menyingkapi permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, maka kegiatan pengendalian kebakaran meliputi kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api.

Kegiatan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran seperti pada kesehatan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh asap. Beberapa kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: (1) menyediakan peralatan kesehatan terutama di daerah rawan kebakaran, (2) menyediakan dan mengaktifkan semua alat pengukur debu di daerah rawan kebakaran, (3) memperingatkan pihak-pihak yang terkait tentang bahaya kebakaran dan asap, (4) mengembangkan waduk-waduk air di daerah rawan kebakaran, dan (5) membuat parit-parit untuk mencegah meluasnya kebakaran beserta dampaknya.

Kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap digerakkan. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah membangun partisipasi masyarakat di kawasan rawan kebakaran.

Tahapan ketiga adalah kegiatan pemadaman api. Pada tahap ini usaha lokal untuk memadamkan api menjadi sangat penting karena upaya di tingkat lebih tinggi memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih luas. Pemadaman api di kawasan bergambut jauh lebih sulit daripada di kawasan yang tidak bergambut. Hal ini terkait dengan kecepatan api yang sangat cepat dan tipe api di bawah permukaan. Strategi pemadaman api secara konvensional seperti pada kawasan hutan dan lahan tidak bergambut harus dikombinasikan dengan cara-cara khas untuk kawasan bergambut, terutama untuk memadamkan api di bawah permukaan. Pemadaman api di bawah permukaan dengan menyemburkan air ke atas permukaan lahan tidaklah efektif, karena tanah gambut mempunyai daya hantar air vertikal yang sangat rendah. Cara lainnya adalah dengan membuat parit yang dialiri, atau penyemprotan air melalui lubang yang telah digali hingga batas api di bawah permukaan.

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir

Wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat yang termasuk daerah rawan bencana gelombang pasang yaitu Tanjung Pengujan sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulau sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Arut Selatan (Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang), Kecamatan Kotawaringin Lama (Desa Lalang, Rungun dan Kondang).

e. Kawasan Lindung Lainnya

1) Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfeh

Kawasan lindung hutan plasma-nutfeh merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 240.778 Ha yang berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 198.588 Ha, Suaka Marga Satwa Lamandau seluas 32.712 Ha dan Tanjung Keluang seluas 2.559 Ha.

2) Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi

Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang, ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar yang secara geografis terletak antara 111°41'65"BT dan 3°12'58"LS, dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang secara geografis terletak antara 111°29'43"BT dan 2°58'38"LS. Pencadangan kawasan konservasi perairan sungai atau danau meliputi :

- a. Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan dengan luas 1.500 Ha;
- b. Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 Ha;
- c. Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 Ha;
- d. Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 Ha;
- e. kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.

f. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, untuk menghindari tumpang tindih pengelompokan jenis kawasan budidaya dan untuk menselaraskan produk tata ruang diatasnya, maka penetapan jenis kawasan budidaya mengikuti terminologi dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dalam produk RTRWP 2006. Kawasan budidaya dikategorikan menjadi : Kawasan Budidaya Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Tetap (HPT), Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL).

2) Kawasan Pengembangan Hutan Produksi (HP)

Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Dalam *draft* Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2032, wilayah kawasan hutan produksi yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar terletak di kecamatan Arut Utara, Arut Selatan dan di Kecamatan Kotawaringin Lama, serta sebagian kecil di Kecamatan Pangkalan Banteng, yang terdiri dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.582 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 286.485 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) mempunyai luas sebesar 160.185 Ha.

3) Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)

Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) diarahkan penggunaannya untuk kegiatan budidaya non kehutanan berskala besar, termasuk diantaranya usaha perkebunan besar swasta (PBS). Luas yang direncanakan untuk Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ini adalah seluas 110.690,05 Ha atau 10,29 % dari luas wilayah kabupaten.

4) Kawasan Hutan Rakyat (HTR)

Penetapan pencadangan lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan No. SK. 529/Menhut-12/2012 seluas 11.924 Ha : Kecamatan Arut Utara (Desa Nanga Mua, Kelurahan Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu dan Desa Gandis) dan Kecamatan Pangkalan Banteng di Desa Amin Jaya.

5) Kawasan Peruntukan Pertanian

Untuk kawasan pertanian tanaman pangan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, perikanan, dan perkebunan rakyat. Adapun pengelolaan untuk kawasan pertanian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan intensifikasi lahan basah di Kecamatan Arut Selatan seluas 14.262,34 Ha, Kotawaringin Lama seluas 2.472,00 Ha, Kumai seluas 9.434,93 Ha, Arut Utara seluas 115,9 Ha, Pangkalan Banteng seluas 367,94 Ha dan Pangkalan Lada seluas 607,68 Ha. Dengan total seluruhnya untuk lahan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 27.260,79 Ha.
- b. Pengembangan dan intensifikasi lahan kering untuk tanaman pangan diarahkan ke Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.

- c. Intensifikasi hortikultura di Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.

Upaya perencanaan terhadap kawasan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- a. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- c. Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
- d. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian;
- e. Wilayah penghasil produk perkebunan yang bersifat spesifik, lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang, wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
- f. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

6) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 1.075.900 Ha, lahan perkebunan seluas 124.810 Ha, terdiri dari perkebunan besar kelapa sawit, karet, lada, kelapa, dll tersebar di 6 Kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat.

7) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas (156 Km x 4 mil) yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai, yaitu Desa Teluk Bogam, Kubu, Keraya, Teluk Pulau, Sebuai dan Sungai Bakau Kecamatan Kumai;
- b. kawasan peruntukan budidaya perikanan darat jenis keramba berada di Kelurahan Raja Seberang hingga Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan dan simpang Sungai Lamandau dan Sungai Arut hingga danau Seluluk;

- c. kawasan peruntukan budidaya ikan tambak berada di desa Sungai Bakau, Kumai Hilir (Teluk Pengarangan), Sungai Cabang Timur, Keraya, Sebuai di Kecamatan Kumai dan Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan;
- d. kawasan peruntukan pengembangan budi daya rumput laut di Sungai Bakau dan Teluk Bogam Kecamatan Kumai; dan
- e. kawasan pengolahan ikan di Kecamatan Kumai;
- f. Untuk kawasan perikanan tangkap tradisional yang diperbolehkan harus berada di luar zonasi konservasi terumbu karang dan biota laut yang dilindungi dan zona alur transportasi laut.

g. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan tersebar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu untuk pertambangan batu bara berada di Kecamatan Pangkalan Banteng, tambang biji besi di Kecamatan Arut Utara (Desa Pandau, Desa Riam dan Desa Sambi), tambang emas di Kecamatan Arut Utara (Desa Pangkut, Desa Kerabu dan Desa Penyombean), tambang zirkon di kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kumai.

h. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri menurut Keppres nomor 41 Tahun 1996. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan RTRWK tentang Rencana Kawasan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- a. Lokasi kawasan peruntukan industri (*industrial estate*), meliputi :
 - 1. Industri besar dan menengah berada di Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng dan Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan seluas 1.500 hektar (empat lokasi); dan
 - 2. Industri kecil tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri, meliputi :
 - 1. industri pengolahan kayu lapis Korea-Indonesia (korindo) merupakan industri besar di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - 2. industri translik merupakan industri rumah tangga (*home industry*).
- c. Industri mikro, kecil dan menengah tidak harus berlokasi dalam kawasan industri.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pemanfaatan ruang untuk daya tarik wisata di Kabupaten Kotawaringin Baratterletak pada wisata alam yang dapat ditingkatkan pengembangannya

secara fisik dan non fisik sehingga dapat berfungsi dan bernilai tambah. Lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

a. Kawasan wisata alam :

1. Kecamatan Kumai seperti : Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, Pantai Keraya, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Keluang, Pantai Sebuai, Air Terjun Patih Mambang, Gosong Senggora, Suaka Marga Satwa Lamandau, Danau Naruhum.

b. Kawasan wisata budaya :

1. Kecamatan Arut Selatan seperti : Istana Kuning, Astana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-Raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun,
2. Kecamatan Kotawaringin Lama : Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk pemenuhan perumahan yang layak huni untuk berbagai lapisan masyarakat. Untuk klasifikasi dari permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Permukiman dengan kepadatan tinggi
- b. Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan tingkat kepadatan 126,14 jiwa/Km², Kecamatan Arut Selatan dengan tingkat kepadatan 42,47 jiwa/Km², dan Kecamatan Pangkalan Banteng dengan tingkat kepadatan 25,11 jiwa/Km²;
- c. Permukiman dengan skala kepadatan sedang
- d. Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama dengan tingkat kepadatan 14,15 jiwa/Km², dan Kecamatan Kumai dengan tingkat kepadatan 16,46 jiwa/Km²;
- e. Permukiman dengan skala kepadatan rendah
- f. Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Arut Utara dengan tingkat kepadatan 6,04 jiwa/Km².

Jika dilihat dari kecenderungan yang ada pada umumnya permukiman yang dibangun oleh pribadi (masyarakat) ada tiga jenis yaitu yang tertata dengan rapi, sembarangan dan tidak teratur, serta kampung kumuh. Permukiman yang dibangun/dikembangkan oleh pengembang umumnya berupa rumah dalam berbagai tipe, sedangkan untuk rumah dinas tidak ada penambahan.

Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat ditentukan berdasarkan atas luasan kapling rumah dibawah ini

- a. Rumah kapling kecil, setidaknya seluas ≥ 200 m persegi.
- b. Rumah kapling menengah, luas lahan antara > 250 m persegi.
- c. Rumah kapling besar, luas lahan > 500 m persegi.

Tabel 2.6
Rencana Pengembangan Perumahan

Kecamatan	Jumlah Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2031 (unit)				Luas LahanYang dibutuhkan Untuk Pertambahan Rumah Tahun 2031 (km2)			
	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
Ktw. Lama	638	1.913	3.826	6.377	318.866,36	478.299,54	765.279,26	1.562.445,16
Arut selatan	3.305	9.915	19.830	33.049	1.652.458,38	2.478.687,57	3.965.900,11	8.097.046,06
Kumai	1.610	4.829	9.658	16.097	804.846,65	1.207.269,97	1.931.631,95	3.943.748,57
Arut utara	503	1.510	3.019	5.032	251.611,39	377.417,09	603.867,34	1.232.895,83
P. Banteng	1.200	3.600	7.200	12.001	600.038,96	900.058,43	1.440.093,50	2.940.190,89
P. Lada	985	2.955	5.910	9.850	492.508,46	738.762,70	1.182.020,31	2.413.291,47
Total	8.241	24.722	49.444	82.407	4.120.330,20	6.180.495,30	9.888.792,48	20.189.617,98

Sumber: Hasil Rencana, Tahun 2029

Arahan pengembangan untuk kawasan perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada.
- b. Dalam penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada ketentuan KDB dan KLB yang telah ditetapkan.
- c. Pada kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka. hijau dan bersifat khusus sebaiknya tidak dialihfungsikan untuk permukiman atau kegiatan lain yang diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengadakan rumah sendiri tetapi penataannya harus mengikuti rencana tata ruang dan *advis planning* yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- e. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer harus disertai juga dengan pembangunan fasilitas umum dan sosial terutama pada RTH dan lapangan olah raga, tempat ibadah, makam, perbelanjaan, serta jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada disekitarnya dan jalan utama kota.
- f. Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yaitu:
 - 1. Untuk kawasan padat, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan.

2. Untuk kawasan yang berkepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20% dari luas kawasan.
3. Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 30% terhadap luas kawasan secara keseluruhan.
4. Untuk kawasan permukiman, taman harus disediakan ruang terbuka hijau 60% terhadap luas kawasan secara keseluruhan.

k. Kawasan Peruntukan Lainnya

1) Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat maka kegiatan perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat juga semakin meningkat. Kabupaten Kotawaringin Barat dalam skala nasional dan regional mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya. Sehingga dengan demikian keberadaan pusat perdagangan dan jasa (komersial) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai arti yang sangat penting dan perlu diarahkan secara tepat.

Rencana pengembangan kawasan komersial yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan perdagangan skala besar (grosir) untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya, *garment*, elektronika dan barang perlengkapan sehari-hari diarahkan di Kecamatan Kumai, karena dekat dengan pelabuhan dan akan dikembangkan sebagai kawasan industri pengolahan hasil bumi. Kegiatan perdagangan ini perlu dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, *container* sampah dan pelengkap kebersihan lainnya.
- b. Untuk kegiatan perdagangan barang campuran, misalnya *garment*, elektronika dan jasa seperti bank, *show room* mobil-motor, bioskop, biro perjalanan, akan dilayani di sekitar pusat kota. Pengembangan perdagangan dan jasa pada kawasan ini diarahkan dengan intensitas rendah-sedang baik dalam bentuk bangunan maupun tarikan orang yang akan datang dengan disertai sistem parkir di dalam (*off street*)
- c. Perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah dilayani oleh pasar yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan ini juga dikelilingi oleh pertokoan yang akan menjadi pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.
- d. Sesuai dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat maka diperlukan pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan,

mulai dari toko/warung, pertokoan, pasar. Kawasan perdagangan baru tersebut terdiri dari :

1. Pusat perdagangan baru, direncanakan pada setiap pusat-pusat pelayanan;
2. Pertokoan, dimana pengembangannya diperlukan pada kawasan baru yang telah dan akan dikembangkan. Pertokoan ini sebaiknya berdekatan dengan fasilitas umum lainnya sehingga secara keseluruhan berfungsi sebagai pusat lingkungan;
3. Toko dan warung, sifatnya eceran dan barang dagangannya merupakan bahan kebutuhan sehari-hari. Arah pengembangan adalah menjadi satu dengan kawasan/lingkungan permukiman.

2) Rencana Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum

Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap dipertahankan di PKW Kabupaten Kotawaringin Barat Kota Pangkalan Bun yang memiliki skala pelayanan regional, dan di Kecamatan Kumai yang memiliki skala pelayanan kecamatan/lokal, sedangkan untuk instansi lainnya lokasinya menyebar.

Kawasan Pendidikan

Untuk melayani kebutuhan penduduk, kegiatan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Kawasan Pelayanan Kesehatan

Untuk masa yang akan datang lokasi dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap dipertahankan mengingat lokasinya yang ada pada saat ini cukup sentral dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi, jadi hanya perlu meningkatkan mutu pelayanan saja. Sedangkan untuk pengembangan pelayanan kesehatan lainnya setingkat puskesmas diarahkan di pusat pelayanan lingkungan permukiman terutama pada wilayah baru yang akan dikembangkan sehingga pengembangan baru ini (bersamaan dengan fasilitas lainnya) sekaligus dapat merupakan daya tarik perkembangan daerah pada masa yang akan datang. Selain itu terkait dengan ini untuk pusat pelayanan PKL yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan setingkat puskesmas harus dikembangkan pada pusat pelayanan PKL ini.

Kawasan Peribadatan

Seperti pada umumnya masyarakat di Indonesia, ternyata masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mayoritas memeluk agama Islam, setelah itu

agama Kristen Hindu, dan Budha. Berbagai jenis fasilitas peribadatan ini lokasinya sudah tersebar dan sudah dapat melayani kebutuhan penduduk.

Ruang Olah Raga

Sesuai dengan kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat maka untuk rencana Ruang Olah Raga diarahkan pengembangan lapangan olah raga yang bersifat terbuka terutama di setiap unit lingkungan permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk lapangan olah raga yang ada sekarang sebisa mungkin dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan sebagai RTH baik untuk tempat olah raga, taman kota, maupun sebagai peresapan air.

Ruang Terbuka Non Hijau Kota

Ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) yaitu jalan maupun ruang-ruang terbuka yang telah diperkeras sehingga tidak terdapat vegetasi yang mampu meresapkan air. Luasan area ruang terbuka non hijau diperoleh dari luas lapangan olahraga, lapangan upacara, serta parkir terbuka. Area ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana pengembangan ruang terbuka non hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mempertahankan ruang terbuka non hijau yang saat ini ada yaitu ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) meliputi taman bermain, stadion olahraga, jaringan jalan serta parkir yang diperkeras sehingga bersama dengan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) akan meningkatkan kualitas lingkungan fisik, ekonomi dan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

I. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan ini memiliki potensi untuk berkembangnya sektor-sektor strategis yang memiliki pengaruh skala regional dan nasional serta dimungkinkan internasional. Kawasan yang berperan menunjang sektor strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. Kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia (sapi potong dan kambing) di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada dan non ruminansia (ayam potong dan itik) di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;
- b. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kecamatan Arut Selatan seluas 19.190 Ha, Kecamatan Arut Utara seluas 350 Ha, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 620 Ha, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 840 Ha, Kecamatan

Kotawaringin Lama seluas 3.175 Ha dan Kecamatan Kumai seluas 10.686 Ha; (setelah dikurangi ijin ASMR 3.822 Ha);

- c. Kawasan perkebunan seluas 124.810 Ha terdiri dari perkebunan kelapa sawit, karet, dan lada tersebar di Kecamatan Kumai, Arut Utara, Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Pangkalan Banteng, Pangkalan Ladadan Kotawaringin Lama;
- d. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa Kawasan Strategis Pengembangan (KSP) Pangkalan Bun-Kumai, KSP Pandu Sanjaya-Karang Mulya (Pakam), KSP Pangkut, Kawasan pelabuhan yaitu: Pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumi Harjo dan Pelabuhan Ro-Ro terletak di Kecamatan Kumai, Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun dan Rencana pembangunan bandara baru dengan cadangan lahan seluas 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Kecamatan Kumai ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor : 050/27/Bapp-Set/2010 tanggal 18 Januari 2010 dengan maksud untuk pengembangan jalur transportasi udara komersil yang handal sehingga mampu mengantisipasi kebutuhan daerah 20 tahun mendatang;
- e. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan (pusat pertanian dan perikanan darat) di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai;
- f. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan (pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut) di Kecamatan Kumai.

m. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosio-Budaya

Untuk menjaga nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai ciri khas pengembangan dan eksistensi budaya bangsa yang menjadi perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, seperti Istana Kuning dibangun pada jaman sultan ke IX Pangeran Ratu Imanudin terletak di Desa Raja, Kecamatan Arut Selatan, Istana Mangkubumi dibangun pada masa kerajaan Pangeran Ratu Anum Kesumayuda berada di Kecamatan Arut Selatan dan Astana Al-Nursari dibangun oleh Pangeran Paku Sukma Negara di Kecamatan Kotawaringin Lama.

n. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pengelolaan kawasan lindung dan kritis diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekologi sebagai kawasan resapan air dan pengendali

banjir, meliputi Taman Nasional Tanjung Puting, *Catchment Area* DAS Arut, *Catchment Area* DAS Kumai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional, Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan strategis nasional Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan habitat orang utan yang sangat dipertahankan sebagai binatang langka. Selain itu, kawasan Tanjung Puting memiliki kepentingan untuk kegiatan penelitian sains.

Sebagai daerah konservasi alam dan lingkungan hidup, maka yang dipertahankan bukan hanya binatangnya saja, melainkan kawasan hutan sebagai habitatnya juga harus dipertahankan untuk menjaga ekosistem lingkungan dan sumber daya airnya.

o. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam yaitu di Kawasan Andalan Laut seluas (156 Km x 4 mil) yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai.

H. Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Rencana Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mengatur susunan pusat-pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hirarkis memiliki hubungan fungsional.

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegiatan permukiman perkotaan dengan hirarki pelayanan skala regional/kecamatan (hirarki I), terletak di Kota Pangkalan Bun yang merupakan Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat dengan arahan pengembangan kegiatan utama yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, perekonomian dan regional, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran). Sedangkan untuk kegiatan penunjang utama sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan permukiman.

c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) merupakan pusat permukiman perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan (hirarki II) dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat dan lain-lain. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ini terletak di ibukota Kecamatan terutama Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Ibukota Kecamatan (IKK) Pangkalan Banteng kawasan ini diharapkan menjadi kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat produksi pertanian dan perkebunan (*agropolitan area*) dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal.

e. Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Kawasan promosi (PPKp) merupakan pusat permukiman/kegiatan ditingkatkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya, Pusat Pelayanan Kawasan promosi (PPKp) meliputi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan dan Desa Teluk Bogam di Kecamatan Kumai.

f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung (hirarki IV) dengan arahan pengembangan skala pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Pusat pengembangan kegiatan terletak di seluruh pusat desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

g. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan

Untuk kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan dibagi berdasarkan sistem perkotaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk PKW kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1. Pengembangan jalan arteri primer,
 - 2. Pengembangan prasarana lingkungan,
 - 3. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa,
 - 4. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
 - 5. Pengembangan kawasan pariwisata,
- b. Untuk PKLp kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1. Pengembangan jalan arteri sekunder,
 - 2. Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK,
 - 3. Pengembangan fasilitas lingkungan,
 - 4. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa,
 - 5. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
 - 6. Pengembangan industri,
 - 7. Optimalisasi pelabuhan Kumai,
 - 8. Pengembangan fasilitas agropolitan area,
- c. Untuk PPK kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1. Pengembangan fasilitas lingkungan,
 - 2. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa,
 - 3. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
 - 4. Pengembangan fasilitas agropolitan area,
- d. Untuk PPKp kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1. Pengembangan fasilitas lingkungan,
 - 2. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa,
 - 3. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
 - 4. Pengembangan fasilitas agropolitan area,
- e. Untuk PPL kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1. Pengembangan fasilitas lingkungan,
 - 2. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
 - 3. Pengembangan fasilitas agropolitan area,

Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2033 sebagaimana tergambar dalam peta berikut:

2.1.1.2. Aspek Demografi

RKPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 berjumlah 252.999 jiwa, pada tahun 2013 berjumlah 261.200 jiwa, tahun 2014 berjumlah 269.629 jiwa, tahun 2015 berjumlah 278.141 jiwa dan tahun 2016 sebesar 286.714 jiwa yang tersebar di 81 desa dan 13 Kelurahan dan 6 kecamatan. Pada tahun 2016, dari jumlah penduduk tersebut sebesar 41,25% penduduk berada di Kecamatan Arut Selatan atau berjumlah 118.256 jiwa, Kecamatan Kumai (19,36% atau berjumlah 55.495 jiwa), Kecamatan Pangkalan Banteng (14,23% atau berjumlah 40.806 jiwa), Kecamatan Pangkalan Lada (11,65% atau berjumlah 33.400 jiwa), Kecamatan Kotawaringin Lama (6,84% atau berjumlah 19.615 jiwa), Kecamatan Arut Utara (6,68% atau berjumlah 19.142 jiwa).

Secara demografis, peningkatan atau penurunan jumlah penduduk pada dasarnya tergantung pada kelahiran, kematian dan migrasi. Faktor kelahiran dan kematian biasa disebut dengan faktor-faktor alamiah, sedangkan arus masuk dan keluar yang disebut dengan migrasi. Dengan mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2012-2016 menandakan bahwa faktor migrasi penduduk merupakan variabel penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2015-2016 tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,08 persen.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	Tahun				2016	%	Laju Pertumb. 2015-2016 (%)
		2012	2013	2014	2015			
1	Kotawaringin Lama	17.777	18.232	19.615	19.157	19.615	6,84	2,39
2	Arut Selatan	105.176	108.378	118.256	114.952	118.256	41,25	2,87
3	Kumai	49.612	51.056	55.495	54.015	55.495	19,36	2,73
4	Pangkalan Banteng	33.890	35.525	40.806	38.993	40.806	14,23	4,65
5	Pangkalan Lada	29.804	30.686	33.400	32.494	33.400	11,65	2,79
6	Arut Utara	16.740	17.323	19.142	18.530	19.142	6,68	3,30
Kotawaringin Barat		252.999	261.200	269.629	278.141	286.714		3,08

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kerja optimal masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional. Kinerja pembangunan daerah yang di lihat dari 3 aspek, yaitu :

- a. Aspek Kesejahteraan masyarakat;
- b. Aspek Pelayanan Umum; dan
- c. Aspek Daya Saing Daerah

Konsep pembangunan tahun 2018 akan diarahkan pembangunan dengan pendekatan keterpaduan program. Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat secara makro dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi yang selalu tumbuh di atas rata-rata provinsi dan nasional, yakni pada tahun 2013 tumbuh 6,99%, pada tahun 2014 6,90%, tahun 2015 tumbuh 7,32 %, tahun 2016 5,81% dan pada tahun 2017 diproyeksikan tumbuh sebesar 6,00% - 6,20%.
- b. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar 39,45 juta rupiah, tahun 2014 sebesar 43,67 juta rupiah, tahun 2015 47,01 juta rupiah, tahun 2016 50,39 juta rupiah dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 55,09 juta rupiah.
- c. Laju Inflasi tahun 2011 sebesar 5,58%, tahun 2012 sebesar 3,99%, dan tahun 2013 sebesar 6,29%. Pada tahun 2014 laju inflasi sebesar 6,97%, tahun 2015 sebesar 4,06%, tahun 2016 sebesar 4,08% dan tahun 2017 diproyeksikan inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat berkisar 4,00% - 3,80%.
- d. Tingkat Kemiskinan secara perlahan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebesar 5,44 atau 14.300 Jiwa. Pada tahun 2014 sebesar 5,27%, tahun 2015 sebesar 5,07%, tahun 2016 sebesar 4,96% dan pada tahun 2017 diproyeksikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 4,72%.
- e. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuasi dari 2013-2015. Pada tahun 2013 sebesar 2,47%. Pada tahun 2014 sebesar 1,86%, tahun 2015 sebesar 3,25%, tahun 2016 sebesar 3,16% dan pada tahun 2017 diproyeksikan tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat 3,10%.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari dua fokus, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Aspek Kesejahteraan Masyarakat secara makro dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia, yang merupakan analisis komposit dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No.	Variabel	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka harapan hidup (tahun)	69,60	69,68	69,77	70,07	70,21
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,29	11,90	12,12	12,13	12,42
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,49	7,58	7,82	8,01	8,05
4.	Pengeluaran per kapita (Rpx 1000)	11.807	11.857	11.908	11,979	11,888
5.	Indeks Pembangunan Manusia	68,63	69,51	70,14	70,60	71,13
6.	Peringkat di Kalteng	2	2	2	2	2

Sumber : BPS, 2016

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat selalu menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2016, dari 68,63 menjadi 71,13.

Disamping itu aspek kesejahteraan dilihat dari indikator ekonomi yang selalu tumbuh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional, pada tahun 2012 tumbuh 6,70%. Tahun 2013 pertumbuhan mencapai 6,99%, dan pada tahun 2014 sebesar 6,91%, tahun 2015 sebesar 7,32% dan tahun 2016 mengalami perlambatan menjadi sebesar 5,81%. Untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing diproyeksikan sebesar 6,00% - 6,20% dan 6,20% - 6,40%.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, menunjukan transformasi dari sektor primer (sektor pertanian) ke sektor sekunder yaitu industri dan sektor tersier berupa perdagangan dan jasa.

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh 3 sektor andalan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi terbesar yaitu 26,06%, sektor industri pengolahan 25,36% serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,67%.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016

No.	Sektor	PDRB (Jutaan Rp.)	Kontribusi (%)
1	2	3	4
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.775.183,9	26,06
2	Pertambangan dan Penggalian	199.976,1	1,38
3	Industri Pengolahan	3.674.222,6	25,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.854,6	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.468,1	0,09
6	Konstruksi	1.228.807,5	8,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.835.617,6	12,67
8	Transportasi dan Pergudangan	1.217.972,1	8,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200.246,8	1,38
10	Informasi dan Komunikasi	139.983,4	0,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	761.271,0	5,26
12	Real Estate	272.923,3	1,88
13	Jasa Perusahaan	6.939,1	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	470.965,6	3,25
15	Jasa Pendidikan	375.290,8	2,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.715,1	1,15
17	Jasa Lainnya	140.483,2	0,97
	TOTAL PDRB	14.485.921,0	100,00

Sumber : BPS, 2016

Kinerja ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang memberikan kontribusi ekspor Kotawaringin Barat Tahun 2013 sebesar US\$ 151.555,166 atau bila dibandingkan dengan total ekspor Kalteng, maka 91,35% berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Tabel Ekspor dan impor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Ekspor dan Impor Kabupaten Kotawaringin Barat (US \$)

Tahun	Ekspor	Impor	Surplus
2010	317.918,961	13.171.920	304.747,041
2011	403.145,168	23.731.256	379.413,908
2012	376.205,730	25.928.102	350.277,630
2013	151.555,166	16.059.272	135.495,894
2014	189.439.156	27.109.608	162.329.548
2015	158.380..000	44.740.000	113640.000

Sumber : BPS, 2016

Rincian masing-masingfokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini :

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB ini menggambarkan jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga swasta, konsumsi pemerintah, dan perubahan ekspor *netto* dari satu daerah.

a. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stake holder*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat.

Perekonomian Kab. Kotawaringin Barat pada tahun 2016 5,81%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 mencapai 7,32%, sedangkan tahun 2014 mencapai 6,91%.

Struktur ekonomi yang dibangun oleh berbagai sektor lapangan usaha akan bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi tersebut.

Struktur perekonomian di Kotawaringin Barat didominasi oleh tiga kategori, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Industri Pengolahan serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Pada tahun 2016, ketiga kategori ini memberikan kontribusi sebesar 64,09% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari ketiga kategori yang mendominasi struktur perekonomian, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 26,06%, diikuti oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 25,36%, serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 12,67%. Melihat besarnya kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa ekonomi Kab. Kotawaringin Barat masih bergantung pada sumber daya alam (*reosource based*).

b. Pendapatan Perkapita

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Besarnya pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita maka laju pertumbuhan ekonomi haruslah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan, baik PDRB per kapita ADHB maupun PDRB per kapita ADHK. PDRB per kapita ADHB tahun 2015 sebesar 47,01 juta rupiah. Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan satu orang penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 47,01 juta rupiah.

c. Laju Inflasi

Inflasi adalah angka gabungan dari perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual dipasar.

Laju Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat naik dari 3,99 persen di tahun 2012 menjadi 6,29 persen di tahun 2013, tahun 2014 menjadi 6,97 persen, pada tahun 2015 sebesar 4,06 persen dan pada tahun 2016 sebesar 4,08 persen.

d. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 s/d 2016 dijelaskan bahwa Aspek-aspek internal yang menjadi faktor kekuatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan dan wawasan aparat pemerintah yang semakin meningkat terhadap kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara tercermin diantara dari jumlah peserta pemilu yang meningkat.
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi yaitu sebesar 71,13.
- c. Anggaran bidang pendidikan telah mencapai 23%.
- d. Angka partisipasi pendidikan dasar sudah cukup tinggi hingga mencapai 92,23%.
- e. Anggaran daerah untuk pendidikan telah mencapai 23%.
- f. Pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata provinsi.
- g. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan makin meningkat.
- h. Pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat makin baik, antara lain tercermin dari keberhasilan daerah meraih adipura selama tiga tahun berturut-turut.
- i. Sektor pertanian komoditas jagung menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan.
- j. Sektor perkebunan juga cukup baik pertumbuhannya, terutama untuk komoditas kelapa sawit.
- k. Potensi wilayah yang sangat mendukung untuk perkembangan pertanian lahan kering.
- l. Sektor pariwisata dan perikanan yang belum tergali secara optimal adalah sumber pendapatan yang potensial.

Sedangkan aspek-aspek eksternal yang menjadi faktor peluang bagi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Semakin beragamnya media informasi yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan berbagai pedoman tentang demokrasi, berbangsa dan bernegara.
- b. Kondisi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional dapat mempengaruhi pelaksanaan kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara yang menunjang persatuan dan kesatuan.
- c. Kepedulian kalangan pihak swasta (usaha, industri) dan lembaga Perguruan Tinggi terhadap pengembangan pendidikan semakin besar terutama dalam bentuk kerjasama.
- d. Adanya organisasi profesi yang memiliki komitmen terhadap pendidikan.
- e. Meningkatnya kepedulian dan kerjasama dari pihak perguruan tinggi, industri obat-obatan, dan LSM Kesehatan Nasional dalam permasalahan kesehatan dan pengembangan kesehatan.

Kotawaringin Barat memiliki posisi strategis, yang secara Geografis terletak ditengah-tengah kepulauan Nusantara dan diapit dua Alur Laut Kepulauan Indonesiaserta memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar untuk dipromosikan dan dijualke pasar berskala Regional maupun Internasional khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat serta *eco-cultural tourism* yang didasarkan atas keunikan aneka ragam budaya-budaya lokal dan keanekaragaman hayati, yang menjadikannya sebagai potensi daerah yang layak untuk dikembangkan.

Potensi unggulan daerah dapat diartikan sebagai sumber daya baik alam maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai bobot lebih dan diperkirakan dapat menjadi komoditas unggulan daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan daerah, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Potensi Unggulan Daerah ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria:

- a. Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mencerminkan potensi sumber daya alam dan secara ekonomi;
- c. Memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor lainnya;
- d. Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- e. Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil terhadap alam.

Sehingga dapat dirumuskan sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- a. Pertanian dalam arti luas,
- b. Perdagangan,
- c. Industri pengolahan,
- d. Jasa-jasa dan Pengangkutan, dan
- e. Komunikasi.

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang menjadi sektor basis.

Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor kekuatan dan aspek eksternal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditetapkanlah Produk Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 520/06/Bapp-III/2016.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :

- a. Crude Palm Oil (CPO)
- b. Krupuk Amplang,
- c. Ekowisata, dan
- d. Daging sapi potong.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut diatas merupakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong untuk memasuki pasar global.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini selain terlihat dari potensi sumber daya alamnya yang melimpah, juga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut ditopang oleh beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan melalui komoditi/produk/jenis usaha unggulannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan sejumlah KPJU yang telah unggul dalam

sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi di masa datang, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
	Pertanian/ Tanaman Pangan			Pertambangan dan Bahan Galian	
1.	Padi Sawah	0,313	1.	Emas	0,324
2.	Jagung Manis	0,226	2.	Batu Gunung	0,213
3.	Kacang Tanah	0,216	3.	Pasir Zirkon	0,174
4.	Ubi Kayu	0,127	4.	Tanah Urug	0,157
5.	Ubi Jalar	0,118	5.	Pasir Batu	0,132
	Pertanian/ Hortikultura			Industri Pengolahan	
1.	Sawi	0,405	1.	Amplang	0,344
2.	Pisang	0,201	2.	Roti	0,268
3.	Kacang Panjang	0,184	3.	Kue Jajanan	0,160
4.	Nangka	0,109	4.	Batako	0,122
5.	Rambutan	0,101	5.	Batu Bata	0,106
	Pertanian/ Perkebunan			Perdagangan	
1.	Kelapa Sawit	0,358	1.	Pakaian Jadi	0,233
2.	Karet	0,320	2.	Ikan	0,232
3.	Kelapa (dalam)	0,132	3.	Toko Sembako	0,182
4.	Lada	0,126	4.	Emas	0,177
5.	Jabon	0,064	5.	Sayuran	0,176
	Pertanian/ Peternakan			Pariwisata, Hotel dan Restoran	
1.	Sapi Pedaging	0,389		Warung Kopi	0,308
2.	Ayam Ras Pedaging	0,344		Hotel (melati)	0,231
3.	Ayam Buras	0,122		Wisata Alam	0,208
4.	Walet	0,088		Rumah Makan	0,156
5.	Entog (itik)	0,058		Losmen	0,097
	Pertanian/ Perikanan			Transportasi	
1.	Ikan Nila (kolam)	0,258	1.	Angkutan Barang	0,306
2.	Ikan Mas (kolam)	0,220	2.	Angkutan Antar Kota	0,263
3.	Ikan Patin (kolam)	0,219	3.	Taksi	0,157
4.	Ikan Lele Dumbo (kolam)	0,158	4.	Angkutan Kota	0,145

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
5.	Kerang (tangkap)	0,145	5.	Speed Boat	0,129
	Kehutanan (non kayu)			Konstruksi dan Jasa Usaha	
1.	Rotan	0,321	1.	Tukang Batu	0,263
2.	Kayu Gembor	0,227	2.	Tukang Bangunan	0,245
3.	Nipah	0,202	3.	Bengkel Motor	0,225
4.	Gaharu	0,168	4.	Jasa Cuci Mobil	0,198
5.	Damar	0,081	5.	Buruh Harian	0,069

Sumber : Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan oleh Bank Indonesia Th.2013

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan dan titik kritis terhadap KPJU unggulan maka telah direkomendasikan beberapa masukan sebagai berikut:

a. Padi Sawah

Rekomendasi bagi pelaku UMKM dengan menggunakan varietas atau bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat, sehingga hasil yang akan diperoleh akan lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu dapat pula dengan membranding beras sendiri dengan gaya yang lebih baik. Bagi Instansi Pemerintah Terkait dengan memberikan bantuan modal dan teknologi modern, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang budidaya padi sawah.

b. Karet

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas dengan penggunaan bibit berkualitas dan proses pemeliharaan yang baik. Selain itu membentuk klaster karet dan asosiasi petani karet. Bagi Instansi Pemerintah Terkait upaya yang dapat ditempuh dengan peningkatan transparansi harga, penguatan teknologi dan inovasi di setiap lini produk. Selain itu pendirian pabrik pengolahan karet di wilayah yang belum tersedia serta proyek pengadaan industri karet setengah jadi sehingga tidak menjual bahan mentah saja. Bagi perbankan pendirian perbankan pada setiap kecamatan yang belum tersedia, sehingga mempermudah akses permodalan.

c. Kelapa Sawit

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk. Penting sekali bagi pembudidaya dalam memperhatikan bibit yang digunakan berkualitas atau tidak. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah menyediakan bibit unggul, pengembangan bibit unggul bersama pelaku UMKM secara mandiri, pengadaan pabrik pengolahan sawit di wilayah yang belum tersedia, peningkatan pelatihan

sosialisasi teknik budaya. Bagi Perbankan dengan meningkatkan kemudahan akses permodalan, dan sosialisasi besaran kredit pembiayaan.

d. Sapi Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah mengembangkan agribisnis pembibitan sapi potong, pemanfaatan sumber daya lokal potensial yang ada di lokasi usaha yang tersedia dengan mudah dan harga murah, mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan budidaya. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah memfasilitasi dan advokasi terutama dalam dukungan modal, inovasi teknologi, pembinaan kepada petani terkait teknik pembibitan serta manajemen usaha, dan mendatangkan sapi betina untuk pembibitan sapi. Bagi Perbankan dengan pemberian bantuan modal.

e. Ayam Ras Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah dengan pengadaan bibit dan pakan secara mandiri. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dengan pembinaan dan pelatihan untuk pembibitan ayam potong dan pembuatan pakan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien dalam pembiayaan. Bagi perbankan adalah mempermudah akses permodalan yaitu dengan membangun jaringan perbankan di lokasi-lokasi yang belum tersedia.

f. Ikan Patin (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk dan membangun pembibitan patin. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi dalam proses budidaya, baik dalam pembuatan kolam, pengawasan kualitas air, proses pengiriman yang sesuai standar serta melakukan inovasi produk olahan dari ikan patin. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah pemberian pelatihan dan pembinaan dalam pembibitan ikan patin dan teknik budidaya yang baik, efisien dan berdaya hasil maksimal. Bagi perbankan dengan memberikan bantuan kredit syari'ah dalam pengembangan usaha budidaya maupun pembibitan patin.

g. Ikan Nila (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah menekan biaya produksi dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas. Hal tersebut dapat pula ditempuh dengan membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Selain itu dapat pula memasuki segmen pasar baru serta meningkatkan cakupan distribusinya, meningkatkan

produk olahanyang bervariasi dan berdaya saing. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dukungan modal dan inovasi teknologi terutama dalam pembuatan pakan ikan, pembinaan dan pelatihan kepada petani terkait teknik budidaya dan pengolahan pakan. Bagi perbankan dengan menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi bagi petani ikan agar memudahkan mereka dalam pembudidayaan.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dapat dilihat pada uraian berikut ini :

a. Pendidikan

Kelengkapan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjukkan dengan keberadaan sarana pendidikan yang ada, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Distribusi dari masing-masing jenis fasilitas pendidikan di setiap kecamatan pada umumnya cukup merata, kecuali untuk perguruan tinggi yang hanya terdapat di ibu kota Kabupaten. Adapun kondisi kegiatan pendidikan yang dirinci menurut tingkatan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti yang terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.12
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016/2017

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1.	SD	188	1.779	30.548
2.	SMP	59	725	10.804
3.	SMA	13	298	4.769
4.	SMK	14	317	4.364
Jumlah		274	3.119	50.485

Sumber : DSS DAPODIK Tahun 2017 <http://118.98.166.61/dss/>

Pencapaian kinerja Urusan Pendidikan yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan dibidang pendidikan sebagai berikut :

- 1) Meskipun pada data terjadi penurunan APK dan APM, tetapi pada kenyataannya terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan wajib belajar. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Persentase APK dan APM Tahun 2013– 2016

JENJANG	APK (%)				APM (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
SD/MI	106,95	117,35	118,14	118,20	92,83	98,60	98,79	98,80
SMP/MTS	97,56	95,89	98,88	98,90	84,60	80,92	86,60	86,65
SMA/MA/SMK	77,88	87,59	87,59	87,60	75,32	74,03	75,06	75,10

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2016

- 2) Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2011/2012melalui rintisan sekolah gratis, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di setiap Kecamatan, baik PAUD, SD, SLTP dan SMA/SMK. Kinerja pelayanan pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2016/ 2017

No.	Jenjang/ Indikator Kinerja	Rasio
I.	Pendidikan Dasar	
1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	
2	Rasio Sekolah/ Guru	1 : 9,46
2	Rasio Guru/ Murid	1 : 17,17
II.	Pendidikan SMP/MTS	
1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	
2	Rasio Sekolah/ Guru	1 : 12,29
2	Rasio Guru/ Murid	1 : 14,9
III.	Pendidikan SMA/MA/SMK	
1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	
2	Rasio Sekolah/ Guru	1 : 22,78
2	Rasio Guru/ Murid	1 : 14,85

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2016

- 3) Tingkat kelulusan tiap jenjang pendidikan Tahun 2016 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan 2015,terutama jenjang pendidikan dasar

sedangkan jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan, uraian secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Angka kelulusan Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014- 2016

No.	Jenjang Pendidikan	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
I.	Pendidikan Dasar			
1	SD/MI	98,92	100	100
2	SMP/MTS	99,58	100	100
III.	Pendidikan Menengah			
1	SMA /MA/SMK	99,09	73,71	99,00

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2016

- 4) Angka putus sekolah tiap jenjang pendidikan Tahun Ajaran 2016 secara umum mengalami .penurunan bila dibandingkan Tahun Ajaran 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.16
Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014 - 2016

No.	Jenjang Pendidikan	2014 (%)	2015 (%)	2016(%)
1	SD/ MI	0,20	0,21	0,14
2	SMP/ MTS	1,19	0,40	0,70
3	SMA/ MA/ SMK	1,60	1,10	0,70

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2016

- 5) Untuk pencapaian SPM memang belum dapat di penuhi secara maksimal, karena berbagai macam faktor, antara lain faktor anggaran, letak geografis yang terpencil, jumlah penduduk dan akses jalan yang belum terbuka luas. Namun kami tetap berusaha meningkatkan pemenuhan SPM dengan cara menjadikan prioritas kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

ii) Kesehatan

Capaian keberhasilan Urusan Kesehatan berdasarkan kinerja Output dan Outcome yang mendukung pencapaian keberhasilan di bidang kesehatan adalah :

- a. Selama tahun 2016 kunjungan RSUD Sultan Imanuddin sebanyak 100.297 orang atau meningkat sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2015 dengan total kunjungan sebanyak 97.081 orang;
- b. Pendapatan RSUD Sultan Imanuddin melalui retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 74.241.438.924kurang dari target yang telah ditetapkan Rp.75.250.000.000 (98,66%).

- c. Pada tahun 2016 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat / pelanggan RSUD Sultan Imanuddin terhadap 600 responden yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dengan hasil survey kepuasan 99,83% menyatakan puas (92,83% menyatakan puas, 7% menyatakan sangat puas) dan 0,17% menyatakan kurang puas;
- d. Ketersediaan tenaga dokter umum sebanyak 13 orang, dokter spesialis sebanyak 27 orang, yaitu terdiri dari 23 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak, serta 2 orang tenaga mitra, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dokter spesialis bedah : 2 orang (PNS);
 - b. Dokter spesialis kandungan : 3 orang (PNS);
 - c. Dokter spesialis anak : 2 orang PNS (1orang tenaga kontrak);
 - d. Dokter spesialis penyakit dalam : 3 orang (PNS);
 - e. Dokter spesialis Syaraf : 2 orang (PNS);
 - f. Dokter spesialis THT-KL : 1 orang (PNS);
 - g. Dokter spesialis Mata : 1 orang (PNS);
 - h. Dokter spesialis Anastesi : 2 orang (1 orangPNS dan 1 orang tenaga mitra);
 - i. Dokter spesialis Radiologi : 1 orang (PNS);
 - j. Dokter spesialis Patologi Klinik : 3 orang (PNS);
 - k. Dokter spesialis Jiwa : 1 orang (tenaga kontrak);
 - l. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 1 orang (PNS);
 - m. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 1 orang (PNS);
 - n. Dokter Gigi Spesialis Orthodontis : 1 orang (PNS)
 - o. Dokter Spesialis Orthopedic : 1 orang (tenaga kontrak).
 - p. Dokter Spesialis Konservasi Gigi : 1 orang (tenaga kontrak).
- e. Tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin berdasarkan SPM sebanyak172 indikator dan yang mencapai target sebanyak 148 indikator (86,04%);
- f. Pencapaian Indikator tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit sebagai berikut :
 - 1. *Bed Occupancy Rate (BOR)* : 77,27% (ideal 60-85%);
 - 2. *Average Length of Stay (Av LOS)* : 3,52 hari (ideal 6-9 hari);
 - 3. *Bed Turn Over (BTO)* : 80,29 kali (ideal 40-50 kali);
 - 4. *Turn Over Interval (TOI)* : 1,04 hari (ideal 1-3 hari);
 - 5. *Net Death Rate (NDR)* : 2,33% (nilai yang masih ditolerir 25 per seribu);
 - 6. *Gross Death Rate (GDR)* : 3,50% (seyogyanya tidak lebih dari 45 per seribu).

iii) **Tenaga Kerja**

Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dilihat dari jenisnya, lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi sektor informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. Mengenai tenaga kerja serta tingkat pendidikan tenaga kerja diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihatpada tabelberikut ini:

Tabel 2.17
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Bekerja	122.307	133.222	141.011
2.	Sekolah	15.141	17.465	14.855
3.	Mengurus Rumah Tangga	39.732	35.398	37.949
4.	Lainnya	5.886	5.446	3.992
	Jumlah	183.066	191.531	202.545

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

Pada tahun 2015 dengan bertambahnya jumlah Angkatan Kerja (AK) sebanyak 145.749 jiwa, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,34 % meningkat dibandingkan dengan tahun 2014seperti yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2012 – 2015

No.	Tahun	Angkatan Kerja/ AK (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
1.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
2.	2013	126.935	67,63	97,53	2,47
3.	2014	136.864	70,05	98,14	1,86
4.	2015	145.749	71,96	97,66	2,34

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Adapun jumlah pencari kerja, lowongan dan penempatan tenaga kerja adalah sebagaimana tertera pada tabel sebagaiberikut :

Tabel 2.19
Statistik Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat 2013– 2015

No.	Aktivitas	2013	2014	2015
1.	Pendaftaran	2.063	2.379	885
2.	Permintaan	367	522	152
3.	Pengiriman	261	510	162
4.	Penempatan	207	510	151
5.	UMK	1.538.244	1.789.066	2.003.745

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

iv) Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.20
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (000 jiwa)
2009	186.618	7,76	19,6
2010	212.060	6,87	17,8
2011	238.987	6,19	16,5
2012	268.998	5,64	14,1
2013	273.467	5,44	14,3
2014	279.080	5,27	14,33
2015	293.436	5,07	14,01

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011– 2016

No	Tahun	Jumlah grup kesenian	Jumlah gedung kesenian	Jumlah klub olahraga	Jumlah gedung olahraga
1	2011	35	3	60	7
2	2012	43	3	77	7
3	2013	43	3	96	8
4	2014	43	3	120	8
5	2015	43	3	122	8
5	2016	43	3	122	8

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut :

Tabel 2.22
Kondisi Sarana dan Prasarana pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015– 2016

No.	Uraian	Tahun	
		2015	2016
1.1	Pendidikan dasar		
	SD/MI		
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SD/MI	1 : 21	1 : 21
	SMP/MTs		
1.1.2	Perbandingan guru dan siswa SMP/MTs	1 : 19	1 : 14
1.2	Pendidikan Menengah		
1.2.1	Rasio guru terhadap murid	1 : 14	1 : 14
1.3	Fasilitas Pendidikan		
1.3.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	33,05	33,10
1.3.2	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	52,78	52,80
1.3.3	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	88,00	88,10
1.4	Angka Putus Sekolah		
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,20	0,14
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,40	0,70
1.4.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,10	0,70

1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
1.5.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,08	98,00
1.5.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,56	98,50
1.5.3	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,56	99,00

b. Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012– 2015
Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah posyandu	174	177	195	197
2.	Jumlah balita	16.655	19.619	20.672	20.283
3.	Rasio	0,010	0,009	0,009	0,010

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dan BPS 2016

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pusekesmas Pembantu (Pustu)

Tabel 2.24
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012- 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas	15	15	17	18
2.	Jumlah Poliklinik/ R.Bersalin/B. Pengobatan	16	16	16	16
3.	Jumlah Pustu	75	75	75	76
4.	Jumlah Penduduk	253.000	261.200	269.629	278.141
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,07	0,06	0,06	0,06
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,30	0,29	0,28	0,27

Sumber : BPS Kotawaringin Barat Tahun 2016

3) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Untuk menghitung rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2012- 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	2	2
2.	Jumlah Penduduk	253.000	261.200	269.629	278.141
3.	Rasio	0,04	0,04	0,07	0,07

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

4) Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Dokter Tahun 2012- 2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	31	30	30	45
2	Jumlah Penduduk	253.000	261.200	269.629	278.141
3	Rasio	0,13	0,10	0,11	0.16

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

Tabel 2.27
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Ktw Lama	19.157	4	0,21
2	Arut Selatan	114.952	25	0,22
3	Kumai	54.015	7	0,13
4	Arut Utara	18.530	3	0,16
5	Pangkalan Banteng	38.993	3	0,08
6	Pangkalan Lada	32.494	3	0.09
	Jumlah	278.141	45	

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

5) Rasio Tenaga medis Persatuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk menghitung rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.28
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 – 2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Medis	355	219	na	808
2	Jumlah Penduduk	253.000	261.200	269.629	278.141
3	Rasio	1,45	0,84		2,91

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

Tabel 2.29
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2016
di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1	Ktw Lama	19.157	71	0,004
2	Arut Selatan	114.952	435	0,004
3	Kumai	54.015	112	0,002
4	Arut Utara	18.530	51	0,003
5	Pangk. Banteng	38.993	95	0,002
6	Pangk. Lada	32.494	44	0,001
	Jumlah	278.141	808	

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

c. Lingkungan Hidup

1) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	11.255	11.980	13.631	15.220
2.	Jumlah penduduk	253.000	261.200	269.629	278.141
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	4,45	4,59	5,06	5,47

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

d. Sarana dan Prasarana Umum

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kondisi dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.31
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012– 2016

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	526,68	582,38	615,14	890,50	959,29
2.	Kondisi Sedang	1.041,97	999,59	981,39	761,46	735,56
3.	Kondisi Rusak	669,52	633,39	657,38	608,00	619
4.	Kondisi Rusak Berat	242,02	246,22	227,56	209,79	156,97
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	2.480,18	2.461,58	2.449,65	2.469,75	2.470,82

Sumber : Dinas PU Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

2) Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk

Tabel 2.32
Rasio Tempat Ibadah dan Pemeluk Tahun 2015

No.	Bangunan tempat Ibadah	2015		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)
1.	Mesjid	234	227.955	0,001
	Mushola/Langgar	393	227.955	0,002
2.	Gereja	114	15.965	0,007
3.	Pura	1	1.193	0,001
4.	Vihara	2	808	0,002
5.	Kelenteng	1	54	0,019
6.	Lainnya/Balai Kaharingan	3	1.566	0,002

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

3) Rasio Tempat Pembuangan sampah Per satuan Penduduk

Tabel 2.33
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Daya Tampung TPS (m³)	94,08	126,96	182,16	220,56
2.	Jumlah Penduduk	253.000	261.200	269.629	278.141
3.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0004	0,0005	0,0008	0,0008

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2017

2.1.4.1. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten kotawaringin Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Kabupaten kotawaringin Barat hanya sebesar 34,84 Juta Rupiah meningkat menjadi 37,50 Juta Rupiah pada tahun 2015.

Jenis komoditi yang memiliki nilai ekspor terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pada tahun 2011 adalah CPO, *Polywood* dan *Iron ore*.

2. Iklim Berinvestasi

Merupakan komitmen pemerintah daerah bahwa kebijakan penanaman modal daerah di Kabupaten kotawaringin Barat, meliputi 2 (dua) langkah yakni:

- a) Arah dan tujuan kebijakan pemerintah daerah dibidang penanaman modal mempunyai maksud sebagai berikut:
 - 1) Mempertahankan dan mengembangkan investasi yang sudah ada.
 - 2) Menambah dan mencari serta menarik investor-investor baru baik lokal, nasional maupun asing.
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat.
- b) Strategi kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, meliputi:
 - 1) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proyek investasi PMA dan PMDN melalui satuan tugas (satgas) terpadu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sehat.
 - 2) Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat keamanan terhadap para investor.

- 3) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, keringanan pajak, pembebasan pajak untuk masa persiapan dan kontrustruksi (berupa *tax holiday* secara selektif).
- 4) Melakukan promosi: kedalam dan luar negeri dengan mengikuti even-even pameran, penyebaran booklet dan leaflet melalui perwakilan/kedutaan Indonesia dan asing di dalam dan di luar negeri baik melalui jasa pos, website/internet, dan email.
- 5) Menjalin dan mewujudkan kerjasama sektoral, nasional, regional, serta internasional yang mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah, seperti kerjasama BIMP-EAGA, ASEAN, AIDA, AFTA dan lainnya.
- 6) Peningkatan pengembangan dan pembangunan Prasarana dasar/Infrastruktur daerah, sebagai sarana pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten kotawaringin Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia(KTI).

Perkembangan penanaman modal, baik PMA/PMDN, mengalami perubahan/peningkatan, baik dalam jumlah proyek maupun jumlah investasi. Jumlah perusahaan PMA/PMDN secara kumulatif sebanyak 35 buah perusahaan dengan perincian PMA sebanyak 26 buah dan PMDN sebanyak 9 buah perusahaan dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 637.900.000.000,-.

Untuk menunjang kegiatan investasi telah tersedia 2 (dua) pelabuhan laut serta 1 (satu) bandar udara. Pelabuhan laut tersebut adalah Pelabuhan Kumai dengan panjang dermaga 900 m, dan Pelabuhan Pangkalan bun (316 m). Sedangkan 1 (satu) bandar udara tersebut adalah: Bandara Iskandar, dengan panjang landasan 1.850 m.

Selain data primer maupun sekunder yang disajikan diatas, Upah Minimum Regional merupakan salah satu penarik investasi bagi investor, kejelasan regulasi tentang upah minimum akan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi. Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2008 sebesar Rp. 781.185,- pada tahun 2009 sebesar Rp.890.550,-pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.059.754 dan tahun 2011 sebesar Rp. 1.239.912 pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.401.101,- pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.583.224,- pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.789.066,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.003.745,-(Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat).

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah tercantum dalam RKPD Tahun 2016 dan realisasinya pada APBD Tahun 2016 sebagai berikut :

2.2.1. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 khususnya pada bidang pendidikan ditandai dengan tercapainya 27 indikator Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar. Hal ini ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap desa telah terlayani pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan sarana pendidikan SMP yang ada telah mencapai 59 satuan pendidikan. Artinya bahwa penyediaan sarana pendidikan dasar telah dapat mengakomodir jumlah anak usia sekolah.

Begitu pula dengan peningkatan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditandai dengan peningkatan jumlah Satuan PAUD (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 142 Satuan PAUD. Pada tahun 2016, jumlah Desa/Kelurahan yang sudah tersedia Satuan PAUD sebanyak 58 Desa/Kelurahan dari 94 Desa/Kelurahan yang ada, atau sebesar 61%.

Keberadaan sarana pendidikan SMA dan SMK mencapai 27 sekolah dengan jumlah murid yang bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas.

Sedangkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berstatus PNS belum terpenuhi terutama pada tingkat sekolah dasar yang salah satu penyebabnya karena kebijakan moratorium penerimaan PNS dari pemerintah pusat.

Urusan wajib bidang pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat. Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016 seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015-2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016	
				Target	Realisasi
1	Angka Melek Huruf	%	97	98	97,05
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,80	8,95	8,05
3	Angka Partisipasi Kasar				
	a. PAUD	%	30,03	30,10	30,03
	b. SD/MI	%	118,14	118,35	118,20
	c. SMP	%	98,88	99	98,90
	d. SMA/SMK	%	87,59	87,65	87,60
4	Angka Partisipasi Murni				
	a. PAUD	%	27,78	27	20,13
	b. SD/MI	%	98,79	98,82	98,80
	c. SMP	%	86,60	86,70	86,65
	d. SMA/SMK	%	75,06	75,25	75,10
5	Angka Kelulusan				
	a. SD/MI	%	100	100	98,92
	b. SMP	%	100	100	99,98
	c. SMA/SMK	%	99,09	100	98,88
6	Angka melanjutkan				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP	%	99,75	99,90	99,75
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	%	99,66	99,80	96,99
7	Angka Putus Sekolah				
	a. SD/MI	%	0,20	0,14	0,14
	b. SMP	%	0,40	0,54	0,70
	c. SMA/SMK	%	1,10	0,70	0,70
8	Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional				
	a. SD/MI	siswa	2	2	-
	b. SMP	siswa	19	19	-
	c. SMA/SMK	siswa	15	15	-
9	Jumlah sekolah standar nasional				
	a. SD/MI	sekolah	-	-	-
	b. SMP	sekolah	-	-	-
	c. SMA/SMK	sekolah	-	-	-
10	Prestasi Olah raga siswa Tingkat Nasional				
	a. PON	siswa	1	-	-
	b. POPNAS	siswa	4	-	-
	c. POSPENAS	siswa	3	-	-
11	Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah (Jumlah penduduk usia sekolah/ Jumlah sekolah)				
	a. SD/MI		162,09	196,68	162,15

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016	
				Target	Realisasi
	b. SMP		123	332,19	332,19
	c. SMA/SMK		326	326,15	326,01
12	Rasio jumlah guru/murid				
	a. SD/MI		1:21	1:21	1.17.28
	b. SMP		1:19	1:19	1.14.90
	c. SMA/SMK		1:14	1:14	1.18.26
13	Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas sesuai SPM				
	a. SD/MI		33,05	33,15	33,10
	b. SMP		52,78	52,81	52,80
	c. SMA/SMK		88	88,15	88,10
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV				
	a.Guru SD/SDLB		97,08	97,08	98
	b.Guru SMP/SMPLB		95,56	98,45	98,50
	c.Guru SMA/SMALB/SMK		95,56	98	99

Sumber : Disdikpora Kab. Kotawaringin Barat

Dalam pelaksanaan urusan di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sejumlah 14 indikator kinerja. Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari besaran angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 sebesar 30,03%, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 sebesar 20,13%. Kondisi ini menggambarkan dari 100 anak usia PAUD di Kotawaringin Barat, sebanyak 20,13% anak telah bersekolah PAUD. APK pada tahun 2016 terlihat tetap dibandingkan APK tahun 2015 dan APM pada Tahun 2016 menurun dibandingkan APM tahun 2015. Hal ini disebabkan karena dalam proses penghitungan Angka APK dan APM pada tahun 2015 dengan memasukan seluruh satuan PAUD sedangkan pada tahun 2016 satuan PAUD yang digunakan sebagai dasar perhitungan hanya PAUD yang terdaftar dalam DAPODIK PAUD (telah memiliki izin operasional).

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2015 sebesar 118,14%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 118,20%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2015 sebesar 98,79% dan pada tahun 2016 sebesar 98,80%.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP pada tahun 2015 sebesar 98,88%, dan di tahun 2016 sebesar 98,90%. APM SMP di tahun 2015 sebesar 86,60%. dan di tahun 2016 menjadi 86,65%. Menurut catatan, angka putus sekolah SMP saat ini sebesar 0,40%. Angka ini sedikit lebih besar dari target yang

ditentukan, yaitu sebesar 0,54%.

Kondisi APK Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) pada tahun 2015 menunjukkan angka sebesar 87,59%, sedangkan tahun 2016 sebesar 87,60%. APM SMA/SMK tahun 2015 sebesar 75,06% dan mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 75,10%. Rasio siswa SMA terhadap SMK adalah 1:0,83. Artinya, siswa SMA lebih besar jumlahnya dibanding siswa SMK. Hal ini menunjukkan keberadaan SMK di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas daya tampung maupun kualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan minat yang tinggi atas SMK serta penyiapan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Dengan melihat kebutuhan daerah, terutama dari sektor ekonomi, maka perlu dikembangkan SMK kelompok/bidang pariwisata, pertanian dan perkebunan. Selain SMK Teknik, SMK Akuntansi, SMK Kesehatan, SMK Perikanan, dan SMK Pertanian, perlu juga dikembangkan sekolah yang berbasis keagamaan.

Angka Kelulusan pada tingkat SD/MI Tahun 2016 sebesar 98,92%, untuk tingkat SMP sebesar 99,98% serta ditingkat SMA/SMK angka kelulusan sebesar 98,88%. Angka kelulusan tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan jumlah siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian. Sedangkan apabila Angka Kelulusan dihitung berdasarkan siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan siswa yang mengikuti ujian maka diperoleh Angka Kelulusan mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan.

Berdasarkan data, angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2016 sebesar 0,14%. Pada umumnya yang melatarbelakangi alasan putus sekolah lebih pada kondisi budaya, yaitu adanya pemahaman lama yang beranggapan bahwa anak bisa baca tulis sudah cukup dan faktor geografis jarak sekolah di beberapa wilayah yang relatif masih cukup jauh serta domisili orang tua yang tidak menetap karena faktor pekerjaan. Untuk menekan angka putus sekolah dilakukan dengan penambahan jumlah SD, jumlah ruang kelas, adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah.

Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kotawaringin Barat pada tahun 2016 berjumlah 142 sekolah. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2015 berjumlah 188 sekolah dan tahun 2016 tetap berjumlah 188 sekolah yang merata di seluruh desa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2015 sama dengan tahun 2016 yakni berjumlah 15 sekolah dan hanya terdapat di beberapa desa. Sedangkan SDLB sampai saat ini hanya berjumlah 1 sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP tahun 2015 berjumlah 59 sekolah dan di tahun 2016 tetap

berjumlah 59 sekolah. Untuk SMPLB 1 sekolah. Pada jenjang pendidikan SMA tahun 2016 berjumlah 13 sekolah sama dengan jumlah pada tahun 2015 dan SMK pada tahun 2016 berjumlah 14 sekolah.

Indikator kinerja lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah rasio siswa per-guru. Rasio siswa per-guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang pendidikan tersebut.

Rasio siswa per-guru untuk tahun 2016 pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 adalah 1:17, untuk jenjang SD/MI adalah 1:17,28, untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1:14,90, untuk jenjang pendidikan SMA adalah 1:18,26 sedangkan untuk SMK adalah 1:13,69. Norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah SD/MI sebesar 1:32 ; SMP sebesar 1:36; dan SMA sebesar 1:20, serta SMK sebesar 1:15. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per-guru SD/MI, SMP, dan SMA/SMK di Kotawaringin Barat telah sesuai dan berada pada standar nasional yang ditetapkan.

Apabila dicermati dari ketersediaan ruang belajar, rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 24 siswa/kelas, SMP adalah 28 siswa/kelas, dan SMA/SMK/MA sebesar 32 siswa/kelas, sebenarnya hal ini menunjukkan ketersediaan ruang belajar telah memenuhi standar sesuai SPM pendidikan dasar yaitu untuk SD maksimal 32 siswa/kelas dan SMP maksimal 36 siswa/kelas, sedangkan SMA/SMK maksimal 36 siswa/kelas menurut standar sarana dan prasarana SMA/SMK. Namun demikian apabila dicermati berdasarkan jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) pada tiap satuan pendidikan, maka terdapat kesenjangan jumlah siswa dalam rombel antara wilayah perkotaan/yang padat penduduk dibandingkan wilayah pedesaan/yang jarang penduduk. Satuan Pendidikan pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi sebagian besar jumlah siswa dalam rombel melampaui standar sesuai SPM pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP serta standar sarana dan prasarana SMA/SMK untuk jenjang SMA/SMK. Sehingga masih perlu adanya penambahan fasilitas ruang belajar pada tiap jenjang satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan dasar/standar sarana dan prasarana SMA/SMK, serta memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

2. URUSAN KESEHATAN

Tujuan dari pembangunan kesehatan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah, 1 unit rumah sakit swasta, 2 rumah bersalin swasta, 1 klinik pengobatan swasta, 18 unit puskesmas, 75 unit puskesmas pembantu, 57 unit Poskesdes dan didukung 742 orang tenaga kesehatan.

Beberapa hal yang menjadi isu mendasar pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah peningkatan jaminan pemeliharaan semesta, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan/pelatihan kesehatan. Perlu disadari bahwa kesehatan dan permasalahannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi semua pihak di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti dunia usaha, LSM, dunia pendidikan, dan masyarakat sendiri. Hal ini karena permasalahan kesehatan terkait dengan faktor seperti keadaan geografis dan lingkungan, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya.

Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015-2016

No	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
			2015	2016	2015	2016	
A	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar						
1	Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4)		95	95	87,4	87.35	Tidak memenuhi target dan

No	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
			2015	2016	2015	2016	
							turun di banding tahun 2015
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		80	95	62	80	Tidak memenuhi target namun naik dibanding tahun 2015
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		93	90	87	88	Naik dari tahun 2015 tapi tidak mencapai target tahun 2016
4	Cakupan pelayanan nifas		90	90	87,7	88.7	Tidak sesuai target namun melebihi capaian 2015
5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani		80	80	54	74.22	Tidak sesuai target namun melebihi capaian 2015
6	Cakupan Kunjungan Bayi		90	98	92,6	91.83	Turun dari 2015 dan tidak mencapai target
7	Cakupan desa / kelurahan UCI (<i>universal child immunization</i>)		100	100	91,5	86.1	Tidak sesuai dengan target turun dari tahun 2015
8	Cakupan pelayanan anak balita		85	100	92,4	93.71	Tidak sesuai dengan terget naik dari tahun 2015
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan)		100	100	100	100	Tercapai
10	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan		100	100	100	3	Tidak memenuhi target, turun dari 2015
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		100	100	96,3	100	Tercapai
12	Cakupan peserta		75	95	130,4	138	Tercapai dan

No	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
			2015	2016	2015	2016	
		KB aktif					melebihi target
	13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP) per 1000 penduduk < 15 tahun	$\geq 2,0$ per 100.000 pddk ≤ 15 tahun tiap tahunnya	0	0	0	
	14	Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	100	100	100	100	
	15	Cakupapan penemuan dan penanganan penderita baru TB BTA positif	90	90	98,46	72	Tidak tercapai turun dari 2015
	16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	
	17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100	100	90	81.2	Tidak tercapai, turun dari 2015
	18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	
B	Pelayanan Kesehatan Rujukan						
	19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	Tercapai
	20	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kab / Kota	100	100	100	100	Tercapai
C	Penyelidikan Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB						
	21	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	100	100	100	0	Tidak tercapai dan turun dari 2015

No	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
			2015	2016	2015	2016	
		penyelidikan epidemiologi < 24 jam					
D	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat						
	22	Cakupan desa siaga	80	80	80	81.9	Tercapai dan melebihi target
E	Rasio Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan Dan Umur Harapan Hidup						
	23	Rasio rumah sakit per satuan penduduk.(Rasio tempat tidur / jumlah penduduk).	1:1000	1:1000	1:963	1:963	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
	24	Rasio dokter Spesialis Per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:4348	1:11589	Belum Tercapai
	25	Rasio dokter umum per satuan penduduk (1:2083)	1:2083	1:2083	1:2857	1:3863	Belum tercapai
	26	Rasio dokter gigi per satuan penduduk (1:9090)	1:9090	1:9090	1:1000 0	1:15452	Belum tercapai
	27	Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk bidan (1:1.333)	1:1.333	1:1.333	1:454	1:1082	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
	28	Rasio tenaga Perawat per satuan penduduk (1:632)	1:632	1:632	1:326	1:753	Belum tercapai
	29	Rasio tenaga Apoteker per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:1600 0	1:46356	Belum Tercapai
	30	Rasio tenaga SKM per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:3127	1:7726	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
	31	Rasio tenaga Perawat gigi per satuan penduduk (1:6250)	1:6250	1:6250	1:6750	1:15452	Belum Tercapai
	32	Rasio tenaga Gizi per satuan penduduk (1:4166)	1:4166	1:4166	1:4000	1:4000	Tercapai target (Melebihi

No	INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
			2015	2016	2015	2016	
							Target Nasional)
	33	Rasio tenaga Sanitarian per satuan penduduk (1:6666)	1:6666	1:6666	1:6666	1:16361	Belum tercapai target
	34	Umur Harapan Hidup	72	72	72	72	Tercapai target

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian derajat kesehatan (Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan) Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata secara nasional. Capaian usia harapan hidup di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya diwilayah tersebut.

Sebagaimana disajikan dalam tabel, untuk data angka harapan hidup yang tersedia adalah data kondisi tahun 2016 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 72. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kotawaringin Barat yang lahir pada tahun 2016 akan hidup hingga mencapai umur 72 tahun.

Meningkatnya pelayanan kesehatan, dan naiknya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik yang memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian Umur Harapan Hidup yang tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

Capaian Indikator kesehatan lainnya, seperti Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Bayi, serta gizi masyarakat menunjukkan tren positif. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari 92 per-100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2015 menjadi 194 per-100.000 Kelahiran hidup pada tahun 2016. Angka tersebut masih di bawah Angka Kematian Ibu nasional sebesar 228 per-100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 adalah 7,0 per-1000 Kelahiran Hidup lebih baik jika dibandingkan dengan tahun

2015 adalah 9,64 per-1000 Kelahiran Hidup. Angka tersebut jauh di bawah angka nasional sebesar 43 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007). Sedangkan Angka Kematian Bayi, pada tahun 2016 ini tercatat 7,0 per-1000 Kelahiran Hidup lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 9,27 per-1000 kelahiran hidup. Angka tersebut di bawah angka nasional sebesar 34 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007).

Pola penyakit menular yang selalu menjadi sepuluh besar penyakit (puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah influenza, diare, pneumonia, typhus perut klinis, diare berdarah (disentri), tersangka TB paru, campak dan TBC dengan BTA (+). Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut di antaranya penyakit jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), *hipertensi*, *stroke*, *diabetes mellitus*, *kanker*, hingga gangguan jiwa.

Prevalensi balita dengan gizi buruk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Kobar pada tahun 2016 sebesar 0,03 % atau hampir tidak ada pergeseran jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,02 %, dari target sebesar 5 %. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak terpantau.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta diharapkan tetap waspada serta dapat bersama sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk, atau minimal mempertahankannya.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Konsistensi partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat, merupakan kunci penting bagi keberhasilan penanganan urusan lingkungan hidup.

Adapun realisasi kinerja urusan lingkungan hidup atau pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2016 sebagai berikut.

1) Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air

a. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara Ambien

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2016 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar $200,74 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar $128,79 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar $84,71 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar $119,87 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar $93,93 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar $80,18 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dari ketiga lokasi tersebut pada tahun 2016 semester I dan II mengalami peningkatan kualitas udara karena hasil pengukuran berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu $230 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara untuk konsentrasi param Karbon Monoksida (CO) pada tahun 2016 semester I dilokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar $95,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $129,85 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Bundaran Pancasila sebesar $83,96 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan realisasi semester II untuk param CO di lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar $86,02 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai konsentrasi sebesar $114,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi sebesar $86,22 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara dimana pada semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari memiliki konsentrasi CO sebesar $95,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $86,02 \mu\text{g}/\text{m}^3$, semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai konsentrasi sebesar $129,85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $114,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sehingga hasil pengukuran berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu $30.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sedangkan untuk lokasi Bundaran Pancasila mengalami penurunan kualitas udara karena konsentrasi CO meningkat pada semester I sebesar $83,96 \mu\text{g}/\text{m}^3$ menjadi $86,22 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pada semester II, namun nilai ini masih berada di bawah baku mutu yaitu sebesar $30.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
3. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2016 untuk konsentrasi param Sulfur Dioksida (SO_2) semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar $68 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $8,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan lokasi Bundaran Pancasila sebesar $8,58$

$\mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester II untuk konsentrasi param tersebut pada Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar $8,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $10,64 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Sulfur Dioksida (SO_2) sebesar $8,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara karena lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari mengalami penurunan kadar SO_2 dari $68 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester I) dan $8,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester II). Nilai pada lokasi ini masih berada di bawah baku mutu yaitu $900 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sedangkan dua tempat lainnya yaitu lokasi Simpang Tiga Terminal pada semester I sebesar $8,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$, semester II sebesar $10,64 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sedangkan di lokasi Bundaran Pancasila pada semester I sebesar $8,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $8,84 \mu\text{g}/\text{m}$ mengalami penurunan kualitas lingkungan karena adanya peningkatan konsentrasi SO_2 . Akan tetapi hasil pengukuran masih berada di bawah baku mutu yaitu sebesar $900 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

4. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara untuk paramater Nitrogen Dioksida (NO_2) pada tahun 2016 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar $63,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$, Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $88,82 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan lokasi Bundaran Pancasila sebesar $71,33 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester II untuk param tersebut di lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari sebesar $3,55 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $3,57 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Bundaran Pancasila sebesar $1,13 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara dimana konsentrasi param NO_2 sebesar $63,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $3,55 \mu\text{g}/\text{m}^3$, semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal sebesar $88,82 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $3,57 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan untuk lokasi Bundaran Pancasila pada semester I sebesar $71,33 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $1,13 \mu\text{g}/\text{m}$. Dari semua titik lokasi diketahui bahwa hasil pengukuran masih berada di bawah baku mutu yaitu sebesar $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
5. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2016 untuk param Oksidan (O_3) semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari sebesar $62,30 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $34,45 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila sebesar $59,30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari sebesar $107,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $217,73 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila sebesar $226,13 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi konsentrasi O_3 semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami penurunan

kualitas udara yaitu lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari sebesar 62,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester I) dan 107,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester II), semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal sebesar 34,45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar 217,37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sedangkan pada semester I pada lokasi Bundaran Pancasila sebesar 84,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II meningkat menjadi 226,13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sehingga diketiga lokasi pengamatan diketahui mengalami penurunan kualitas udara karena terjadinya peningkatan konsentrasi Oksidan (O_3). Akan tetapi nilai-nilai tersebut masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sebesar 235 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

b. Tingkat Penurunan Pencemaran Air Sungai Arut dan Sungai Kumai

Param utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Suspended Solid (TSS)* dan *Demand Oxygen (DO)*. Objek pemantauan ada dua yaitu Sungai Arut dan Sungai Kumai.

1. Param Residu Terlarut (TDS)

Hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 110 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 132 mg/l, Lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 72 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 94 mg/l. Keempat lokasi tersebut masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 1.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Sedangkan di lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 17.016 mg/l berada di atas baku mutu yang persyaratkan atau mengalami penurunan kualitas air sungai. Tingginya kadar Residu Terlarut (TDS) disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan. Adapun hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Kumai di sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 17.016 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 5.420 mg/l. Kualitas air sungai pada kedua titik tersebut melampaui ambang batas apabila dibandingkan dengan baku mutu air kelas II sebesar 2.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan serta aktivitas perindustrian. Untuk lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 29 mg/l dan masih berada dibawah baku mutu kelas II menurut PP 82 Tahun 2001.

2. Param padatan Tersuspensi (TSS)

Hasil pengukuran total padatan tersuspensi (TSS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 48 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2)

sebesar 43 mg/l, (A.3) sebesar 40 mg/l, Lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 45 mg/l, Lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 50 mg/l nilai TSS pada kelima titik ini masih dibawah baku mutu kelas II sebesar 50 mg/l menurut PP 82 tahun 2001. Hasil pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Kumai di lokasi Kelurahan Kumai Hulu sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 49 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 41 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 28 mg/l, nilai padatan Tersuspensi (TSS) berada dibawah baku mutu dengan baku mutu air kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

3. Param BOD

Hasil pengukuran BOD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 2,9 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 2,8 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 2,5 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 1,3 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 1,5 mg/l. Kadar BOD di kelima lokasi tersebut berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Adapun hasil pengukuran BOD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) sebesar 2,8 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 2,5 mg/l dan Kumai Hulu (K.3) sebesar 2,8 mg/l. Kadar BOD di ketiga lokasi tersebut berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001.

4. Param COD

Hasil pengukuran COD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 24 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 25 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 24 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 9 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 10,3 mg/l berada di bawah baku mutu kelas II seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001, pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai. Hasil pengukuran COD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 25 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 23 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 25 mg/l berada dibawah baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai.

5. Param DO

Hasil pengukuran param DO Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 4,6 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 4,4 mg/l, lokasi

Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 4,5 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 5,0 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 4,5 mg/l. Kadar DO melebihi baku mutu air kelas II (jumlah minimal) yaitu sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa di perairan Sungai Arut, kadar oksigennya masih dalam batas aman. Adapun hasil pengukuran DO Sungai Kumai di lokasi sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 4,4 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 4,3 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 4,5 mg/l. Kadar DO melebihi baku mutu air kelas II (jumlah minimal) sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

2) Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani tahun 2016 target yang ditentukan sebanyak 14 unit usaha, dan terealisasi 100%. Sumber pencemar yang tertangani tersebar di wilayah Pangkalan Bun. Umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri yang potensial menimbulkan pencemaran air sungai akibat buangan limbah cair yang sebagian dari para pelaku usaha belum mengelola limbahnya dengan baik, begitu juga pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya.

3) Penurunan Luas Kerusakan Lahan

Tahun 2016 dilaksanakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau berupa pengadaan pupuk kompos dengan spesifikasi teknis: pupuk kompos hasil pengolahan sampah bahan - bahan organik, mengandung unsur hara N, K, Ca, Mg, P dan S. Sasaran kegiatan yaitu Perumahan Beringin Rindang (RT.06 dan RT.08 Desa Pasir Panjang).

Adapun maksud dan tujuannya adalah :

- a. Guna mendukung sosialisasi pola hidup bersih dan sehat serta mempertahankan kota Pangkalan Bun sebagai kota adipura.
- b. Salah satu upaya pencegahan terjadinya pemanasan global, banjir dan longsor.
- c. Edukasi kepada masyarakat akan manfaat pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik mandiri yang secara tidak langsung dapat mendukung program ketahanan pangan dan penghijauan di lingkungan masyarakat tersebut.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 12 (dua belas) Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 126.139,21 m² dengan prosentase dari luas RTH perkotaan sebesar 13,25 % dan prosentase luar RTH administrasi kota sebesar 22,13 %. Sedangkan luas hutan kota sebesar 787,75 Ha atau 7,3 % dari luas Kabupaten Kotawaringin Barat.

4) Pengelolaan Persampahan.

Pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas area 30 Ha, pada saat ini menggunakan system Sanitary Landfill. TPA dilengkapi fasilitas fisik pendukung berupa kantor, mushola, rumah tinggal penjaga, sarana MCK, garasi alat berat, tempat pencucian dump truck sampah, rumah timbang, pos jaga, garasi mobil, sumur pantau dan kolam lindi. Jarak TPA dengan permukiman terdekat adalah 2 Km, jarak TPA dengan sungai atau badan air terdekat 5,2 Km dan jarak TPA dengan pantai 40 Km.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA digunakan alat angkut berupa dump truck dan pick up dengan ritasi 2 kali/hari. Jumlah dump truck dan pick up yang beroperasi per hari sebanyak 14 unit dengan kapasitas 8 m³ sebanyak 8 Unit, 6 m³ sebanyak 2 Unit dan kapasitas 3 m³ sebanyak 4 unit. Pengangkutan menggunakan dump truck melayani wilayah kota Pangkalan Bun dan Kumai. Khusus gerobak sampah dioperasikan pada masing-masing RT lingkungan permukiman, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dengan membentuk lembaga pengelola sampah dan menunjuk petugas untuk mengoperasikan pengambilan sampah dari setiap lingkungan.

Cakupan pelayanan di TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sampah yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas area pelayanan tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 1.186 km². Sampah yang diperbolehkan dibuang di TPA Sampah adalah sampah rumah tangga (sampah padat yang berasal dari aktifitas rumah tangga) dan sampah sejenis rumah tangga (sampah padat yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas komersial). Tahun 2016 jumlah sampah yang masuk ke TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 269.935 m³/tahun dari total timbulan 334.080 m³/tahun atau 80,80 %. Untuk retribusi kebersihan tahun 2016 realisasi sebesar Rp. 80.542.000 atau 134,24 % dari target sebesar Rp. 60.000.000.

Guna mendukung terjalannya pengelolaan sampah yang baik dari sumber

sampai dengan proses akhir, ketersediaan sarana dan prasarana dari pemerintah sangat diperlukan disamping swadaya dari masyarakat. Oleh karena itu pengadaan kotak sampah akan dilakukan setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada fasilitas umum seperti Rukun Tetangga (RT), Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar dan Rumah Ibadah. Diharapkan dengan adanya ketersediaan kotak sampah dapat mencegah pencemaran sampah dan dapat mengurangi vektor penyakit yang di akibatkan tumpukan sampah.

Tabel 2.36
Jumlah Tempat Sampah Tahun 2011 s/d 2016

No.	Tahun	Spesifikasi	Jumlah kotak sampah	Jumlah Total	Volume sampah tertampung
1.	2011	HDPE, 0.24 m3	282	282	67.68 m3
2.	2012	HDPE, 0.24 m3	110	392	94.08 m3
3.	2013	HDPE, 0.24 m3	137	529	126.96 m3
4.	2014	HDPE, 0.12 m3	210	739	134,16 m3
5.	2014	HDPE, 0.24 m3	90	829	155,76 m3
6.	2014	HDPE, 0.66 m3	40	869	182,16 m3
7.	2015	HDPE, 0.12 m3	180	1049	203,76 m3
8.	2015	HDPE, 0.24 m3	70	1119	220,56 m3
9.	2016	HDPE, 0.12 m3	120	1239	234,96 m3
10.	2016	HDPE, 0.24 m3	40	1279	244,56 m3

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

Dari tabel dapat dilihat jumlah kapasitas timbulan sampah yang dapat tertampung dari total sarana kotak sampah sampai pada tahun 2016 adalah 244,56 m3.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bina Marga

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Adapun hasilyang dicapai pada tahun 2016 diantaranya :

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 16,26 km berupa peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran badan jalan, Pembangunan Jembatan 38 buah, Peningkatan Jalan sepanjang 67,75 km (peningkatan struktur jalan), Pemeliharaan jalan sepanjang 1,39 Km dan swakelola sepanjang 307,07 km, pemeliharaan jembatan 17 buah, serta tersusunnya data base jalan dan data base jembatan Tahun 2016;
- b. Terbukanya daerah terisolir, program sampai saat ini daerah pesisir Kubu-Sungai Bakau - Teluk Bogam - Keraya - Sebuai telah fungsional dan pada

- tahun 2016 melalui dana DAK dilakukan peningkatan struktur jalan berupa aspal di ruas jalan Kubu-Sungai Bakau-Teluk Bogam, serta pembangunan Jembatan Type Box Culvert sebanyak 2 (buah) pada ruas Teluk Bogam-Keraya-Sebuai Timur –Sebuai- Batas Tanjung Putri ;
- Terbukanya jalan lingkaran selatan meliputi Pangkalan Bun-Kumpai Batu-Tanjung Putri-Sebuai;
 - Terbukanya jalan lingkaran dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Kalimantan yang menghubungkan daerah luar melalui pelabuhan Tanjung Kalap-Pelabuhan Ro-Ro Panglima Utar, diantaranya lanjutan pembangunan Jembatan Sungai Kakap Tahap II berupa pemancangan tiang pancang dan *abutment*. Pada tahun 2017 ini dilanjutkan pembangunan Sungai Kakap tahap III serta pembangunan Sungai Nyirih tahap I berupa pemancangan tiang pancang dan pembangunan Jembatan Sungai Nyirih Tahap II;
 - Terbukanya jalan menuju lokasi Bandara Baru di Sebui berupa perbaikan tanah dengan pelebaran, penimbunan dan pemasangan bronjong pada ruas jalan tersebut;
 - Terbukanya jalan menuju *hinterland* Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Sukamara, Lamandau dan Manis Mata (Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) melalui pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin dengan penimbunan geotextile dan peningkatan struktur jalan berupa aspal;
 - Peningkatan skala pelayanan kota dengan peningkatan jalan kota Pangkalan Bun seperti jalan DAK Hamzah dan peningkatan jalan dalam kota Kumai seperti Jalan Pemuda dan jalan Kumai Hilir – Sungai Kapitan;

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.37
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Statusnya Tahun 2014 – 2016

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	148,66	6,02	156,96	6,36	156,96	6,36
2	Jalan Prov.	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan Kab.	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51
4	Jalan desa	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat2016

Tabel. 2.38
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2014 – 2016

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Aspal	1.018,41	41,24	1.022,36	41,40	1.039,46	42,09
2	Jalan Batu/kerikil	102,38	4,15	100,65	4,08	92,03	3,73
3	Jalan Tanah	1.098,68	44,49	1082,92	43,85	1.074,44	43,5
4	Tidak dirinci :						
	) Beton	125	5,06	137,81	5,58	137,81	5,58
	) Titian	29,11	1,18	29,85	1,21	29,85	1,21
	) Lainnya	96,16	3,89	96,16	3,89	96,16	3,89
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat 2016

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 adalah 2.469,75 Km. Untuk jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2016 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan struktur dan kemantapan jalan.

Tabel. 2.39
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Baik	846,07	34,26	890,50	36,06	897,27	36,33
2	Jalan Sedang	784,19	31,75	761,46	30,83	772,31	31,27
3	Jalan Rusak Ringan	620,51	25,12	608	24,62	610,18	24,71
4	Jalan Rusak Berat	218,98	8,87	209,79	8,49	189,99	7,69
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat 2016

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan menurut kondisinya sebagai berikut : Jalan kondisi baik meningkat sebesar 0,27 %, jalan kondisi sedang mengalami kenaikan sebesar 0,44 %, jalan rusak ringan mengalami kenaikan 0,09 %, jalan rusak berat mengalami penurunan 0,8 %.

Tabel. 2.40
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-
5	Kelas III B	212,36	8,60	212,36	8,60	212,36	8,60
6	Kelas III C	456,12	18,47	465,90	18,86	465,90	18,86
7	Kelas Tidak dirinci	1.81,27	72,93	1.791,49	72,54	1.791,49	72,54
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat 2016

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat dari berikut ini :

Tabel. 2.41
Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Jembatan Baik	141	74,60	148	78,31	149	69,30
2	Jembatan Sedang	30	15,87	26	13,76	23	10,70
3	Jembatan Rusak	16	8,47	14	7,41	35	16,28
4	Jembatan Rusak Berat	2	1,06	1	0,53	8	3,72
Jumlah		189	100	189	100	215	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat 2016

Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Berbagai macam wujud perairan permukaan terdapat di Indonesia, seperti: sungai, danau dan rawa. Semua wujud perairan permukaan mempunyai manfaat, seperti untuk irigasi, pelayaran, perikanan, pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, objek wisata serta digunakan untuk air baku guna mencukupi kebutuhan air minum. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air.

Pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi dan daerah rawa bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Pada tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air telah dilaksanakan pembuatan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 32.110 m, peningkatan saluran dengan pasangan batu sepanjang 1.836 m. Guna kemudahan akses menuju lahan pertanian dibuat jembatan layanan sebanyak 17 buah dan peningkatan jalan inspeksi dengan timbunan sepanjang 12.722 m. Untuk pemeliharaan sistem irigasi yang telah dibangun dilaksanakan dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan melaksanakan rehab saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 10.900 m dan dengan melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 151.100 m. Agar terpenuhinya fungsi bangunan air sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan pintu air. Adapun pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembuatan dan rehabilitasi pintu air sebanyak 10 buah. Capaian indikator kinerja rasio jaringan irigasi pada tahun 2015 sebesar 102,74% mengalami penurunan sebesar 14,13% sehingga rasio jaringan irigasi ditahun 2016 menjadi 88,61%. Hal itu disebabkan bertambahnya areal irigasi/rawa yang belum diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasaran sistim irigasi/rawa.

Tabel 2.42
Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2015-2016

Indikator	2015		2016		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Rasio Jaringan Irigasi	0,73	0,75	0,79	0,70	88,61

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat 2016

Pengelolaan sumber daya air dalam upaya untuk pengendalian banjir dilaksanakan dalam kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, normalisasi/pemeliharaan saluran sungai. Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai bertujuan untuk mengurangi titik-titik daerah banjir baik dari hujan lokal maupun sungai yang melintas di dalam kota. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan saluran induk pengendali banjir dengan pasangan batu sepanjang

450 m dan dengan cor beton saluran induk pengendali banjir sepanjang 486 m. Untuk pemeliharaan saluran induk dilaksanakan normalisasi saluran induk pengendali banjir sepanjang 12.270 m dan pemeliharaan saluran induk pengendali banjir 23.250m. Kegiatan normalisasi/pemeliharaan saluran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan membentuk profil sungai. Adapun pada tahun 2016 telah dilaksanakan normalisasi saluran sungai sepanjang 11.850 m. Untuk pemeliharaan sungai telah dilaksanakan sepanjang 53.490 m.

Dalam upaya mengendalikan tingkat abrasi pantai dan erosi tebing sungai pada daerah pantai dan sungai dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai dan pembangunan turap/talud/bronjong. Pembangunan prasarana pengaman pantai sendiri mempunyai tujuan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi dengan membangun bangunan pemecah ombak (*breakwater*) dan *groin*. Pada tahun 2016 telah dibangun bangunan pemecah ombak sepanjang 234 m. Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong bertujuan untuk mencegah erosi dan longsor, konstruksi yang dibangun berupa pasangan batu sepanjang 780 m.

Untuk menjaga ketersediaan air baku guna mencukupi kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat dan sebagai konservasi air telah dilaksanakan kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya pada tahun 2016 ini, dan telah dibangun embung sebanyak 4 buah meliputi Desa Kubu Kecamatan Kumai, Desa Arga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada dan kolam retensi di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai.

Bidang Cipta Karya

Air Limbah

Pengolahan air limbah pemukiman secara umum di kabupaten kotawaringin barat ditangani melalui sistem setempat (on-site) ataupun sistem terpusat (off site). Air limbah domestik secara umum diolah secara on site dengan menggunakan tangki septik. Untuk daerah pemukiman yang berada disekitar bantaran sungai air limbah yang dihasilkan langsung ke sungai.

Tabel 2.43
Jumlah Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Tahun				Total Infrastruktur 2013 – 2016
		2013	2014	2015	2016	
1.	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	-	1	-	-	1 Unit
2.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	-	-	-	1	1 Unit
3.	MCK Komunal	3	2	-	3	8 Unit
4.	Sambungan Rumah (SR) IPAL	-	1	-	-	1 Pkt

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat 2016

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum telah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah di 2 (dua) kecamatan yaitu Arut Selatan dan Kumai, masing-masing 1 Unit IPLT, 1 Paket SR IPAL Kecamatan Arut Selatan dan 2 Unit MCK Komunal di Kecamatan Kumai yang merupakan area beresiko tinggi sanitasi dengan tujuan agar kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Pada tahun 2015, kegiatan yang mendukung sistem pengolahan air limbah tidak terealisasi sehubungan dengan rasionalisasi anggaran. Pada tahun 2016 telah direalisasikan pembangunan 1 Unit IPAL di Kecamatan Kumai, 2 Unit MCK di Kecamatan Kumai dan 1 Unit MCK di Kecamatan Arut Selatan.

Drainase

Sistem drainase kabupaten kotawaringin barat sebagian besar berada di sepanjang jaringan jalan utama dan kawasan permukiman. Sedangkan di daerah yang berada diluar pusat kota sebagian besar masih berupa jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa saluran tanah dan masih mengandalkan sistem gravitasi. Potensi gerusan tanah oleh air atau erosi sangat besar terutama di daerah yang mempunyai kemiringan lereng sedang sampai dengan tinggi. Daerah yang berbukit dan banyaknya daerah-daerah cekungan merupakan kendala di dalam mengatasi aliran air sehingga masih banyak daerah-daerah yang tergenang air atau banjir pada saat turun hujan deras.

Dengan intensitas curah hujan yang besar dan ketersediaan drainase relatif kecil maka rawan terjadinya luapan air akibat daya tampung saluran yang kurang mencukupi. Dalam masterplan drainase yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat semua sistem saluran drainase bermuara di Sungai Arut, Sungai Buun, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau.

Tabel 2.44
Capaian Pembangunan Drainase Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Panjang Drainase (m)	Rasio Pembangunan (%)
1.	2014	34.337	20
2.	2015	25.493	15
3.	2016	8.500	5

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat .2016

Dari tabel di atas dapat dilihat rasio pembangunan saluran drainase dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dikarenakan rasionalisasi anggaran. Total panjang saluran drainase terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2016 sebesar 168.233 m, tersebar di 6 kecamatan.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Program urusan tata ruang adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pendukungnya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015 – 2016

Indikator	2015		2016		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Target
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,082	0,14	0,096	68,57

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat 2016

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 antara lain dapat dilihat pada Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, yang menunjukkan adanya kenaikan dari yang semula sebesar 0,082 pada tahun 2015 menjadi 0,096 pada tahun 2016. Meskipun menunjukkan kenaikan namun apabila dilihat dari capaiannya di tahun 2016 yang hanya sebesar 68,57 % mengindikasikan bahwa sebagian besar bangunan yang ada di

Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum dilengkapi dengan IMB. Hal ini disebabkan karena :

- a. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mendirikan bangunan sangat rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait;
- c. Kurang tegasnya instansi terkait dalam memberikan teguran dan sanksi terhadap pelanggaran;
- d. Prosedur perizinan di birokrasi masih rumit sehingga masyarakat enggan untuk mengurusnya.

Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten mengingat IMB merupakan salah satu penyumbang potensial dalam penerimaan PAD.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai dokumen perencanaan yang terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2016 dan berakhir di tahun ini.

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 tahun serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016

No.	Indikator	2015	2016		
			Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	1	1	100
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	1	1	100
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	1	1	100
4.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	ada	156	156	100

Sumber : Bappeda Kab. Kotawaringin Barat 2016

Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2016 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan baik, yang merupakan suatu rangkaian implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah;
- c. Terlaksananya penerapan Sisrenbangda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan hasil dari tahapan perencanaan “bottom up” dan “partisipatif” yang dilaksanakan selama ini, dengan penganggaran dan evaluasi. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan akan dapat lebih menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- d. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan antar satker/ sektor bidang sarana prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
- e. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016;
- f. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015;
- g. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se-Kalimantan Tengah Tahun 2016 yang diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. URUSAN PERUMAHAN

Rumah (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Berbagai kondisi fasilitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air minum, jamban dan lain-lain merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan untuk mengamati tingkat kesejahteraan rakyat. Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat sepatutnya memiliki tempat buang air besar. Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 3,01 % rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Walaupun jumlahnya kecil namun hal tersebut masih harus menjadi perhatian pemerintah, karena fasilitas pembuangan air besar mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang bersangkutan.

Fasilitas pembuangan air besar yang paling dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah fasilitas pembuangan air besar yang digunakan sendiri oleh tiap-tiap rumah tangga yaitu 78,34 %. sementara untuk fasilitas yang digunakan bersama-sama dan umum cukup kecil yaitu 11,12 % dan 7,53%. Jika dibandingkan dengan terget RPJMD 2016 tentang persentase rumah tangga yang bersanitasi, maka kondisi Kotawaringin Barat untuk tahun 2016 ini belum mencapai target yang diinginkan. Dimana target yang dipatok adalah sebesar 97,79% dan kondisi Kotawaringin Barat saat ini adalah 77,96%.

Selain dari segi penggunaan fasilitas pembuangan air besar, sanitasi yang baik juga harus ditinjau dari indikator mengenai penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah. Penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah akan mencegah limbah yang dibuang oleh rumah tangga merusak lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan.

Kabupaten Kotawaringin Barat dilalui beberapa sungai besar, antara lain Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan Sungai Kumai. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebiasaan masyarakat khususnya terhadap pemilikan septik tank. Pada 2016, baru 77,96 % rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir limbah (tinja), sungai/danau/laut 10,25 %, lubang tanah 8,92 % dan pantai/tanah lapang/kebun 2,87 %. Dari kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama yang tinggal di daerah sempadan sungai dan di pedesaan masih perlu diberikan penyuluhan tentang budaya pentingnya fasilitas tempat buang air besar, mengingat sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Didasari pentingnya fungsi air ini, maka salah satu perhatian pemerintah adalah penyediaan fasilitas air bersih. Sumber air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari air ledeng (berlangganan PDAM), air sumur gali, air sumur bor, air sungai, mata air, mata air tak terlindung dan air hujan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum menjadi hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri. Rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak memiliki fasilitas air minum yaitu sekitar 1,86 %. sementara rumah tangga dengan fasilitas air minum sendiri memiliki persentase paling besar yaitu 51,91 %. Hal tersebut menggambarkan kondisi yang cukup baik dimana setiap rumah tangga, sekitar 98,14 % sudah memiliki fasilitas air minum.

Sebagian besar sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah air isi ulang yaitu sebesar 34,5 % dan sumur terlindung sebesar 24,5 %. Sementara sumber air minum yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kotawaringin Barat adalah air hujan yang hanya sebesar 0,74 %.

Penduduk Kotawaringin Barat yang tinggal di daerah bantaran sungai sudah mulai meninggalkan penggunaan air sungai sebagai sumber air minum dan beralih ke penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan PDAM mengakibatkan masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air yang diduga kurang bersih, seperti air sungai, air hujan, sumur gali (jika tercemar), dan mata air tak terlindung.

Begitu pula dengan air minum, sebagian warga memilih menggunakan air minum isi ulang yang mungkin kebersihannya kurang terjaga, dengan alasan harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan air isi ulang bermerek. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu indikator dalam urusan perumahan ini juga yaitu mengenai rasio tempat pemakaman umum. Luas pemakaman di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 445.170 m² dengan rincian Luas Tempat Pemakaman Umum 374.170 m², Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum 26.00 m², Luas Tempat Pemakaman Khusus 25.000 m² dan Luas Taman Makam Pahlawan 20.000 m². Daya tampung tempat pemakaman sebanyak 144.681 Unit dengan rincian Tempat Pemakaman Umum 121.606 Unit, Tempat Pemakaman Bukan Umum

8.450 unit, Tempat Pemakaman Khusus 8.125 unit dan Taman Makam Pahlawan 6.500 Unit.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2015 - 2016

No.	Indikator	2015		2016		
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	% Terhadap Target
1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	23	70,55	25	72	282,20
2.	Rumah Tangga Bersanitasi	96,78	75,49	97,79	77,96	79,73
3.	Rumah Layak Huni	64	64	65	65	100
4.	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	77,18	77,18	77,18	77,18	100
5.	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	6,2	2,2	7,5	1,26	16,80

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat2016.

Pada tahun 2016 sebagaimana tabel diatas menunjukkan gambaran yaitu indikator rumah tangga pengguna air bersih dimana pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan 1,45 %. Untuk rumah tangga bersanitasi dalam dua tahun terakhir belum mencapai target maksimal dengan persentase capaian di tahun 2016 hanya sebesar 79,73 %. Sedangkan indikator lainnya yaitu rasio rumah layak huni dan rasio tempat pemakaman umum tidak mengalami perubahan sesuai capaian 100 % dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Adapun indikator rasio tempat pembuangan sampah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 0,94 %.

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang kepemudaan dan olahraga diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2015 – 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	%
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional		12	14	14	100
	a. POPNAS	Peringkat	4	10	7	70
	b. POSPENAS	Peringkat	3	5	3	60
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	105	235	235	100
3.	Jumlah organisasi olah raga	buah	77	62	124	200
4.	Gedung olah raga/balai remaja (selain milik swasta)	buah	7	8	8	100
5.	Lapangan olahraga	buah	150	150	150	100

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 2016

Kegiatan kepemudaan dan olah raga diukur dengan jumlah organisasi pemuda, jumlah grup olah raga, serta ketersediaan gedung dan lapangan olah raga sebagai wadah bagi warga untuk beraktifitas. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 8 buah gedung olah raga, 150 buah lapangan olah raga, 124 klub olah raga dan 235 buah organisasi pemuda. Lapangan olah raga yang dimaksud disini adalah jumlah seluruh lapangan olah raga yang ada di suatu kecamatan, termasuk lapangan milik sekolah. Klub olah raga yang terdapat di tiap kecamatan umumnya adalah klub sepak bola, bola voli, catur, karate, pencak silat, futsal, renang dan bulutangkis.

Sedangkan organisasi kepemudaan adalah organisasi Karang Taruna, yang diasumsikan terdapat di setiap desa dan kelurahan. Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan penanaman modal di Kab. Kotawaringin Barat menyimpan beberapa peluang seperti spesifikasi keunggulan lokal Kab. Kotawaringin Barat di bidang pariwisata dan budaya, komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal Kab. Kotawaringin Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di Kab.

Kotawaringin Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan), regulasi yang mantap dalam fasilitasi investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian, masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah. Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Selain itu juga masih belum disahkannya RTRW Provinsi dan Kabupaten juga menjadi kendala utama dalam upaya menarik investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	2016		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal (PMDN/PMA)	Milyar (Rp)	306,6	637,9	208,1
2	Rasio Realisasi PMDN	%	63 (Rp 93,1 milyar)	72 (Rp 459,1 milyar)	114

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat 2016

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 menegaskan bahwakoperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Kotawaringin Barat mengimplementasikannya dengan memberikan porsi yang besar untuk Koperasi dan UMKM agar dapat maju dan berkembang.

Hal ini terlihat dengan antusiasnya permohonan pembuatan Badan Hukum Koperasi baru, Perkembangan usaha dan jumlah anggota Koperasi yang semakin meningkat, dan semakin besarnya SHU (sisa hasil usaha), serta terus

bertambahnya jumlah UMKM. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 254 buah koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang jenisnya meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Petani Plasma, Koperasi Nelayan, Koperasi Pegawai, Koperasi Guru, dan lain sebagainya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015.

Tabel 2.50
Jumlah Koperasi dan Statusnya
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Koperasi	Tahun 2015 (unit)	Tahun 2016 (unit)	+/(-)
1.	Aktif	206	213	7
2.	Tidak Aktif	48	48	-
3.	Primer	254	261	7
4.	KUD	25	25	-
5.	Non KUD	229	236	7

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2016

Berangkat dari perkembangan Koperasi dan UMKM yang semakin baik dan pengaruh signifikannya pada roda perekonomian masyarakat, tentu menjadi hal yang membanggakan dan menjadikan motivasi segenap stakholder untuk terus menciptakan iklim serta progres pencapaian maksimal. Sedangkan untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Jenis UMKM	Tahun 2015 (unit)	Tahun 2016 (unit)	+/(-)
1.	Aneka Jasa	1738	1738	-
2.	Perdagangan	5046	5046	-
3.	Industri Pertanian	1613	1613	-
4.	Industri Non Pertanian	1394	1394	-
5.	Pertanian	1558	1558	-
	Jumlah	11.349	11.349	-

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, 2016

Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan dalam menampung bertambahnya penggunaan tenaga kerja.

Selanjutnya peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.52
Penilaian Kondisi KSP/ USP
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Koperasi	Tahun 2015 (unit)	Tahun 2016 (unit)	+/(–)
1.	Sehat	49	51	2
2.	Cukup Sehat	37	42	5
3.	Kurang Sehat	16	14	-2
4.	Tidak Sehat	1	1	0
5	Jumlah	103	108	5

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, 2016

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Informasi administrasi kependudukan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan di sektor-sektor yang lain, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mensukseskan program elektronik KTP (KTP-el), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Berikut ini dapat disampaikan mengenai perkembangan capaian indikator kinerja utama bidang kependudukan.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2016 berjumlah **89.870** Kepala Keluarga = (**99.783**) jiwa.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator	Realisasi Tahun 2015	s/d Tahun 2016		%
		Target	Realisasi	
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	91,95	-	100	
Kepemilikan Kartu Keluarga Nasional	88.082	115.000	89.870	78,37
Kepemilikan KTP Nasional	-			
Perekaman KTP-el	172.604	191.774	158.546	82,67
Kepemilikan KTP-el	172.604	191.774	158.546	82,67
Penduduk Pindah dari Kabupaten Kotawaringin Barat ke luar Daerah	8.789	-	4.589	
Penduduk datang dari luar Daerah ke Kabupaten Kotawaringin Barat	8.121	-	4.868	

Indikator	Realisasi Tahun 2015	s/d Tahun 2016		%
		Target	Realisasi	
Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil :				
)KepemilikanAkta Kelahiran	165.327	269.872	171.896	63,70
)Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim)	1.664	1.500	1.431	95,40
)Kepemilikan Akta Kematian	1.437	-	1.801	
)Kepemilikan Akta Perceraian (Non Muslim)	42	-	44	
)Kepemilikan Akta Perubahan Nama	17	-	41	
)Kepemilikan Akta Pengesahan anak	19	-	47	
)Kepemilikan Akta Pengangkatan anak	3	-	6	
)Kepemilikan Akta Perubahan Kewarganegaraan	1	-	0	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Ktw. Barat 2016

Keterangan :

1. Tingkat Kepemilikan KK Nasional masih rendah karena belum semua desa terjangkau pelayanan;
2. Kepemilikan dan perekaman KTP-el mengalami penurunan kerana adanya konsolidasi data dengan pusat/penghapusan terhadap identitas penduduk yang ganda;
3. Kepemilikan akta kelahiran masih rendah karena untuk akta yang terbit sebelum adanya aplikasi SIAK belum terdata dalam data SIAK serta pelayanan belum mampu menjangkau semua desa;
4. Akta perkawinan belum mencapai target karena belum adanya kesadaran kesadaran warga melaporkan perkawinan terutama di desa-desa.

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar 69% berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengalami penurunan dari 70,75 % menjadi 67,13 %.

Tabel. 2.54
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373	202.545	209.717
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864	145.749	155.605
3.	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	133.222	141.011	150.689
4.	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642	4.738	4.916
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,75 %	67,13 %	70,05%	71,96%	74,19%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,36	3,68	2,66	3,25	3,16
7.	Tingkat Kesempatan Kerja	97,64	96,32	97,33	96,75	96,84
8.	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509	56.796	54.112
9.	Sekolah	11.158	15.141	17.465	18.135	18.981
10.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598	33.405	29.336
11.	Lainnya	3.421	5.886	5.446	5.256	5.765

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2016

TPAK dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi dimulai dari 2012 sebesar 70,75%, untuk kemudian menurun di tahun 2013 sebesar 67,13%, sedangkan trend dari 2014-2016 TPAK Kabupaten Kotawaringin Barat naik dari 70,05% di tahun 2014, TPAK 2015 sebesar 71,96% dan kenaikan paling banyak di Tahun 2016 sebesar 74,19%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja (penduduk yang berusia diatas 15 tahun), semakin banyak jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan menganggur), maka akan besar pula TPAK, hal yang sama juga berlaku untuk sebaliknya.

Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai 2016 fluktuatif (naik turun). Untuk tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,36%, sedangkan untuk 2013 TPT sebesar 3,68%, 2014 TPT sebesar 2,66 % dan naik sebesar 3,25% untuk tahun 2015 dan turun menjadi 3,16 % untuk tahun 2016.

Berbagai faktor yang turut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, diantaranya kenaikan jumlah penduduk usia kerja dan faktor perekonomian,

terutama kaitannya dengan pengurangan tenaga kerja di perusahaan perkebunan, karena menurunnya harga komoditas perkebunan.

Tabel. 2.55
Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2013 – 2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Upah Minimum Regional (UMK) /Rp.	1.538.244	1.789.066	2.003.745	2.391.470
Kondisi Pasar Kerja					
2.	Pendaftaran	2.063	2.379	2.669	876
3.	Permintaan	367	522	346	177
4.	Pengiriman	261	510	210	92
5.	Penempatan	207	510	176	78

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2016

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya %tase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 96,84 % untuk tahun 2016. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,25 % di tahun 2015 menjadi 3,16 % di tahun 2016. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2 % pada tahun 2016 dapat tercapai.

Indikator kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat terlihat dari tabel 2.57 di bawah ini :

Tabel. 2.56
Capaian Indikator Kinerja Ketenagakerjaan
Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2016

Urusan	Indikator Kinerja Kunci (Ikk)	Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
Ketenaga kerjaan	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja buruh	$\frac{\text{Jlh pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif (42.698)}}{\text{Jlh pekerja/buruh (47.350)}} \times 100 \%$	90,18 %
	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (78)}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar (876)}} \times 100 \%$	8,90. %

Sumber : Dinas Nakertrans

Dari Tabel 2.57 terlihat bahwa untuk capaian dalam bidang ketenagakerjaan pelayanan kepersertaan jamsostek bagi pekerja buruh, terlihat bahwa jumlah buruh di Kab. Kotawaringin Barat yang mengikuti program jamsostek, sebesar 90,18 %.

Sedangkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan (data dari pengurusan kartu A.K.1/ pencari kerja yang tercatat). Dari 876 pencari kerja yang terdaftar, yang ditempatkan hanya 78 orang atau hanya 8,90 %.

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya %tase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 96,84 % untuk tahun 2016. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,25 % di tahun 2015 menjadi 3,16 % di tahun 2016. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2 % pada tahun 2016 dapat tercapai.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterjangkauan dan konsumsi pangan. Ketersediaan mengandung arti ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor dan stok masyarakat. Distribusi pangan mengandung arti pangan tersedia bagi setiap rumah tangga sepanjang waktu dan di mana saja.

Keterjangkauan mengandung arti kemampuan fisik akses terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis. Sedangkan konsumsi pangan mengandung arti penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang, sehat, aman. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2012-2016, ketahanan pangan merupakan salah satu program yang

menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang dibangun dari peningkatan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sangatlah kompleks dan multi disiplin, sehingga menuntut peran serta pemerintah, masyarakat, dan segenap pemangku kepentingan.

Keberhasilan ketahanan pangan di suatu wilayah menjadi tolok ukur dan sumbangan bagi keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkuat perwujudan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastrea/beras untuk keluarga sejahtera) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat

kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Rastra.

Keberhasilan Program Rastra ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Rastra Pusat. Pelaksanaan penyaluran Rastra oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Rastra dari Titik Distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari Titik Distribusi (TD) sampai ke RTS.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sasaran program Rastra tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kumai. Dengan jumlah RTS sebanyak 7.421 RTS, dengan harga Rp. 1.600 per kg netto di TD (titik distribusi).

Produksi padi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 22.178,04 ton. Produksi Padi tersebut bila dikonversi dalam bentuk beras dengan asumsi 1 kg padi menghasilkan 0,63 kg beras, maka produksi beras Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 14.016,54ton. Dibandingkan dengan kebutuhan, maka produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan asumsi kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 121,76 kg dan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 286.699 jiwa (naik 3 % dari tahun 2015 sebesar 298.338 jiwa) maka kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 34.908,47 ton, masih kekurangan sebesar 20.891,93 (59,84 %). Upaya menekan defisit beras tersebut dengan peningkatan produksi tentunya menjadi pilihan utama.

Peningkatan produksi ini diupayakan melalui peningkatan luas areal tanam dan panen, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas tanaman. Disamping itu juga perlu ada gerakan, kampanye maupun sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dan substitusi pangan beras menjadi pangan non-beras seperti jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Ketiga komoditi ini sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian luas panen dan produksi jagung Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 1207 ha dan 4.771,01 ton, luas

panen dan produksi ubi jalar sebesar 85 ha dan 780,54 ton, sedangkan luas panen dan produksi ubi kayu mencapai 358 ha dan 5.375,99 ton..

Produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 mencapai 2.192,27 ton, yang berasal dari daging sapi sebesar 625,86 ton, daging kambing/domba sebesar 10,04 ton, daging babi sebesar 86,53 ton dan daging unggas sebesar 1.469,84 ton. Berdasarkan angka produksi daging, apabila dikaitkan dengan kebutuhannya sebesar 6.278,71 ton (kebutuhan daging per kapita per tahun sebesar 21,90 kg), maka produksi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Apabila kebutuhan daging hanya dipenuhi dari daging sapi maka kekurangan daging tahun 2016 relatif besar yaitu sebesar 5.652,85 ton. Apabila kebutuhan daging tersebut disubstitusi dari ternak lainnya maka kekurangan dagingnya akan lebih kecil. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging, salah satunya dengan penggalakan kegiatan pengembangan peternakan sapi yang diintegrasikan dengan kebun kelapa sawit.

Dari kebun kelapa sawit dapat diambil daun dan limbah solidnya sebagai pakan sapi, sedangkan dari sapi bisa dihasilkan tenaga untuk mengangkut hasil sawit serta kotoran sapi bisa digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit. Beberapa perusahaan perkebunan besar dan kelompok tani telah merintis program integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi.

Kebutuhan telur sebagai sumber protein bagi masyarakat dapat dipenuhi dari telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik. Pada 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terdapat tiga pengusaha / investor yang mengembangkan peternakan ayam ras petelur, sehingga terdapat populasi ternak sebesar 50.794 ekor dengan produksi telur mencapai 466,88 ton.

Untuk telur ayam bukan ras dan telur itik dalam skala kecil sudah diusahakan sendiri oleh peternak di daerah. Produksi telur ayam buras dan itik di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 mencapai 491,07 ton. Dengan asumsi kebutuhan telur per kapita per tahun sebesar 7,30 kg, maka kebutuhan produksi telur mencapai 2.092,91 ton. Sehingga produksi telur yang dihasilkan di daerah (957,95 ton) belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya memenuhi kebutuhan telur tersebut, perlu menarik investor agar menanamkan investasi dalam bidang peternakan baik dalam budidaya maupun penyediaan sarana dan prasarannya seperti pembibitan, penyediaan pakan maupun usaha pengolahan dan pemasarannya. Selain daging dan telur, ikan juga merupakan salah satu sumber pangan hewani yang kaya akan protein.

Ikan dapat diperoleh dari penangkapan maupun budidaya. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 156 km sehingga potensi penangkapan ikan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga terdapat sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya.

Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Produksi perikanan pada tahun 2016 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar 14.792,7 ton. Apabila kebutuhan ikan per kapita per tahun sebesar 40,58 kg (Susenas 2012), maka secara total kebutuhan ikan (sebesar 11.634,25 ton) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 286.699 jiwa, sudah terpenuhi, bahkan mengalami surplus sebesar 3.158,45 ton.

Berdasarkan sistem ketersediaan pangan, produksi pangan di daerah berupa beras, daging dan telur, masih terjadi defisit atau tergantung dari luar daerah. Ditinjau dari sistem distribusi pangan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana terdapat pelabuhan dan bandara yang memperlancar arus keluar masuk barang dan penumpang.

Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui pelabuhan “Panglima Utar” di Kecamatan Kumai, yang selanjutnya didistribusikan secara lancar ke kecamatan sampai tingkat desa. Namun, faktor cuaca buruk seringkali menghambat distribusi pangan dari luar pulau. Arus bongkar muat dari Pelabuhan Pangkalan Bun dan Kumai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan barang pangan Kabupaten Kotawaringin Barat melainkan juga untuk kabupaten tetangga seperti Lamandau, Sukamara dan sebagian Seruyan.

Harga barang ditingkat rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif terjangkau sampai diseluruh pelosok wilayah kecamatan dan desa-desa. Terkait dengan stabilitas harga dan pasokan barang, harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal. Pasokan pangan di suatu wilayah masih dinyatakan dalam kondisi stabil jika terjadi penurunan pasokan pangan kurang dari 40%. Umumnya gejolak harga dan pasokan pangan biasa terjadi pada saat menjelang hari besar keagamaan dan cuaca ekstrim, dimana komoditi pangan yang harganya seringkali meningkat (mendorong inflasi) adalah daging ayam, cabe dan bawang merah.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2016 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hanya saja terjadi sedikit peningkatan pada kondisi tertentu yaitu pada saat memasuki bulan Ramadhan atau pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi, dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan, sehingga mobilitas pasokan, baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah, dapat berjalan normal dan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar.

Kemudian terkait dengan kondisi rawan pangan berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada satupun dari desa di wilayah Kotawaringin Barat yang masuk dalam kategori desa rawan pangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan.

Penentuan desa rawan pangan mendasarkan pada tiga indikator, yaitu Kurang Energi dan Protein, Kemiskinan, dan Produksi Pertanian/Pangan. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaman sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 102 orang.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005 – 2025 dan dijabarkan didalam RPJMN 2015 – 2019 dihadapkan pada tiga isu strategis yaitu : (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Oleh sebab itu, isu strategis dalam Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah membangun kualitas manusia yang merupakan sasaran yang dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang

berdaya saing. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin, agar laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan masing-masing sehingga mendapatkan keadilan dan kesetaraan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperlukan, sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan.

IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2014 meningkat dari 69,51 menjadi 70,14 sedangkan IPG Kotawaringin Barat Tahun 2013-2014 meningkat dari 86,67 menjadi 90,04, pada tahun 2014 Kalimantan Tengah tercatat sebagai Propinsi dengan IDG tertinggi dengan capaian 77,90 sedangkan Kotawaringin Barat IDG Tahun 2014 mencapai sebesar 64,48. Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh peningkatan semua komponen IDG terutama peran perempuan dalam parlemen yang naik dari 15,56 % menjadi 26,67 %.

Tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan, pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Berikut ini adalah tabel capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 - 2016

No	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi terhadap target
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	33	53.288	2.398	4,50
4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	1,30	53.288	9.624	18,06
5.	Rasio KDRT	22,22	34	34	100
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	86,01	60	34	56,67

Sumber : BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat 2016

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender masih pada tahap sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi *stakeholder* terkait khususnya bagi aparat perencanaan pada tingkat SKPD.

Selanjutnya guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan *trafficking* telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Jumlah kasus KDRT yang sudah tertangani baik yang berkaitan dengan perempuan maupun anak sampai saat ini mencapai 31 kasus yang tersebar pada 6 Kecamatan.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang tepat dilakukan adalah dengan mengontrol jumlah kelahiran penduduk dan jumlah migrasi. Pengontrolan terhadap jumlah kelahiran dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan

program keluarga berencana (KB). Dengan program ini diharapkan tercipta penduduk dengan jumlah dan kualitas yang ideal bagi pembangunan.

Program KB yang dulu pernah dinyatakan berhasil kini digalakkan kembali dengan mengusung slogan lama, yakni dua anak cukup. Program KB adalah salah satu program penting dalam upaya mencapai keluarga sejahtera yang memiliki sasara untuk mengendalikan lalu pertumbuhan penduduk dengan cara mengendalikan angka kelahiran. Tujuan akhirnya bermuara pada mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Lahirnya program KB terutama dilatarbelakangi tingginya angka kelahiran. Program KB sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan efektif dan berhasil maksimal karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk.

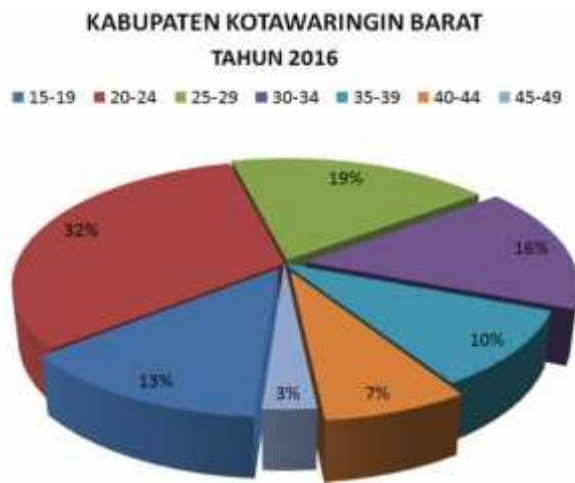
Aspek yang harus dipantau dalam proses pengontrolan terhadap jumlah kelahiran adalah aspek usia perkawinan dan aspek penggunaan alat kontrasepsi. Pada aspek usia perkawinan, yang perlu diperhatikan adalah usia perkawinan dari perempuan. Semakin muda seorang perempuan kawin maka semakin besar pula peluang mereka untuk menghasilkan lebih banyak anak.

Akseptor KB Baru Kabupaten Kotawaringin Barat bulan januari – Desember 2016 sebesar 7.532 atau 72,25% dari target sebesar 10.425 akseptor. Hal ini tidak tercapai karena target di tetapkan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Tengan Terlalu tinggi, tidak sesuai dengan sisa Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru yang belum ber-KB. Sedangkan untuk akseptor KB aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat (angka CPR) adalah sebesar 65% dari Pasangan Usia Subur sebesar 45.852 telah menunjukan CPR Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi dari pada target RPJMN yaitu sebesar 65% Untuk angka TFR Kabupaten Kotawaringin Barat masih Berkisar 2,8 dari target nasional sebesar 2.15

Sementara itu, jika ditilik dari usia dari usia perkawinan pertama untuk perkawinan umur 19 tahun keatas menunjukan kondisi yang cukup baik, ternyata perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung Untuk Menikah Pada umur 15-19 tahun yaitu sebesar 12,99, umur 20-24 tahun = 32,02, umur 25-29 tahun = 18,51, umur 30-34 tahun = 16,35, umur 35-39 tahun = 10,09, umur 40-44 tahun = 7,3. umur 45-47 tahun keatas = 2,73. Akan tetapi perlu di perhatikan juga masih terdapat 4,84% wanita usia kurang dari 15 tahun yang menikah untuk pertama kali. Padahal semakin muda umur saat perkawinan, maka peluang untuk terjadinya kematian ibu dan bayi juga semakin besar di sebabkan masih belum siap dan matangnya si ibu untuk melahirkan anak.

Untuk lebih jelasnya, persentase usia kawin pertama di kabupaten Kotawaringin Barat dapat terlihat seperti diagram dibawah ini :

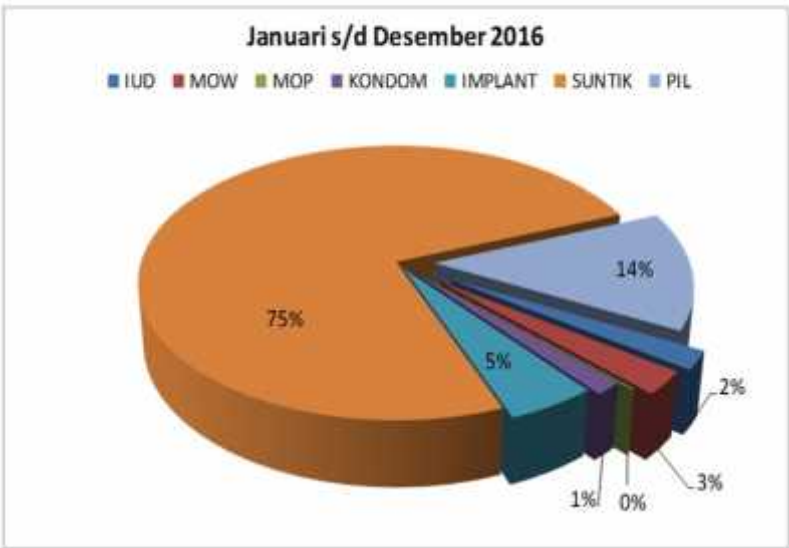
Diagram 2.1
PERSENTASE USIA WANITA KAWIN PERTAMA



Sumber : Hasil Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Dari pelaksanaan Pelayanan KB selama tahun 2016 seperti tersebut diatas maka secara keseluruhan dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2016 dapat disampaikan perolehan peserta KB Baru sebanyak 7.532 Peserta atau 72,25 % dari Target sebesar 10.425 Peserta. Untuk lebih jelasnya Pencapaian KB baru Per Mix Kontrasepsi dapat dilihat seperti dalam diagram di bawah ini :

Diagram 2.2
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016

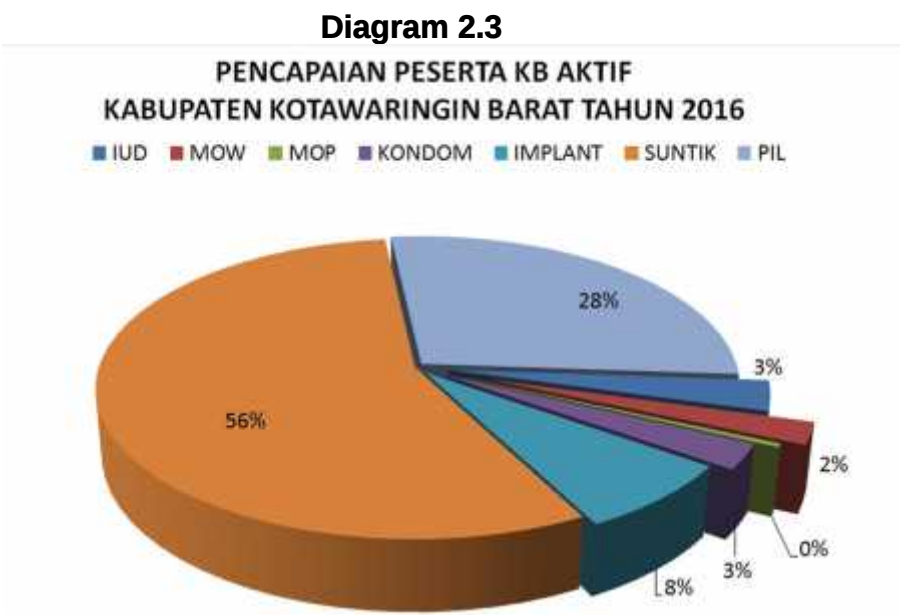


Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan untuk kesertaan KB Aktif sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 32.643 KB aktif atau 96,10 % dari Pasangan Usia Subur sebanyak

45.852. Untuk lebih jelasnya pencapaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sampai dengan Desember Tahun 2016 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Ket : di Kec. Arut Utara tidak ada petugas PKB. Sejak April 2016 petugas PLKB atas nama Suraya, Mansur SH, dan Asmiril SH, ditarik Pemda ke tenaga struktural untuk laporan kesertaan KB aktif Wilayah Arut Utara tidak ada yang melaporkan.



Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Meski demikian, untuk menyukseskan program KB perlu dilakukan sedikit upaya evaluasi untuk dapat menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) jumlah satu keluarga dari 2,8 anak menjadi 2,1 sesuai dengan slogan program KB.pada tahun 2016 2 (dua) Anak Cukup.

Tabel 2.58
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2016**

No	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3	100%
2.	Rasio akseptor KB	84%	80,6	71,19	74.70
3.	Cakupan peserta KB aktif (orang)		34.011	32.643	95,98
4.	Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I	100%	33.951	32.643	96,15
5	Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I		6 %	4.226	9,06
			30,5 %	18.452	39,54
			63,5 %	23.991	51,41

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kobar 2016

Berdasarkan pendataan sampai dengan bulan Desember 2016, jumlah peserta KB aktif sebanyak **33.916 atau 68,41%** dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah **49.578**.

Tabel 2.59
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2015-2016

No	Peserta KB Aktif	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	IUD	638	1.015	159,09	530	1.054	198,9
2	MOP	128	140	109,38	83	134	161,4
3	MOW	1.110	758	68,2	933	762	81,7
4	IMPLANT	1.739	3.175	182,5	2.581	2.463	95,4
5	SUNTIK	21.738	19.175	88,20	20.748	18.261	88
6	PIL	8.399	8.610	102,51	8.449	9.085	107,5
7	KONDOM	515	1.044	202,7	627	884	141
	Jumlah PA	33.916	33.916	98,71	33.951	32.643	96,10
	Jumlah PUS	48.505	48.505		45.852	45.852	100
	% PA/PUS	69,92	69,91	68,40	-	71,19	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kotawaringin Barat 2016

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, karena sektor perhubungan merupakan mata rantai tatanan transportasi nasional, regional dan lokal yang merupakan pendukung dan penggerak mobilitas orang, barang dan jasa dalam menunjang dinamika pembangunan perekonomian.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam membangun sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah, membuka keterisolan suatu wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi oleh sungai, moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah transportasi angkutan darat dan angkutan sungai.

Sedangkan untuk menghubungkan antar pulau dilayani dengan transportasi laut dan udara. Mengingat Kotawaringin Barat merupakan daerah yang sedang berkembang maka semua moda transportasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa indikator pembangunan dibidang perhubungan sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.60
Jumlah Sistem JaringanTransportasi Tahun 2015 – 2016

No	Uraian	Capaian 2015	Tahun 2016 (Akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Jumlah Bandara (Buah)	1	1	1	100
2	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	3	4	4	100
3	Terminal	4	4	4	100
4	Halte	12	12	12	100
5	Jaringan Trayek AKDP	0	0	0	0
6	Jaringan Trayek Perdesaaan	9	9	9	100
7	Dermaga LLASDP	19	22	22	100
8	Trayek LLASDP	4	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2016

Tabel 2.61
Jumlah Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas

No	Uraian	Capaian 2015	Tahun 2016 (Akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Rambu Lalu lintas darat	699	700	700	100
2	APILL	5	5	5	100
3	RPPJ	13	13	13	100
4	Traffic Cone	58	58	58	100
5	Paku Jalan	0	0	0	0
6	Tenda Portable	4	4	4	100
7	Rambu lalu lintas sungai	94	94	94	100
8	Baju Pelampung	166	166	166	100
9	Delinator	45	45	45	100
10	Warning Light	4	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2016

Tabel 2.62
Jumlah Kendaraan Yang di Uji

No	Jenis Kendaraan	Capaian 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1	Mobil Penumpang	114	90	80	100
2	Mobil Bus	225	225	238	100
3	Mobil Barang	6.009	6.009	6.541	100
4	Speed boat	34	67	67	100
5	Kelotok	64	41	41	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2016

Pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun tahun 2015 sebanyak 5.964 sedangkan di tahun 2016 sebanyak 7.109 Artinya, pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami peningkatan sebesar 84 % dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Adapun faktor –faktor yang mengakibatkan pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami peningkatan di sebabkan :

1. Jumlah penumpang yang mengalami peningkatan
2. Bertambahnya armada pesawat. Dari 4 maskapai menjadi 5 maskapai
3. Bertambahnya rute penerbangan pesawat.
4. Adanya pergantian armada kapasitas pesawat kecil menjadi kapasitas pesawat yang lebih besar (boeing)

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami peningkatan sehingga daya angkut penumpang dari 2 (dua) kali penerbangan menjadi 1 (satu) kali penerbangan. Sedangkan Program Pengembangan Bandara Baru tetap dilaksanakan guna percepatan pembangunan bandara baru melalui program peningkatan pelayanan angkutan dan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta study kelayakan bandara baru.

Jalan Khusus Industri

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan besar tersebut. Di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menggunakan jalan umum aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perkebunan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan. Perda ini mengatur Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di ruas jalan umum.

- a. Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
 1. Memiliki muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton;
 2. Memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) m, lebar 2,1 (dua koma satu) m, tinggi 3,5 (tiga koma lima) m;

3. Konvoi kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
- b. Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batu bara, bijih besi dan zirkon;
- c. Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel Oil (PKO)*, *Slab* dan *Lumb*;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
 - a. Hasil hutan;
 - b. Material bangunan;
 - c. Sembilan bahan pokok.

Panjang Jalan Khusus adalah 197,34 Km, yang terdiri dari :

- a. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) dengan panjang 53,41 Km;
- b. Main Road Barat (Rangda–Sei Rangit Jaya) dengan panjang 51,80 Km;
- c. Ruas Semanggang–Pabrik Pulp dengan panjang ruas 18,80 Km;
- d. Jalan penghubung main road timur dan barat yakni :
 1. Ruas Semanggang – Sei rangit Jaya dengan panjang 25,90 Km;
 2. Ruas Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo dengan panjang 8,43 Km;
 3. Ruas Jalan masuk dari Seruyan dengan panjang 39 Km.

Pembangunan Jalan Khusus yang telah dikerjakan oleh PT. Korintiga Hutani dengan rincian sebagai berikut :

- a. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) sepanjang 28,44 Km;
- b. Jalan di Area Konsesi HTI PT. Korintiga Hutani sepanjang 24,97 Km;
- c. Ruas Semanggang – Pabrik Pulp sepanjang 18,80 Km;
- d. Pembangunan 3 buah jembatan pada main road timur (Nanga Mua-Semanggang) dan Ruas Semanggang – Pabrik Pulp, yakni :
 1. Jembatan Sungai Arut 40 m;
 2. Jembatan Sungai Jampau 15 m;
 3. Jembatan Sungai Hijau 15 m.

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan perhubungan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana lalu lintas untuk mendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban berlalu lintas;

- c. Terealisasinya pendapatan retribusi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.450.150.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 1.518.751.000 atau 100,73 %
- d. Secara umum meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pada sektor perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam era globalisasi saat ini, berbagai informasi dapat diakses melalui semua media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Namun perangkat komputer dan situs internet masih belum populer di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer dan penduduk yang mengakses internet. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, persentase penduduk yang mengakses internet masih sangat rendah yaitu hanya 11,23 %, sementara yang tidak mengakses internet sebesar 88,77 %. Oleh sebab itu, agar kebutuhan informasi untuk masyarakat tetap terpenuhi, Bagian Humas Setda Kab. Kotawaringin Barat juga menyediakan informasi Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Offline melalui kerjasama media elektronik dan media cetak, penerbitan media internal berupa tabloid Warta Kobar, Bulletin Marunting Batu Aji, kalender tahunan serta media informasi digital lainnya yang telah di distribusikan ke seluruh kecamatan dan desa di Kab. Kotawaringin Barat.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2016

No.	Indikator	Satuan	2015	2016		
				Target	Realisasi	(%)
1.	Ketersediaan web site pemma	Unit	16	37	16	43
2.	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	Keping CD,	J 62 CD Kegiatan J 350 CD Kilas Kobar J 350 CD majalah digital	J 100 CD Kegiatan J 350 CD Kilas Kobar J 350 CD majalah digital	J 62 CD Kegiatan J 350 CD Kilas Kobar J 350 CD majalah digital	98
3.	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah, foto, spanduk, baliho	Eksemplar , buku, lembar	J 20 album foto kegiatan J 150 Buku Himpunan Pidato Bupati J 500 buletin	J 25 album foto kegiatan J 150 Buku Himpunan Pidato	J 20 album foto kegiatan J 150 Buku Himpunan Pidato Bupati J 500 buletin	85

			) 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi)) 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI) 500 Kalender Meja) 500 Kalender dinding) 279 m2 baleho kegiatan) 98 lembar spanduk kegiatan) Bimtek jurnalistik 1 kali	Bupati) 500 Buletin) 5000 Tabloid Warta Kobar (5 edisi)) 500 Kalender Meja) 500 Kalender dinding) 453 m2 baleho kegiatan) 150 lembar spanduk kegiatan) 5 buah baleho kecamatan) Gatering Wartawan) Bimtek Jurnalistik dan kehumasan	) 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi)) 500 Kalender Meja) 500 Kalender dinding) 279 m2 baleho kegiatan) 98 lembar spanduk kegiatan) 5 buah baleho kecamatan) - kali) 1 kali	
4.	Terselenggara pameran/ekspo	Kali	1 kali	1 kali	1 kali	100
5.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	7 Media	5 media	5 media	100
6.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/Media Online	Media	6 Media	4 Media (2 Radio lokal swasta, SBTv dan TVRI)	4 media	100
7	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	Media	7 media	7 media (5 media harian, 1 mingguan, 1 liputan khusus)	7 media	100
8	Siaran Keliling /Publikasi Keliling	Kali	48 kali	60 kali	47 kali	78

Sumber : Bagian Humas dan Bagian Komunikasi dan PDE Setda Kab. Kotawaringin Barat 2016

18. URUSAN PERTANAHAN

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki kewenangan dibidang pertanahan karena semua kewenangan di bidang pertanahan menjadi urusan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi vertikal yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan fasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya melakukan koordinasi dengan badan Pertanahan Nasional guna untuk kepentingan pembangunan daerah.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015 - 2016

No.	Indikator	satuan	2015	2016		
				Target	Realisasi	%
1.	Luas tanah bersertifikat	Hektar	-	1.113.218	-	-
2.	Luas tanah yang belum bersertifikat	Hektar	-	875.871	-	-
3.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	445	62	16	25,81
4.	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang	342	-	-	-
5.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	820	-	-	-
6.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	445	-	-	-
7.	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ke tiga	bidang	-	-	-	-
8.	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	-	-	-	-
9.	Konflik pertanahan yang terjadi	kasus	3	3	3	100
10.	Konflik pertanahan yang terselesaikan	kasus	3	3	3	100

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan dan Perlengkapan Setda 2016

Pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PPIB Revisi XI).

Adapun pada tahun 2016 bagian pemerintahan telah melakukan survey lapangan baik dari Tim Pusat maupun dari Tim provinsi untuk melakukan idetifikasi kawasan gambut. Pada PPIB Revisi X kawasan gambut di kabupaten kotawaringin barat seluas 98.448 Ha terbagi di wilayah 3 kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama. Sedangkan untuk tahun 2016 setelah diterbitkannya PPIB Revisi XI luasan kawasan gambut Kabupaten Kotawaringin Barat telah berkurang menjadi 84.308 Ha. Artinya ada pengurangan sekitar

14.140 Ha zona kawasan gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kesatuan bangsa memiliki arti adanya rasa kebersamaan di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kondisi politik dalam negeri dipengaruhi oleh adanya kemajemukan masyarakat, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan juga golongan. Kemajemukan masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa, tetapi dapat juga menjadi ancaman atau potensi penyebab konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Begitu juga dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yang notabene memiliki heteroginitas masyarakat yang tinggi, apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi konflik yang berbasis SARA. Pada tahun 2016, di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terjadi unjuk rasa di beberapa tempat. Unjuk rasa yang terjadi terdiri atas permasalahan sosial ekonomi dan konflik pertanahan.

Meskipun demikian, unjuk rasa berjalan dengan relatif tertib dan damai. Aksi unjuk rasa biasanya dilakukan terjadi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan sinergis antara Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan demikian, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di Kotawaringin Barat. Usaha itu di antaranya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar-Umat Beragama/ Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah, Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM, Forum Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan Perempuan, serta Sosialisasi Undang-Undang Parpol bagi Partai Politik peserta Pemilu 2016. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dilakukan agar terwujudnya kerjasama yang baik dan persatuan antar Parpol, LSM dan Ormas. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara rutin dan penyampaian sosialisai peraturan yang baru terkait Parpol, LSM dan Ormas seperti penyaluran Bantuan Keuangan untuk Parpol, Pemberian Dana Hibah untuk LSM dan Ormas.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015 – 2016

No.	Uraian	Satuan	Capaian 2015	2016		%
				Target	Realisasi	
1.	Jumlah kegiatankoordinasi dan fasilitasiPengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	kegiatan	3	3	3	100
2.	Jumlah kegiatanpembinaan politik daerah	kegiatan	2	1	1	100
3.	Jumlah kegiatanpembinaan terhadap LSM,ORMAS dan OKP	kegiatan	1	-	-	-
4.	Jumlah kegiatanpembinaan, pengembangan danpengendalian potensilinmas dan hak-hak sipil	kegiatan	3	3	3	100

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat, 2016

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif dan represif. Proses penegakan peraturan daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat, pemantauan apakah masyarakat sudah memahami peraturan yang disosialisasikan.

Kemudian, untuk masyarakat yang melanggar, dilakukan operasi non-yustisi dengan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Selanjutnya, perlakuan terhadap pelanggar ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu pelanggar diproses secara hukum.

Tabel 2.66
Pelanggaran Perda di KabupatenKotawaringin Barat
Tahun 2015 – 2016

No	Jenis Pelanggaran	JumlahPelanggran (kali)		+ / (-)	Ket
		Tahun 2015	Tahun 2016		
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	3	43	+	
2.	Minuman Keras (Miras)	80	61	-	
3.	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	39	81	+	
4.	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	6	13	+	
5.	Premanisme	0	0		
6.	Judi Togel	1	0	-	
7.	Mucikari	14	9	-	
8.	KTP	9	4	-	
9.	Ngelem Fox	1	6	+	
10.	Pengamen	0	22	+	
11.	Waktu kunjung warnet	0	1	+	
12.	Pelajar bolos sekolah	0	1	+	
	Jumlah	153	241		

Sumber : PPNS Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat 2016

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat jenis pelanggaran yang meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah PSK liar/prostitusi/pasangan mesum, PKL, GEPENG, ngelem fox dan pengamen.

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan ketentuan daerah atau nasional yang mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan;
- b. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut berdampak kondusifnya ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2016.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Pencapaian kinerja output dan outcome kegiatan pada Sekretariat Daerah, mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

Tersusunnya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:

- a. Perda dan Perbub APBD sebanyak 4 buah;
- b. Perda dan Perbub Perubahan APBD sebanyak 5 buah;
- c. Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Neraca;

- 4. Laporan Operasional;
- 5. Laporan Arus Kas;
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7. Catatan Laporan Keuangan.

2. SEKRETARIAT DPRD

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD guna mendukung tugas dan fungsi DPRD meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan professional serta menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja yang baik antar kegiatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan komponen lainnya.Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.741.911.000dan terealisasi sebesar Rp. 7.963.664.396 atau 91,09 %.

3. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67
Capaian Indikator Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin BaratTahun 2016

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2015	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	% Realisasi dari Target
- Persentase Realisasi Pendapatan	86,25	105	92,14	87,75
- Persentase Realisasi Pajak				
- Persentase Lain – Lain	78,65	106	86,98	82,06
- Penerimaan Daerah	116,23	100	121,16	121,16
- Persentase Ketepatan Penyerapan Belanja Pegawai (Gaji)	89,79	99	94,35	95,30
- Persentase Penyerapan Belanja Langsung	95,96	99	79,23	80,03
- Persentase Ketepatan Penyaluran Dana Transfer	99,39	99	97,49	98,47
- Persentase Akurasi Anggaran Kas	98,95	97	95	97,94
- Ketepatan Penyediaan Dana Untuk Membiayai Pengeluaran	100	98	98	100
- Persentase Realisasi Fungsi Pelayanan	100	98	98	100

- Ketersediaan Informasi Yang Handal	100	100	100	100
- Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan SKPD	100	3	0	0
- Ketepatan Penyampaian LKPD	100	100	100	100
- Persentase Penyerapan DPA – SKPD	91,84	99	89,21	90,11
- Persentase Satuan Kerja Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	99	99	100
- Indek Kepuasan Pelanggan	90,82	98	91	92,86
- Persentase Penyelesaian SOP	100	100	100	100
- Persentase Profil Resiko	87,50	3	2,5	83,33
Rata – rata capaian	96,20			89,94

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan disiplin ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Kedisiplinan ASN digunakan sebagai salah satu indikator kinerja. Selanjutnya diberikan *reward* bagi ASN sesuai dengan kinerjanya. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kinerja yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. *Reward* juga diberikan dalam bentuk pemberian tali asih bagi PNS yang memasuki masa purna tugas. *Punishment* diterapkan kepada ASN berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pegawai selama ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan CPNS.

Dalam rangka mengisi formasi tambahan PNS pada SKPD/Satuan Unit Kerja, dilaksanakan melalui pengadaan CPNSD Kabupaten Kotawaringin Barat. Usul dan alokasi formasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.68
Usulan dan Alokasi Formasi PNS Tahun 2010 – 2016

TH	USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA				ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA				KETERANGAN
	GURU	KES	TEKNIS	JML	GURU	KES	TEKNIS	JML	
2010	619	50	613	1.282	117	50	93	260	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	2	-	13	15	2	-	13	15	
2013	50	4	18	72	50	4	18	72	Dari hasil tes tenaga honorer K.2 sebanyak 71 orang + 1 orang dari formasi khusus dokter
2014	632	206	320	1158	42	36	17	101	Formasi jalur khusus dokter 6 + formasi umum 95

TH	USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA				ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA				KETERANGAN
	GURU	KES	TEKNIS	JML	GURU	KES	TEKNIS	JML	
2015	661	150	337	1148	-	-	-	-	Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat
2016	661	166	366	1163	-	-	-	-	Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat 2016

2. Penempatan PNS

Melalui penempatan PNS diharapkan dapat mengisi jumlah, kualitas, komposisi, distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan SKPD/Satuan Unit Kerja dilaksanakan melalui penempatan PNS dengan mengangkat CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.69
Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Tahun 2010 - 2016

TAHUN	JUMLAH	GOLONGAN RUANG								KET
		I.a	I.b	I.c	II.a	II.b	II.c	III.a	III.b	
2010	229	0	0	0	0	8	57	161	3	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	15	1	-	3	6	-	2	3	-	
2013	72	2	-	2	49	2	4	12	1	
2014	74	2	-	2	17	5	4	35	9	
2015	90	-	-	-	-	1	26	56	7	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat 2016

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan administrasi kepegangkatan.

Tabel 2.70
Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2010 - 2016

No.	KEGIATAN	Tahun							Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kenaikan Pangkat	988	792	1111	814	1012	696	585	
2	Peninjauan Masa Kerja	4	7	7	1	12	3	2	Sesuai usulan dari SKPD
3	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	171	317	234	4	12	-	79	CPNS formasi tahun 2010. Tahun 2011 tidak ada penerimaan CPNS. Tahun 2014, 2015 dan 2016 dari honorer
4	Pencantuman Gelar	19	13	8	16	28	15	19	Sesuai usulan dari SKPD

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat 2016

Informasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan pegawai, melalui peningkatan dalam pengelolaan database. Jumlah PNS yang masuk data base dari tahun ke tahun terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.71
Data Base Kepegawaian Tahun 2010 – 2016

NO	TAHUN	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					JUMLAH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	2010	4	9	28	15	159	426	553	259	885	572	583	498	882	51	16	1	0	4941
2	2011	2	7	13	16	105	474	580	252	1011	536	495	563	911	85	19	0	0	5069
3	2012	2	6	12	16	97	367	589	230	830	643	456	610	1008	78	22	0	0	4966
4	2013	2	6	10	34	153	498	421	474	715	576	544	822	561	62	19	0	0	4897
5	2014	4	4	11	9	100	131	392	487	598	918	480	668	1021	74	24	1	0	4922
6	2015	3	3	13	7	88	86	401	503	492	1016	499	655	1036	65	33	1	0	4901
7	2016	3	3	12	5	76	74	284	425	571	850	432	617	873	90	32	1	0	4348

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat 2016

4. Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tabel 2.72
Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2010 – 2016

NO.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah	Keterangan
1	Pelanggaran Disiplin	18	-	-	-	8	5	8	31	
2	Dugaan Pelanggaran Disiplin	-	-	-	12	10	8	8	30	
3	PNS melakukan Tindak Pidana	6	5	3	2	-	-	-	16	
4	Pemberhentian PNS	2	-	2	1	4	7	1	16	
5	Pemberian Izin Cerai	6	7	1	8	13	5	21	40	
6	Bimbingan Teknis Disiplin	-	1	6	6	29	1	1	43	Bimtek 2015 diikuti 100 orang dari semua SKPD
7	Siraman Rohani	-	-	-	1	1	7	7	9	Siraman Rohani tahun 2015 dilaksanakan di setiap Kecamatan
8	Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010	-	-	-	-	1	2	7	3	

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat 2016

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi melalui pemberian piagam Satyalencana Karya Satya, Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Pensiun PNS.

Tabel 2.73
Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2010 – 2016

No.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	KARPEG	186	111	538	195	13	33	14	1090
2	KARIS / KARSU	201	232	529	261	251	317	540	2331
3	PENSIUN	74	78	74	74	50	59	110	519
4	SATYA LENCANA	93	62	27	74	194	83	79	612
5	TASPEN	141	85	20	20	5	75	29	375

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat 2016

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dilakukan melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan pengiriman mengikuti seleksi tugas belajar serta pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas serta pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.

Tabel 2.74
Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Th. 2010 - 2016

No.	KEGIATAN	Tahun							JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	DIKLAT KEPEMIMPINAN	46	91	54	22	19	61	39	332
2	DIKLAT PRA JABATAN	294	679	226	16	1	71	99	1386
3	TUGAS BELAJAR	33	10	18	22	23	27	18	151
4	IJIN BELAJAR	21	360	234	75	95	104	61	950
5	UJIAN DINAS	35	33	12	34	40	41	231	426
6	UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH	60	10	11	18	20	12	7	138
7	IPDN	3	1	2	1	4	1	2	14

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat2016

5. INSPEKTORAT KABUPATEN

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, selama Tahun 2016 dilakukan beberapa hal yaitu:

- a. Pemeriksaan reguler Desa dengan jumlah obyek pemeriksaan 28, dengan temuan 120 dan jumlah rekomendasi sebanyak 325. Sedangkan pemeriksaan reguler SKPD dengan jumlah obyek pemeriksaan 10, dengan jumlah temuan 49 dan jumlah rekomendasi 136. Hasil dari pemeriksaan reguler desa dan SKPD Tahun 2016 yang telah ditindak lanjuti rekomendasinya sejumlah 299.
- b. Melakukan review laporan kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPD dengan hasilnya adalah Laporan Kinerja Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang disusun masih terdapat salah saji dan kekurangan penyajian data dan informasi yang diperlukan, dengan rekomendasi terhadap hasil tersebut adalah memperbaiki laporan kinerja Kab. Ktw. Barat Tahun 2015 sesuai hasil review tim Inspektorat Kobar.

Selanjutnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan berdasar jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT 2016) meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan reguler secara berkala
2. Monitoring dan evaluasi ADD;
3. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan brg/jasa, monitoring dana desa;
4. Review LKPD;
5. Review LKIP;
6. Review RPJMD, Reviu RKA;
7. Monitoring inventarisasi aset tetap 2016;
8. Pemeriksaan Khusus (Pemsus);
9. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

6. KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN (KPTP)

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat menangani beberapa jenis izin yaitu sebanya 15 jenis izin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan / Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut ini adalah informasi tentang jenis dan realisasi izin yang diterbitkan oleh sebagai berikut :

Tabel 2.75
Jenis dan Realisasi Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014 s/d 2016

No.	Jenis Izin Usaha	Ralisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	2016		
				Target	Realisasi	% target
1.	IMB	1.229	769	769	749	97,40
2.	SITU	700	573	573	587	102,44
3.	HO		550	550	496	90,18
4.	Reklame	13	0	0	0	0
5.	TDP	462	428	428	389	90,89
6.	IUI	1	1	1	1	100
7.	TDI		3	3	3	100
8.	SIUP	466	439	439	363	82,69
9.	TDG/R	3	10	10	10	100
10.	IUA	1	0	0	0	0
11.	IT (Izin Trayek)			0	0	0
12.	IUA-PP	41	18	18	15	83,33
13.	IT-PP	0	3	3	0	0
14.	IBA dan Logpond	107	36	36	23	63,89
15.	IUJK	112	145	145	103	71,03
JUMLAH		3.135	2.975	2.975	2.739	92,07

Sumber : KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 telah menerbitkan berbagai izin usaha sebanyak 2.739 izin. Izin yang diterbitkan terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 749 izin, Izin Tempat Usaha (SITU) 587 izin, Izin Gangguan (HO) sebanyak 496 izin, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 389 izin, Izin Usaha Industri (IUI) sebanyak 1 izin, Tanda Daftar Industri sebanyak 3 izin, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 363 izin, Tanda Daftar Gudang / Ruang sebanyak 10 izin, Izin Usaha Angkutan (IUA) dan Izin Trayek (IT) tidak ada yang mengajukan permohonan izin untuk tahun 2016. Kemudian Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman (IUA-PP) sebanyak 15 izin, Izin Trayek Perairan Pedalaman (IT-PP) sebanyak 0 izin, Izin Bangunan Air (IBA) dan Logpond sebanyak 23 izin, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 103 izin.

Dalam hal ini berdasarkan tabel di atas, bahwa di beberapa izin mengalami penurunan realisasi dalam penerbitan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadi pembagian kewenangan penanganan perizinan dengan adanya PATEN di Kecamatan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu izin yang ditangani dengan persyaratan di bawah 100 m².

Pada tahun 2016 ini Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi IMB sebesar Rp. 2.843.897.572 dari targetnya yaitu Rp. 2.127.000.000 juga Retribusi HO sebesar Rp. 2.499.698.550 dari targetnya Rp. 3.059.000.000 Serta Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 18.611.997 dari targetnya Rp. 17.000.000 dengan demikian total PAD retribusinya sebesar Rp. 5.362.208.119.

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial. Pertama, Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Kedua, Bencana Non Alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Ketiga, Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan social politik dan konflik social dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kesehatan PU, dll. Begitu pula pada Tingkat Kabupaten, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

8. KANTOR KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis dan vital karena merupakan ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, disamping pemerintahan desa dan kelurahan.

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin

Barat menjelaskan bahwa tugas kecamatan adalah “Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilakukan sertadititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirianmasyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitaspengembangan kelembagaan dalam masyarakat serta pengembanganpartisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pemantapan nilaisosial dasar, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengelolaansumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna.Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2015-2016 :

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 - 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	desa	77	94	77	81,10
2.	Jumlah musyawarah pembangunan desa/ kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel.	94	94	94	100
3.	Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	desa	1	1	1	100
4.	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih	orang	0	-	-	-
5.	Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel.	1	1	1	100

Sumber : BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Dalam upaya pengentasan dan percepatan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat.

22. URUSAN SOSIAL

Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Orsos), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun unsur masyarakat secara keseluruhan. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk menjadi leading sektor bagi penanganan berbagai masalah sosial di tingkat kabupaten.

Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin, pada tahun 2016 telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin untuk 26 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian bantuan kepada 20 KUBE Keluarga Miskin Perdesaan yang berasal dari Kementerian Sosial RI, serta diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 5 Kelompok (15 orang) berupa peralatan mesin jahit kepada peserta hasil kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di LBK Pangkalan Bun.

Program pemberdayaan sosial pada tahun 2016 banyak melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dan sesuai dengan perencanaan Dinas Sosial yang telah ditetapkan. Studi Banding PANDU GEMPITA yang dilakukan merupakan kegiatan dalam mendukung pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada Tahun 2016 Studi Banding PANDU GEMPITA (pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera) dilakukan ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. Dalam pelaksanaan kaji banding tersebut dalam

pelaksanaannya melibatkan instansi terkait seperti Dinas Sosial, DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dan DPKAD. Dalam kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 3 Karang Taruna, Penyediaan jasa cuci motor, bengkel motor. Pemberdayaan organisasi sosial (orsos) berupa yayasan atau organisasi dalam bentuk lain milik masyarakat yang melaksanakan penanganan PMKS, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam atau luar panti yang jumlahnya telah mencapai 21 orsos atau yayasan.

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 19 orang. Pelaksanaan pendampingan pada tahun 2016 menjangkau sasaran sebanyak 2.806 KK peserta PKH yang tersebar di 6 kecamatan.

Pada kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, sebagai upaya tetap eksis dan *establish* peran pemerintah daerah masih sebatas memberikan bantuan dalam bentuk makanan dan peralatan mandi, yang dilaksanakan melalui kegiatan anjongsana ke Panti Asuhan, Lembaga Permayarakatan, Rumah Sakit Daerah, Sekolah Luar Biasa dan Pondok Pesantren.

Pada tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi tuan rumah dalam kegiatan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSAN pada tanggal 15 Desember 2016. Adapun rangkaian kegiatan pada peringatan yaitu upacara peringatan HKSAN di halaman Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, pelayanan pembuatan akte kelahiran, pelayanan pembuatan kartu keluarga, penyelenggaraan nikah massal, pemberian paket bantuan untuk anak sekolah, pemberian bantuan kursi roda.

Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan arah rencana kerja (Renja) Dinas Sosial pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terdapat 2 orang dengan kecacatan yang dikirim untuk mengikuti pelayanan rehabilitasi sosial vokasional di Balai Besar Bina Daksa Prof. DR Suharso Surakarta Provinsi Jawa Tengah, 1 orang mendapatkan UEP pengembangan bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan rapat kerja Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), pelaksanaan Sosialisasi Narkoba bagi pelajar, pembinaan Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 19 orang yang terjaring dalam operasi PEKAT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pemberian bantuan bahan makanan sembako dikarenakan pendanaan yang telah

direncanakan pada awal tahun mengalami rasionalisasi.

Kegiatan lain yang terkait dengan rehabilitasi sosial yaitu Program Pembinaan Anak Terlantar melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar memberikan pelayanan berupa pelatihan kerajinan tangan (*hand craft*) kepada 15 (lima belas) anak yang dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan pengiriman klien sebanyak 5 (lima) orang ke Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangkaraya. Selain itu sebagai tindak lanjut dari pelatihan di Loka Bina Karya (LBK) telah dibentuk 3 KUBE dan masing-masing KUBE mendapatkan bantuan stimulan berupa pemberian peralatan dan perlengkapan pembuatan akrilik dan bahan kain panel. Pada kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, pelayanan yang diberikan berupa Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 10 (sepuluh) anak terlantar/putus sekolah, terdapat 2 bayi terlantar dan hak asuhnya telah diberikan kepada orang tua asuh adopsi dan pelayanan pemberian rekomendasi pengangkatan anak atau proses adopsi sebanyak 4 orang.

Program Bantuan dan Jaminan Sosial pada tahun 2016 melalui PMKS telah memberikan bantuan pemulangan kepada pekerja migran terlantar sebanyak 179 orang (lebih banyak dibanding pemulangan ex migran pada tahun 2015 sebanyak 107), pemulangan eks nabi sebanyak 26 orang, dan pemulangan gepeng sebanyak 2 orang. Disamping itu telah terlaksana pendampingan kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.806 KK yang tersebar di 6 kecamatan. Dan juga telah terlaksana pemberian surat rekomendasi BPJS bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sebanyak 791 orang.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Keberadaan Sarana sosial:) Panti asuhan) Panti jompo) Panti rehabilitasi	Unit Unit Unit	17 - -	21	21	100
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	88,12	2.587	2.675	103,40
3.	Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	kasus	91,22	956	1.024	93,36

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat 2016

23. URUSAN KEBUDAYAAN

Keberagaman suku dan ras penduduk ini tentunya juga menyebabkan keberagaman seni dan budaya yang berkembang. Masing-masing budaya terpetakan dengan sangat baik. Kesenian yang berkembang di suatu kecamatan biasanya juga merefleksikan dominasi kesukuan yang mendiami wilayah tersebut.

Di Kecamatan Arut Selatan sebagai ibukota Kabupaten, kesenian yang berkembang didominasi oleh budaya dengan ciri khas Melayu, yang merupakan asal usul Kesultanan Kotawaringin. Terdapat 44 grup kesenian, terdiri dari kesenian hadrah, rebana dan tari tradisional dayak pedalaman dan seni tradisional daerah lain di nusantara seperti Kesenian Sunda, Padang dan Jawa. Adapun penyelenggaraan kegiatan kesenian di tahun 2016 ini sebanyak 5 kali event besar dan 1 event berskala nasional yaitu Festival Keraton Nusantara X yang dihadiri 65 Kerajaan dan Kesultanan dari Nusantara. Sedangkan di Kecamatan Arut Utara, budaya dan adat Dayak dominan dalam kehidupan sehari-hari terdapat 7 sanggar, adapun untuk desa tertentu terdapat kesenian pesisir dan Jawa. Di Kecamatan Kotawaringin Lama kebudayaan yang berkembang juga diwarnai ciri Melayu. Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan pusat Kesultanan Kotawaringin. Sementara itu, di Kecamatan Pangkalan Lada budaya yang berkembang didominasi budaya Jawa.

Di Kecamatan Pangkalan Lada terdapat 30 grup dan kelompok kesenian yang terdiri dari grup reog, kuda lumping, wayang dan tari tradisional, bahkan juga barongsai serta Sanggar Tari Dayak. Kecamatan Pangkalan Lada tercatat paling aktif menyelenggarakan pementasan kesenian, dimana tahun 2016 terjadi 7 kali penyelenggaraan kesenian. Pergelaran tersebut merupakan bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan. Misalnya untuk memperingati tahun baru Hijriyah diadakan bersih desa dan pertunjukan wayang. Kegiatan berkesenian biasanya ditampung di gedung serbaguna milik desa ataupun di lapangan. Dengan demikian dapat diasumsikan masing-masing desa di Pangkalan Lada memiliki saranafasilitas seni.

Senada dengan Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng juga didominasi kebudayaan Jawa. Terdapat 16 grup kesenian di kecamatan ini, dengan 3 kali penyelenggaraan kesenian dan budaya selama tahun 2016. Sedangkan di Kecamatan Kumai, budaya yang berkembang dominan budaya pesisir lokal. Terdapat 29 grup kesenian dan satu kali penyelenggaraan kegiatan seni budaya pada 2016.

Sedangkan di Bidang Keagamaan terdapat Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji dengan fasilitasi keberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Kota

Pangkalan Bun menuju Kota Palangka Raya sebanyak 77 orang yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Serta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan yang merupakan rangkaian kunjungan kerja Bupati Kotawaringin Barat ke 6 (enam) Kecamatan dalam bentuk Safari Ramadhan.

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	4	11	11	100
2.	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2	2	2	100
3.	Jumlah group kesenian	group	43	50	43	86
4.	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-
5.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	33	36	33	91,66
6	Pelayanan Ibadah Haji	keg	1	1	1	1
7	Safari Ramadhan Bupati Kobar	lokasi	6 i	6	6 i	6

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat dan Bagian Administrasi Kesra Setda 2016

24. URUSAN STATISTIK

Urusan statistik di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyediaan data statistik dasar ditangani oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasinya melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan menyediakan anggaran untuk penggandaannya dan membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung proses penyusunan buku statistik dasar tersebut yang meliputi Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka, Buku PDRB Kotawaringin Barat, Buku Penduduk Kotawaringin Barat dan Buku Distribusi Pendapatan. Sedangkan untuk penyediaan data statistik sektoral dan statistik khusus seperti Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Profil Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Statistik Perkebunan, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Tabel Input Output Daerah dan yanglainnya ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah.

Berikut dapat dilihat mengenai Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik selama tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	buku	Ada	Ada	Ada	100
2.	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	buku	Ada	Ada	Ada	100
3.	Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	elemen data	Dari 1.382 isian elemen data yang tersedia, berhasil terisi sebanyak 1.246 atau (90,16%)	1.633 elemen data	1.187 elemen data	72,69

Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2016

Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalokasikan anggaran untuk penggandaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015 dan Buku PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, dikarenakan pihak BPS selaku lembaga yang berwenang dalam menyediakan data statistik dasar tidak memberikan rekomendasi dalam hal penggandaan buku-buku dimaksud.

Namun demikian meskipun buku-buku tersebut tidak tersedia, kebutuhan akan data-data terbaru untuk kepentingan penyusunan perencanaan tetap dapat terpenuhi karena fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui SKPD terkait, dengan pihak BPS tetap dapat berjalan dengan baik.

Kemudian bila dilihat dari indikator tingkat capaian keterisian data statistik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 74,92 % pada tahun 2014 menjadi 90,16 % pada akhir tahun 2015.

25. URUSAN KEARSIPAN

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mengembangkan sistem kearsipan dalamkaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khazanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Pengelolaan arsip secara eletronik ini perlu mendapat dukungan dana yang memadai.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanahan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Terkait dengan Capaian Indikator Kinerja Urusan kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	100
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	4	4	5	125
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	4	4	4	100
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	4:36	4:36	11,11
5.	Arsip audio visual	265	265	265	100
6.	Arsip Foto/Album	279	30	30	100
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	38	17	21	123,53
8.	Sosialisasi kearsipan	1	2	2	100
9.	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	19.462	2.000	19.515	975,75
10.	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	1.001	-	7	-

Sumber : KPAD Kab. Kotawaringin Barat 2016

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah untuk meningkatkan pengunjung Perpustakaan antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Jumlah koleksi bahan pustaka, baik melalui pengadaan langsung ataupun gerakan hibah buku;
- b. Menyediakan Layanan Ruang Baca Anak;
- c. Menyediakan Internet / *WiFi* gratis;
- d. Menyediakan Layanan Audio Visual;
- e. Menyediakan Layanan Ruang Baca di tempat;
- f. Menyediakan Layanan Referensi;
- g. Kelas Berbagi (workshop fotografi, kelas kecantikan, belajar bersama);
- h. Layanan Wisata Pustaka;
- i. Layanan Mendongeng/ *Story Telling* untuk anak usia TK;
- j. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
- k. Layanan Pinjam Pakai Buku.
- l. Layanan Taman Baca Baruna
- m. Layanan Bimbingan Pemakai/ pemustaka

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memajukan urusan perpustakaan pada tahun 2016 meliputi :

- a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, yaitu dengan mengadakan lomba bercerita tingkat SD se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Pengembangan minat dan budaya baca, yaitu dengan membuka layanan setiap hari sampai pukul 21.00 WIB, mengadakan lomba cipta dan baca puisi tingkat SMP, Lomba menulis surat untuk ibu ditingkat SMA, Lomba senam beruang untuk anak PAUD dan TK dan Lomba menyanyi untuk tingkat SD/MI, mengadakan layanan story telling (mendongeng) untuk anak TK, dan memberikan layanan kelas berbagi untuk masyarakat.
- c. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan kelurahan/desa yang diharapkan akan meningkatkan pengelolaan perpustakaan kelurahan/desa menjadi lebih baik dan juga mengadakan Lomba perpustakaan desa/kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Barat.

- d. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, yaitu dengan kegiatan MPK ke sekolah/desa/kelurahan yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah;
- e. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, yaitu dengan memberikan promosi layanan perpustakaan daerah melalui media elektronik/ siaran radio dan televisi lokal, mengikuti acara Kobar expo dan mengadakan acara peluncuran koleksi buku baru tahun 2016.
- f. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, yaitu pengadaan langsung buku-buku perpustakaan, yang diharapkan dengan bertambahnya bahan pustaka akan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan juga akan meningkatkan jumlah pemustaka (anggota baru, pengunjung dan peminjam buku).
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kepada perpustakaan desa/kelurahan yang telah mengikuti Bimtek Pengeolaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh KPAD Kab. Kotawaringin Barat.
- h. Perawatan Bahan Pustaka, yaitu kegiatan untuk memelihara dan merawat koleksi bahan pustaka agar tidak rusak.

Terkait dengan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Indikator	Capaian s/d 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi thd target
1.	Jumlah Perpustakaan/tahun	328	338	343	150
2.	Jumlah anggota perpustakaan/tahun	7.012	7.512	8.732	344
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	75.309	80.000	93.737	1,17
4.	Jumlah peminjam/tahun	45.287	48.787	73.393	803
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka/tahun	18.173	21.173	21.799	120
6.	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	328 : 278.141	338 : 286.714	343 : 286.714	101
7.	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	3 : 278.141	1 : 286.714	1 : 286.714	100

Sumber : KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat 2016

2.2.2. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 178 km sehingga potensi dari penangkapan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga ada sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya. Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua kecamatan. Usaha untuk meningkatkan perikanan budidaya perlu terus digalakan untuk mengurangi ketergantungan dari perikanan tangkap. Produksi perikanan secara keseluruhan pada tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 19.922,39 ton.

Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, yaitu perairan laut dan perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan melalui pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan.

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan hasil usaha dan pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai).

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Indikator	2015	2016		
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% target
1.	Produksi perikanan (ton)	16.055,81	18.700	19.922,39	106,54
2.	Produksi Perikanan tangkap (ton)	12.050,40	13.650	14.792,70	108,37
	a. Perairan Laut	10.896,70	11.812,50	10.874,40	92,06
	b. Perairan Umum	1.153,70	1.837,50	3.918,30	213,24
3.	Produksi Perikanan Budi daya (ton)	4.005,41	5.050	5.129,69	101,58
	a. Budidaya Air Payau	626,19	900	918,20	102,02
	b. Budidaya Air Tawar	2.996,15	3.582	3.811,16	106,40
	c. Budidaya Perairan Laut	383,07	568	400,33	70,48
4.	Rata-rata Konsumsi ikan per orang/tahun (kg)	41,35	43,5	43,5	100
5.	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	174,32	500	518,66	11,25
6.	Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)	941,73	1.170.000	1.577.193	134,80

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar2016

Berdasarkan Tabel diatas dari indikator yang ada mengalami kenaikan produksi bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, ini di karenakan pada tahun 2016 perubahan iklim *el nino* tidak sepanjang tahun 2015 yang menyebabkan beberapa fisik lokasi rawa atau danau yang kering/ luasan berkurang, sedangkan untuk perairan laut kondisi asap mengurangi/mengganggu aktivitas penangkapan ikan.

Jumlah kapal penangkapan ikan perairan laut terdiri dari 195 perahu tanpa motor, 975 kapal ukuran 0 – 5 GT, 134 kapal ukuran 5 - 30 GT, dan 5 kapal ukuran lebih dari 30 GT. Jumlah kapal penangkapan ikan diperairan umum terdiri dari 424 buah perahu tanpa motor dan 583 buah motor tempel.

Alat tangkap perairan laut terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 604 buah, jaring tiga lapis sebanyak 796 buah, jaring insang hanyut sebanyak 318 buah, purseine sebanyak 53 buah, rawai sebanyak 210 buah, serok sebanyak 65 buah, alat penangkap kerang 25 buah, bubu 170 buah lain-lain sebanyak 115 buah. Alat tangkap perairan umum terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 632 buah, bubu sebanyak 460 buah, pancing sebanyak 370 buah, rawai sebanyak 680 buah, jala tebar sebanyak 313 buah, sero sebanyak 40, garpu tomba, dan lain-lain 205 buah.

Potensi usaha budidaya tambak tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari luasan tersebut yang sudah diusahakan dan aktif beroperasi seluas 93,63 ha atau sebanyak 362 Rumah Tangga Perikanan (RTP),

terdapat di Kecamatan Kumai seluas 87,43 ha atau 671 unit tambak atau 341 RTP dan Kecamatan Arut Selatan 6,2 ha yang terdiri dari 24 unit tambak atau 21 RTP dengan total produksi 918,2 ton.

Untuk perkembangan usaha budidaya kolam ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berkembang di 6 (enam) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama, Kumai dan Arut Utara, terdiri dari 1.520 RTP dengan luas areal 44,74 ha dan 3.388 unit. Hasil produksi sebesar 1.900,28 ton terdiri dari ikan mas, nila, lele, gurame, gabus dan patin.

Usaha budidaya Keramba dan keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di sepanjang daerah aliran sungai Arut dan Lamandau. Areal yang telah dimanfaatkan sebesar 12,90 ha atau sebanyak 7.662 unit. Jumlah hasil produksi sebesar 1.910,88 ton terdiri dari ikan nila, patin, mas, jelawat, toman, baung, bawal, batutu dan ikan lainnya.

Usaha budidaya rumput laut hanya di Desa Teluk Bogam dengan jumlah 60 RTP, luas areal 10 ha atau sebanyak 600 unit. Jumlah produksi sebesar 400,33 ton basah. Bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan pembudidaya kekurangan bibit rumput laut terutama pada musim penghujan. Mereka tidak bisa mempertahankan bibit rumput laut untuk bisa dijadikan bibit setelah musim hujan berakhir.

Usaha budidaya mina padi masih belum dikembangkan, untuk menyebarluaskan usaha budidaya mina padi, pada tahun 2016 dibuat kawasan terpadu pertanian di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan Banteng yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan juga atas keinginan dari masyarakat setempat.

Sasaran produksi usaha budidaya ikan pada tahun 2016 sebesar 5.050 ton dan mencakup rumah tangga perikanan (RTP) sebanyak 1.750 RTP, dengan rincian : jumlah unit usaha budidaya tambak 800 ha, dengan produktivitas 500-1.000 kg/Ha/tahun, kolam ikan 140 ha, dengan produktivitas 10.000-20.000 kg/Ha/tahun, karamba 2.850 unit dengan produktivitas 400-1.000 kg/unit/tahun, serta rumput laut 500 unit dengan produktivitas 400 ton /tahun (basah).

Perkembangan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum masih sangat minim sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah unit pengolahan, pabrik es dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan. Namun demikian dalam beberapa tahun ini usaha untuk meningkatkan

mutu produk hasil perikanan serta perluasan pasar ikan telah banyak diusahakan, antara lain :

- a. Pembangunan gedung outlet pemasaran ikan;
- b. Pengadaan alat penepung ikan, alat penghancur es, ice storage, long pan dan ice can;
- c. Pengadaan box dingin (*cool box*) untuk menjaga rantai dingin;
- d. Pembangunan pasar ikan;
- e. Peralatan outlet pemasaran ikan.

Pengendalian mutu produk hasil perikanan sangat bergantung pada sarana rantai dingin, hal ini karena produk perikanan merupakan jenis produk yang mudah busuk (*Ferisablefood*) dimana perlu terjaga rantai dingin dari pasca penangkapan/pasca budidaya hingga sampai ke konsumen.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 difokuskan pada pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan penertiban ijin usaha perikanan. Hasil pengawasan dilapangan berupa pelarangan penggunaan alat/bahan penangkap ikan yang dilarang seperti strum sebanyak 1 kasus, trawl sebanyak 2 kasus dan potasium sebanyak 1 kasus, perijinan usaha penangkapan ikan 1 kasus dan penangkapan ikan yang dilindungi (*duyung*) sebanyak 1 kasus.

Salah satu program pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat mendesak adalah pembentukan daerah suaka perikanan, dimana hal ini sangat penting guna menjaga dan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kerusakan yang tidak diinginkan. Pada perkembangan beberapa tahun ini telah pula disusun zonasi/daerah sumberdaya kelautan.

Beberapa potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikelola menjadi daerah suaka antara lain :

1. Gosong Senggora;
2. Gosong Sepagar;
3. Gosong Sebogor-Lubang Buaya;
4. Danau Masorayan;
5. Danau Seluluk;
6. Danau Terusan;
7. Danau Gatal Kiri-Kanan.

2. URUSAN PERTANIAN

2.1 Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain sebagai penyedia bahan pangan baik nabati maupun hewani, sektor ini berperan dalam rangka penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan sumber pendapatan masyarakat di perdesaan, disekaligus pemenuhan input bagi sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap pembentukan PDRB terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.83
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016		
			Target	Capaian	%
	Pelayanan Urusan Pilihan				
1.	Pertanian Tanaman Pangan				
1.1.	<i>Luas tanam tanaman pangan</i>				
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	5.412	9.065	4.209	46,43
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	1.454	3.981	746	18,73
1.1.3	Jagung (Ha)	1.526	1.546	2.438	157,67
1.2.	<i>Luas Panen Tanaman Pangan</i>				
1.2.1	Padi sawah (Ha)	4.000	8.612	4.731	54,94
1.2.2	Padi ladang (Ha)	1.664	3.782	1.296	34,27
1.2.3	Jagung (Ha)	608	1.469	1.171	79,72
1.3	<i>Produktivitas tanaman pangan</i>				
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,73	4,10	3,63	88,54
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,28	2,13	2,05	96,24
1.3.3	Jagung (Ton/Ha)	3,65	3.30	3,73	113,03
1.4	<i>Produksi tanaman pangan</i>				
1.4.1	Padi sawah (Ton)	14.928	35.308	17.174	48,64
1.4.2	Padi ladang (Ton)	3.797	8.056	2.657	32,98
1.4.3	Jagung (Ton)	2.219	4.848	4.368	90,11

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan 2016

Pada tahun 2016 capaian produksi tanaman pangan strategis yakni padi meskipun kurang optimal namun naik dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 19.831 ton, lebih tinggi dari tahun 2015 (18.725 ton).Di sisi lain, produksi jagung pada tahun 2016 meningkat sangat menggembirakan, yaitu sebesar 4.368 ton pipilan kering (PK) naik 96,85 % dari tahun 2015 yang mencapai 2.219 ton

PK. Sedangkan untuk hasil komoditi tanaman pangan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No	Jenis Komoditi	2015			2016			+/(-) Produk tivitas
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produk tivitas (Ton/Ha)	
1	Kedelai	59	70	1,19	126,90	176	1,39	17,16
2	Kacang Tanah	79	92	1,16	50,60	58	1,15	-1,25
3	Kacang Hijau	5	4	0,80	0	0	0	-100
4	Ubi Kayu	426	5.263	12,35	356,70	4.691	13,15	6,44
5	Ubi Jalar	114	1.040	9,12	87,50	823	9,40	3,04

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar 2016

Produksi kedelai sebesar 176 ton, naik 152% dari tahun 2014 yang hanya mencapai 70 ton, dengan produktivitasnya juga mengalami peningkatan. Kondisi peningkatan produksi tanaman ini disebabkan adanya stimulus yang berikan pemerintah melalui pengembangan tanaman kedelai seluas 200 ha. Selain itu, adanya motivasi petani untuk menanam kedelai karena alasan harga yang lebih baik dan adanya pemasaran yang lebih jelas di tingkat lapangan. Dukungan dan bantuan pemerintah umumnya akan membuat petani lebih berminat menanam tanaman pangan.

Produksi ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2016 masing-masing sebesar 4.691 ton dan 823 ton. Angka produksi ketiga komoditi ini turun masing-masing sebesar 10,88%, 20,91% dibandingkan produksi tahun 2015. Untuk komoditi lainnya, yakni kacang tanah, produksinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 58 ton, turun 37,25% dari tahun 2015 yang angka produksinya mencapai 92 ton. Komoditi yang tidak terdapat penanaman adalah kacang hijau, hal ini disebabkan kondisi minat petani lebih memprioritaskan pada komoditi pangan lainnya seperti kedelai dan jagung.

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat baru sebagian kecil yang berorientasi pasar, karena hasil produksi umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal, disisi lain tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan sawit dan karet menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengetahui produksi dan produktivitas tanaman sayur sayuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.85
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Jenis Komoditi	2015			2016			+/(-) Produktivitas (%)
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	
1	Bayam	76	159,7	2,10	89	164,8	1,85	-0,12
2	Cabe Rawit	163	390,3	2,39	156	436,7	2,80	0,17
3	Cabe Besar	52	131,5	2,53	57	117,2	2,06	-0,19
4	Kacang Panjang	227	512,6	2,26	222	555,8	2,50	0,11
5	Kangkung	99	227,3	2,30	105	194	1,85	-0,19
6	Ketimun	91	305,1	3,35	101	454,3	4,50	0,34
7	Sawi	191	389,4	2,04	171	381,7	2,23	0,09
8	Terung	164	564,1	3,44	155	573,9	3,70	0,08
9	Tomat	73	199,3	2,73	87	165,5	1,90	-0,30
10	Buncis	77	166,4	2,16	87	155,6	1,89	-0,18
11	Bawang Daun	87	182,8	2,10	82	207,9	2,54	0,21

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar 2016

Upaya mendorong dan mengoptimalkan sentra-sentra baru pengembangan padi yang lebih tertata secara kewilayahan terus dilakukan. Tahun 2016 dilaksanakan rehabilitasi/optimalisasi lahan sawah seluas 50 ha, dan pembangunan *long storage* sebanyak 1 unit untuk pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman. Dalam bidang perbenihan dilaksanakan pengembangan Balai Benih Padi di Tanjung Terantang seluas 25 ha dan penangkaran benih padi seluas 30 ha di tingkat petani penangkar. Balai Benih Padi ini akan terus dioptimalkan fungsinya dalam rangka pemenuhan penyediaan benih unggul berkualitas bagi petani.

Produktivitas dan produksi tanaman pangan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah (penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah secara mandiri), seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian.

Hal ini akan dapat dicapai melalui perluasan/rehab/optimasi lahan pertanian dan pengamanan produksi pertanian sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan. Peningkatan mutu dan kualitas produk perlu dilakukan perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain faktor fisik, faktor sumber daya petani dan kelembagaannya juga perlu terus dikembangkan agar petani mampu mengelola usaha taninya secara

lebih optimal, mandiri dan lebih baik. Lembaga penyuluh pertanian juga perlu terus didorong fungsi dan perannya dalam rangka pendampingan peningkatan kesejahteraan petani. Mengenai indikator capaian kinerja Sub Sektor Peternakan dapat digambarkan secara rinci pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.86
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor
Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016		
			Target	Capaian	%
	Pelayanan Urusan Pilihan				
2.	Peternakan				
2.1	Populasi Ternak				
2.1.1	Sapi (ekor)	14.397	20.872	17.203	82,42
2.1.2	Kerbau (ekor)	-	-	-	-
2.1.3	Kambing /Domba (ekor)	2.764	2.699	2.538	94,03
2.1.4	Babi (ekor)	5.718	6.625	5.881	88,77
2.1.5	Ayam buras (ekor)	345.661	508.770	346.843	68,17
2.1.6	Ayam ras petelur (ekor)	46.500	-	50.794	100
2.1.7	Ayam ras pedaging (ekor)	158.253	249.148	210.115	84,33
2.1.8	Itik (ekor)	41.527	48.485	42.574	87,81
2.2	Produksi Daging Ternak				
2.2.1	Sapi (Ton)	572,24	737,42	625,86	84,87
2.2.2	Kerbau (Ton)	-	-	-	-
2.2.3	Kambing / Domba(Ton)	58,14	61,16	33,02	53,99
2.2.4	Babi (Ton)	94,47	122,16	86,53	70,83
2.2.5	Ayam buras (Ton)	340,50	482,82	400,60	83,53
2.2.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	20,39	100
2.2.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	817,78	947,59	1.031,75	108,89
2.2.8	Itik (Ton)	14,12	15,9	17,09	107,62
2.3	Produksi Telur				
2.3.1	Ayam buras (Ton)	207,98	316,09	212,71	67,29
2.3.2	Ayam Ras Petelur (Ton)	209,25	-	366,39	100
2.3.3	Itik (Ton)	133,19	174,09	176,97	101,65

Sumber : Dinas Pertaniandan Peternakan2016

Tabel 2.87
Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2016

No.	JenisTernak	Satuan	Populasi		
			2015	2016	(%)
1	Sapi	Ekor	14.397	17.203	19,49
2	Kambing/Domba	Ekor	2.764	2.538	-8,18
3	Babi	Ekor	5.718	5.881	2,85
4	Ayam Buras	Ekor	345.661	346.843	0,34
5	Ayam Ras Pedaging	Ekor	158.253	210.115	32,77
6	Ayam Ras Petelur	Ekor	46.500	50.794	9,23
7	Itik	Ekor	41.527	42.574	2,52

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar2016

Selama kurun waktu 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan ikut memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.88
Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016

Kode Rekening	Uraian	Target 2016	Realisasi	
			Rp.	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	435.000.000	314.359.000	72,27
4.1.2	Retribusi Daerah	435.000.000	314.359.000	72,27
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	435.000.000	314.359.000	72,27
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	160.000.000	65.600.000	41
	Retribusi Tempat Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging	160.000.000	65.600.000	41
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :	275.000.000	248.759.000	90,46
	Penjualan Hasil Breeding Farm	25.000.000	25.000.000	100
	Penjualan Hasil Balai Benih Tanaman Pangan	150.000.000	150.259.000	100,17
	Keuntungan Bagi Hasil Penjualan Sapi Turunan (Pedet)	100.000.000	73.500.000	73,50
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	30.000.000	23.500.000	78,33
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	30.000.000	23.500.000	78,33
4.3.6.02	Sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan	30.000.000	23.500.000	78,33
4.3.6.02.01	Sumbangan dari Kelompok Masyarakat	30.000.000	23.500.000	78,33
Jumlah		465.000.000	337.859.000	72,66

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat, Tahun 2017

2.2 Sub Sektor Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 1.075.900 Ha.mempunyai potensi lahan perkebunan seluas 281.780 Ha. Dari luasan tersebut 212.426,46 Ha diantaranya telah ditanami. Secara terperinci potensi lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.89
Potensi Lahan di wilayah Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1.	Konsesi Kehutanan	565.028	52,54
2.	Konsesi Transmigrasi	28.164	2,62
3.	Kawasan Pengembangan	69.696,95	6,48
4.	Konsesi Budidaya Perkebunan	212.426,46	19,78
5.	Kawasan Non Perkebunan	191.309	17,79
6.	Danau dan Sungai	9.142	0,85
Jumlah		1.073.766,41	100

Sumber : Statistik DinasPerkebunan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel 2.90
Luas Areal Perkebunan Per Komoditi di Kab. Ktw. Barat Tahun 2013 - 2016

No	Komoditi	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	Karet	17.451,50	17.907	18.082,50	14.560,30
2	Kelapa	1.176,51	1.069,52	776,75	738,75
3	Lada	875,20	268,95	297,74	318,64
4	Kelapa sawit	184.695,33	173.048,34	192.669,23	196.541,30
5	Nilam	-	-	-	-
6	Lain-lain	313,50	243,50	226,83	268,51
	Jumlah	204.868,62	192.846,56	212.083,05	212.426,46

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat 2016

Tabel .2.91
**Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan
di Kabupaten Kotawaringin Barat 2014 - 2016**

No	Kepemilikan Kebun	2014		2015		2016	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Perkebunan Rakyat	60.859,01	31.55	62.236,92	29,35	58.649,26	27,61
2	Perkebunan Besar Negara	2.220	1,16	2.220	1,05	2.220	1,05
3	Perkebunan Besar Swasta	129.767,55	67.29	147.626,13	69,61	151.557,20	27,61
Jumlah		192.846,56	100	212.083,05	100	212.426,46	100

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat 2016

Tabel. 2.92
Produksi perkebunan per komoditi di Kab. Kotawaringin Barat 2014 - 2016

No.	Komoditi	2014 (Ton)	2015 (Ton)	2016 (Ton)	Keterangan
1.	Karet	7.619,22	7.433,42	7.253,40	Karet Kering
2.	Kelapa	343,83	267,74	265,45	Kopra
3.	Lada	268,95	162,10	156,49	Biji Kering
4.	Kelapa sawit	3.585.307,15	1.096.178,33	2.878.287,21	TBS
5.	Nilam	--	--		Brangkas
6.	Lain-lain	20,24	14,59		

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat 2016

Tabel. 2.93
**Nama Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di Kab. Ktw. Barat
s/d tahun 2016**

No	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
1	PT. Meta Epsi Agro	K. sawit	Plasma (KKPA)	Arsel, Kumai. P. Lada
2	PT. Primasentosa Pratama Putra	K. Sawit	Non PIR	P. Lada
3	PT.Persada Bina Nusantara Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
5	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Arsel
6	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	K. Sawit	Non PIR	P.Banteng-Aruta
7	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng
8	PT. Agro Menara Rahmat	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
9	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Aruta
10	PT. Bumi Langgeng Perdana Trada	K. Sawit	Inti - Plasma	Kumai
11	PT. Bangun Jaya Alam Permai	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng- Aruta
12	PT. Mitra Mendawai Sejati	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan, Aruta

No	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
13	PT. Satya Kisma Usaha	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
14	PT. Kalimantan Sawit Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Kolam
15	PT. Sawit Sumber Mas Sarana	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Aruta, Kolam
16	PT. Surya Sawit Sejati	K. Sawit	Non PIR	P. Lada, Arsel
17	PT. PTPN XIII	Karet	PIR - SUS	P. Banteng
18	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	K. Sawit	Inti-Plasma	Ktw. Lama
19	PT. Arut Sawit Mandiri	K. Sawit	Inti-Plasma	Aruta
20	PT. Andalan Sukses Makmur	K. Sawit	Inti-Plasma	Kumai

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel. 2.94
Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kec. P. Lada	60	60
2	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	60	60
3	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	60	60
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kec. Arut Utara	45	45
5	PT. Sabut Mas Abadi	Kec. P. Lada	30	30
7	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	120	120
8	PT. Sawit Sumbermas Sarana-I	Kec. Arut Selatan	90	90
9	PT. Sawit Sumbermas Sarana-II	Kec. Arut Selatan	90	90
10	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Kec. Arut Selatan	45	45
11	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Kec. Kolam	90	60
12	PT. Bumi Langgeng	Kec. Kumai	45	45
13	PT. Surya Sawit Sejati	Kec. Kumai	60	60
14	PT. Mitra Mendawai Putra	Kec. Arsel	60	60

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel. 2.95
Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	7,5	7,5
2	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	7,5	7,5
3	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	15,0	15,0
4	PT. Mitra Mendawai Sejati	Kec. Arsel	7,5	7,5

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel. 2.96
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
		Luas Areal (ha)	Produk si (ton)	Luas Areal (ha)	Produk si (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	2.378,50	614,32	91,25	25,62	4.293,81	7.121
2	Ktw. Lama	1.521	496,98	92	60,12	18.631,38	21.115,83
3	Kumai	2.020	465,80	280	67,37	6.031,13	9.747,35
4	Arut Utara	1.026	152,29	11,50	5,22	1.349	1.200,37
5	P. Banteng	6.292,01	2.665,87	128	51,92	1.431	2.732,10
6	P. Lada	1.890,99	1.116,05	136	55,20	13.247,78	26.515,56
Jumlah		15.862,50	5.633,42	738,75	265,45	44.984,10	68.432,21

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel. 2.97
Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada Per Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Kopi		Lada	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	23	1,49	0	0
2	Kotawaringin Lama	33,75	2,10	130,36	71,83
3	Kumai	22	1,21	16	6,71
4	Arut Utara	0	0	5,70	2,46
5	Pangkalan Banteng	38,88	4,60	86,24	45,07
6	Pangkalan Lada	36,88	1,93	80,30	30,42
Jumlah		154,51	11,33	318,60	156,49

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel. 2.98
Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren Per Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Jambu Mete		Aren	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kotawaringin Lama	0	0	99	1,90
2	Arut Selatan	0	0	0	0
3	Kumai	14	0,40	0	0
4	Pangkalan Banteng	0	0	0	0
5	Pangkalan Lada	0	0	0	0
6	Arut Utara	0	0	0	0
Jumlah		14	0,40	99	1,90

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel. 2.99
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian subsektor Perkebunan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
A.	<i>Perkebunan</i>				
1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	21,61***	37**	21,61	58,41
2	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	88,62***	79,50**	88,60	111,45
3	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	189.439,16***	199.182,20**	189.439,16	95,11
4	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	55.160***	79.820**	55.160	69,11
5	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	15	15**	15	100
6	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.447.807.384*	11.500.000.000	12.447.807.384	108,24
7	Kemitraan/Plasma	28.785,91*	25.957,91**	28.785,91	110,89
B.	Pengembangan/perluasan areal perkebunan	212.426,46	225.833,35**	212.426,46	94,06

No	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
1	Karet	14.560,30	18.284**	14.560,30	99,44
2	Kelapa sawit	196.541,30	204.908,65**	196.541,30	95,92
3	Kelapa	738,75	1.205**	738,75	61,31
4	Lada	318,60	1.042,20**	318,60	30,57
5	Lainnya	267,51	393,5**	267,51	67,98
C.	Produksi komoditi perkebunan				
1	Karet (lump)	7.253,83	15.600**	7.253,83	46,50
2	Kelapa (kopra)	265,45	347**	265,45	76,50
3	Kelapa Sawit (Tbs)	2.974.134,28	4.550.000**	2.974.134,28	65,37
4	Lada (putih/hitam)	156,49	432**	156,49	36,22
5	Lainnya	13,63	23,4**	13,63	58,25

Catatan : * Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat
 ** Data Renstra 2012-2016
 *** Data Statistik daerah 2016

3. URUSAN KEHUTANAN

Ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, sumber daya hutan, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, kelestarian hutan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2016 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya berdasarkan SK Menhut No. 529 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.100
Luas Potensi Hutan Kab. Kotawaringin Barat
Berdasarkan (SK MENHUT NO: SK.529/Menhut-II/2012
Tgl 25 September 2012)

No.	Fungsi	Luas (Ha)	%
1	Arel Penggunaan Lainnya (APL)	235.731	23,90
2	Hutan Lindung (HL)	9.698	1
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	156.003	15,8
4	Hutan Produksi (HP)	257.045	26,10
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	49.314	5

6	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	16.482	1,70
7	Kawasan Suaka Alam /Pelestarian Alam (KSA/PA)	239.091	24,30
8	Sungai	22.073	2,20
	Jumlah	985.437	100

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.101
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

N o.	Indikator	2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	100	3.041	-	-
2.	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)(Ha)	-	-	-	-
3.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	155,25	100	25	25
4.	Penanganan Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.400	1.000	300	100

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat 2016

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari target RPJMD seluas 3.041 Ha sebagian besar belum bisa dilaksanakan disebabkan RTRWK belum ditetapkan dan banyak lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan corporate. Penataan kawasan KPHP tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya penataan kawasan hutan yang sesuai dengan RTRWK Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.102
Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2013 - 2016

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M³)			
	2013	2014	2015	2016
Kayu Meranti	27.689,61	40.219,03	38.608,07	-
Kayu Rimba Campuran	2.772,03	6.223,98	5.741,29	-
Kayu Indah	-	-	-	-
Jumlah	30.461,64	46.443,01	44.349,36	-

Catatan : untuk tahun 2016, karena urusan kehutanan sudah menjadi kewenangan Provinsi, maka dinas Kehutanan Kabupaten tidak dapat memenuhi data tersebut karena sudah tidak ada laporan yang masuk dari perusahaan/industri kayu ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Secara umum sektor energi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari beberapa indikator seperti produksi listrik dan distribusi listrik. Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 77,72 % rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 1,65 % menggunakan listrik non PLN. Selain dua sumber penerangan tersebut, terdapat sumber penerangan lain yaitu petromak 20,63 %, maka kondisi untuk tahun 2016 ini dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat maka target yang diinginkan secara keseluruhan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun non PLN sebagai sumber penerangan utama tahun 2015 mencapai 77,72 %. Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2016 diarahkan pada peningkatan pembangunan penyediaan jaringan distribusi listrik melalui kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan dalam 3 jenis komoditas tambang, yaitu Batubara, mineral logam, dan mineral non logam dan batuan.

Potensi Batubara di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Arut Selatan (Desa Runtu) dan Kecamatan Kotawaringin Lama.

Mineral logam meliputi emas dan biji besi, sementara mineral non logam dan batuan meliputi pasir zirkon, kecubung, kaolin, tanah urug, pasir, sirtu, batu belah dan lainnya.

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah dari mineral logam seperti emas yang memiliki potensi di wilayah Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Sementara untuk mineral non logam dan batuan seperti Pasir Kwarsa dan Zirkon terdapat di Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Kotawaringin Lama. Potensi potensi mineral bukan logam dan batuan seperti Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis, Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu, pasir kwarsa, tanah liat dan batu belah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Agar pemanfaatan hasil Sumberdaya Alam yang lebih maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kiranya perlu

penelitian dan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap potensi sumber daya alam yang ada untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas zircon sand (pasir zirkon) dengan nilai ekspor tahun 2014 mencapai Rp. 2.069.600.000 sedangkan tahun 2015 dengan capaian Rp. 2.779.600.000 dan tahun 2016 dengan capaian Rp. 2.489.200.000 maka total ekspor bahan galian zircon dari tahun 2014, sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 7.338.000.000 dengan volume ekspor 36.790 ton, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

Uraian	Produksi (Ton)			Volume Ekspor (MT)			Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
) Zircon Sand	10.346	13.998	12.446	10.346	13.998	12.446	2.069.200	2.779.600	2.489.200
) Lump	-	-	-	-	-	-	-	-	-
) Ore Zink	-	-	-	-	-	-	-	-	-
) Iron Ore	-	-	-	-	-	-	-	-	-
) Ilmenite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.346	13.998	12.446	10.346	13.998	12.446	2.069.200	2.779.600	2.489.200

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kobar 2016

Kegiatan pertambangan tersebut dalam skala besar diusahakan oleh perusahaan swasta sedangkan dalam skala kecil merupakan kegiatan pertambangan rakyat. Semenjak diberlakukannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Tahun anggaran 2016, tidak menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.

5. URUSAN PARIWISATA

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas beberapa, yaitu:

- a. Wisata alam, antara lain Taman Nasional Tanjung Puting, Air Terjun Patih Mambang, Arung Jeram, Danau Gatal dan Danau Masorayan;
- b. Wisata sejarah/budaya/religi, antara lain Istana Kuning, Astana Al-Nursari, Istana Mangkubumi, Palagan Sambu, Masjid Kyai Gede, Makam Kyai Gede, Makam Kuta Tanah, Batu Petahan dan Tiang Pantar;
- c. Wisata bahari antara lain Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, dan Tanjung Penghujan;

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi icon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat. Namun demikian untuk tahun 2016 mengalami penurunan dimana untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2015 sebanyak 9.767 orang dan tahun 2016 turun menjadi 8.942 orang sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2015 sebanyak 2.797 orang dan tahun 2016 naik menjadi 6.164 orang sedangkan untuk lama kunjungan wisatawan dari 1 hari menjadi2 - 3 hari.

Obyek wisata sejarah, budaya dan religi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2015 sebanyak 50.717 orang dan pada tahun 2016 naik menjadi 72.754 orang.

Tabel 2.104
Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
1	Pantai Kubu dan Tanjung Keluang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan alam
2	Pantai Teluk Bogam	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
3	Tanjung Penghujan	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
4	Istana Kotawaringin	Kec. Ktw. Lama	Sejarah	Barang Kuno/Antik peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
5	Istana Kuning	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Kerajaan yang dipindahkan dari Kotawaringin
6	Mesjid Kyai Gede	Kec. Ktw. Lama	Religi	Mesjid Kuno Peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
7	Tudung Saji dan Batu Kecubung	Kec. Arut Selatan	Budaya/Seni	Nilai Seni

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
8	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam, serta Pusat Rehabilitasi Orang Utan dan Satwa Langka lainnya
9	Pantai Sei Uambang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
10	Danau Burung	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
11	Danau Gatal	Kec. Ktw. Lama	Alam	Keindahan Alam
12	Upacara Tiwah	Kec. Arut Utara	Budaya	Upacara Tradisional Suku Dayak
13	Riam Senamang	Kec. Arut Utara	Alam	Keindahan Alam
14	Palagan Sambu	Kec. Arut Utara	Sejarah	Nilai Sejarah

Sumber : Laporan Penyusunan Data Base Spasial Potensi Pariwisata Kalimantan Tengah

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya obyek wisata Taman Nasional Tanjung Putting. Pada Tahun 2015 jumlah wisatawan 12.564 orang (terdiri atas 9.767 wisatawan mancanegara dan 2.797 wisatawan nusantara) turun sebesar 21,65 % dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 16.035 orang (terdiri atas 11.000 wisman dan 5.035 wisnus). Dimana terdapat pula kunjungan dari kapal pesiar pada bulan September, Oktober dan November yang terdiri dari Kapal Cruise Orion I sebanyak 4 kali $\pm$ 392 orang, *Yacht Rally Sail* Indonesia sekitar 18 kapal $\pm$ 91 orang dan *Yacht Rally Odyssey* 9 kapal $\pm$ 20 orang. Penurunan jumlah wisatawan dikarenakan krisis Ekonomi Eropa dan adanya bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan retribusi meningkat terutama TNTP, karena adanya perubahan tarif masuk.

6. URUSAN INDUSTRI

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Industri pada perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang berasal dari sector industry pengolahan terutama industry besar. Sektor Industri menempati urutan ke tiga setelah sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian

Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2016, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu dan bahan dari kayu berupa *plywood* dan *moulding* yang nilainya pada tahun 2013 mencapai 154.742.687,27 USD, pada tahun 2014 nilai ekspor sebesar 80.384.733,38 USD, tahun 2015 mencapai

94.346.892,17 USD dan pada tahun 2016 turun menjadi 79.147.364,25 USD dimana jumlah produksi pada tahun 2013 sebesar 147.413,3316 m3,, tahun 2014 sebesar 159.122,0999 m3, tahun 2015 sebesar 580.321.9909 m3, tahun 2016 sebesar 529.028,4520 m3

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Prodiuksi Kayu Olahan

Produk	Jumlah Produksi (dalam m³)			
	2013	2014	2015	2016
Plywood & Moulding	146.247,3055 1.166,0261	157.218,0200 1.904,0799	191.647,6977 388.674,2932	529.028,4520
Jumlah	147.413,3316	159.122,0999	580.321.9909	529.028,4520

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat 2016

Tabel 2.106
Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

Produk	Nilai Ekspor (dalam USD)			
	2013	2014	2015	2016
Plywood & Moulding	154.310.965,28 431.721,99	79.458,726,93 926.006,45	84.108.278,7210.238.613,45	79.147.364,25
Jumlah	154.742.687,27	80.384.733,38	94.346.892,17	79.147.364,25

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat 2016

Adapun masalah lain yang dihadapi IKM dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan SDM pelaku IKM potensial melalui pelatihan-pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan keuangan daerah terkait devisa anggaran.

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih di dominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2016 sebanyak 590 unitdengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.807 orang. Kondisi tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Perkembangan Potensi IKM Tahun 2013 – 2016

No.	Potensi IKM	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi sektor industri terhadap	%	13,87	13,20	25,24**	25,30**

No.	Potensi IKM	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
	PDRB					
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	6,52	5,22	6,2**	4,82**
3.	Jumlah Unit Usaha	unit	509	536	573	590
4.	Penyerapan Tenaga Kerja	orang	1,549	1.643	1.756	1.807
5.	Nilai Investasi	Rp.	67,704,825	74,591,109	79.737.889	82.035.421
6.	Nilai Produksi	Rp.	118,444,438	112,119,149	119.855.369	123.308.829
7.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Klpk	7	16	19	0

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat
 ** BPS Kotawaringin Barat

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Industri adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.108
Perkembangan Jumlah Industri di Kab. Ktw. Barat Tahun 2014 – 2016

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah			+ / (-)
		Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	
1	Industri Kecil	536	573	590	17
2	Industri Menengah	-	-	-	-
3	Industri Besar	29	35	35	-

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat

Untuk industri menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum ada, karena kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta – Rp. 10 Milyar di luar tanah dan bangunan.

4.2.7. URUSAN PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua pada pembentukan PDRB setelah sektor pertanian. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya. Sektor Perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Sebagaimana arah kebijakan nasional bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perdagangan khususnya Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan ekspor.

Tabel 2.109
Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013- 2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Nilai (US\$)	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99	120.298.709,60
Volume (m ³)	147.413,3316	157.437,0798	517.458,6212	-
Volume (MT)	851.858,935	622.696,302	554.615,120	-

Sumber:Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

Dengan berlakunya kebijakan pemerintah pusat bahwa pengelola data export-import menjadi kewenangan BPS maka Dinas Perindag tidak dapat menyajikan informasi realisasi volume export tahun 2016 secara lebih detail dan tepat waktu. Realisasi nilai ekspor pada tahun 2016 sebesar 120.298.709,60 US\$. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar 186.428.669,99 US\$ mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 66.129.960,39 US\$ (-35,47 %), Pelemahan ekonomi secara internasional masih berdampak sehingga volume permintaan produk export ikut mengalami penurunan.

Komoditas yang diekspor mencakup 3 jenis komoditi utama terdiri dari ⁽¹⁾Kayu, barang dari kayu, ⁽²⁾Lemak & minyak hewan/nabati dan ⁽³⁾Bijih, kerak, dan abu logam dengan tujuan ekspor antara lain ke negara Asean, Eropa, Timur Tengah, China, Jepang dan India

Untuk meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. Hal ini menjadi konsentrasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar yang mana perdagangan adalah merupakan urusan pilihan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pada program ini Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Menjadi leading sektor pada Penanganan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.2.8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Transmigrasi merupakan salah satu cara atau metode untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, telah diamanatkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya.

Untuk itu penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*. Artinya, pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai daerah penerima calon transmigran, telah bekerjasama dengan daerah pengirim dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Tabel 2.110
Data Transmigran dan Penempatannya

No.	Daerah Asal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Waktu Penempatan	Lokasi Penempatan
I	Transmigrasi Penduduk Asal				
1.	Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	10	49	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat	10	37	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	5	28	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
4.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	10	38	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
5.	Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	15	58	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
6.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	25	103	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
7.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	25	74	02-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai

No.	Daerah Asal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Waktu Penempatan	Lokasi Penempatan
8.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	15	60	03-12-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
9.	Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah	10	34	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
10.	Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah	15	54	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
II Transmigrasi Penduduk Setempat					
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	75	322	16-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	25	100	09-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	35	138	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
Jumlah		275	1.095		

Sumber : Disnakertrans Kab. Kotawaringin Barat

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 yang akan datang adalah, sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi/kabupaten yang bersifat *mandatory*.

1. Masalah Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan

- Peningkatan jumlah angkatan kerja kurang diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
- Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah

penduduk miskin, meskipun secara prosentase angka kemiskinan mengalami penurunan.

- Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah berkisar 10 % .
- Struktur perekonomian didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, sub sektor perkebunan), dan belum berkembangnya sektor sekunder (sektor industri pengolahan).
- Pengelolaan sektor pertanian arti luas (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan) sebagian besar masih dikelola secara tradisional.

Z Masih parsialnya pengelolaan destinasi pariwisata

2. Masalah Pendidikan

Z Kurang meratanya penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat SD, SMP, SMA/SMK.

Z Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Z Target standar pelayanan minimal (SPM) Bidang pendidikan belum mampu dipenuhi seluruhnya.

Z Penerapan sistem kurikulum berbasis kompetensi masih belum optimal.

Z Kurangnya pelayanan pendidikan di daerah pedalaman/ terpencil/terpinggir.

3. Masalah Kesehatan

Z Belum meratanya status dan akses pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah.

Z Masih kurangnya tenaga medis dan paramedis.

Z Target standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum tercapai seluruhnya.

Z Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, penyakit degeneratif dan penyebaran HIV/ AIDS.

Z Masih adanya kasus kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular (demam berdarah dan diare)

4. Masalah Pembangunan Prasarana Wilayah

Z Kurang optimalnya pelayanan angkutan perkotaan di Pangkalan Bun.

Z Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah dalam kabupaten.

Z Terbatasnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

- Z Kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya kelistrikan sampai daerah terpencil.
- Z Kurang berfungsinya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
- Z Belum terintegrasinya penanganan Pamsimas pada daerah-daerah rawan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.

5. Masalah Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- Z Tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan secara signifikan.
- Z Tingginya intensitas kebakaran hutan dan lahan.
- Z Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang.
- Z Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.
- Z Belum optimalnya penanganan sampah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.111
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
	a.Tataran Pengambil Kebijakan				
		Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Wajib	Kerjasama pemerintah dan masyarakat	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
		Keselaranan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangkapengembangan otonomi daerah	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
		Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD serta stakeholders kabupaten	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
		Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat terhadap ketaatan hukum	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
		Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD serta stakeholders kabupaten	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
		Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD serta stakeholders kabupaten	Dana Bagi hasil dari propinsi tidak sesuai rencana yang telah dijadwalkan
		Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat terhadap ketaatan hukum	Kecukupan personil, sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD	Wajib	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat terhadap ketaatan hukum	Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kabupaten dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran
		Pengelolaan potensi daerah	Wajib	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan potensi daerah lebih produktif
		Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Pengembangan Strategi Inovasi Daerah (SID) masih dianggap belum memiliki peran strategis, dimana proses Rencana dan Design masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah

	b.	Tataran Pelaksana Kebijakan			
		Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Wajib/pilihan		
		Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib/pilihan	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan potensi daerah lebih produktif
		Tingkat capaian SPM	Wajib/pilihan	Rujukan dan asistensi SPM dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk SPM di setiap SKPD	Keterbatasan sumber daya daerah (SDM dan kapasitas keuangan daerah) dalam pencapaian target SPM
		Penataan kelembagaan daerah	Wajib/pilihan	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Keterbatasan sumber daya daerah (SDM dan kapasitas keuangan daerah)
		Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib/pilihan	Regulasi pemerintah pusat	Masih terjadi perbedaan penafsiran peraturan kepegawaian dalam implementasi di daerah
		Perencanaan pembangunan daerah	Wajib/pilihan	Sumber Daya Perencanaan (SDM, Kapasitas Keuangan dan sistem)	Masih belum meratanya kapasitas sumber daya perencanaan di tingkat SKPD dan masyarakat, sehingga mempengaruhi kualitas output perencanaan
		Pengelolaan keuangan daerah	Wajib/pilihan	Kapabilitas pemerintah kabupaten dalam inovasi peningkatan PAD	Ketergantungan sumber penerimaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui dana DAU sebesar 58,31 % dari struktur APBD
		Pengelolaan barang milik daerah	Wajib/pilihan	Pemisahan aset dalam neraca pemerintah daerah	Belum tertibnya administrasi aset daerah
		Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat	Wajib/pilihan	Sumber daya pemerintah daerah	Belum ada permasalahan yang mendesak
II	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
		Kesejahteraan masyarakat			
		Pelayanan umum	Urusan Pendidikan	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat untuk terselenggaranya layanan prima pendidikan di kotawaringin barat untuk membentuk	Masih rendahnya APK/APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA serta masih rendahnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi

				insan yang cerdas komprehensif"	
			Urusan Kesehatan	Komitmen pemerintah DPRD, dan masyarakat untuk terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, berkeadilan dan jaya.	Perlu peningkatan terhadap indikator-indikator derajat kesehatan
			Pekerjaan Umum	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Keterbatasan anggaran pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dibandingkan dengan panjang jalan yang ditangani
			Perumahan	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Perlu penataan kawasan perumahan dan permukiman
			Penataan ruang	Komitmen dan informasi yang transparan dan aksesibilitas tentang tata ruang dan tata guna ruang wilayah dan tata ruang kota beserta sanksi bagi pelanggaran	Belum disahkannya Perda RTRW dan Rencana Rinci Ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang serta alih fungsi ruang dan Masih adanya konflik sengketa tanah/lahan.
			Perencanaan Pembangunan	Konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efisien, efektif dan ekonomis	Kualitas database perencanaan SKPD yang belum sepenuhnya mampu menjadi bahan perencanaan tingkat kabupaten
			Perhubungan	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Banyaknya kendaraan dengan beban muatan berlebih yang menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan jalan
			Lingkungan Hidup	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk masih kurang ideal
			Pertanahan	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro	Belum disahkannya Perda RTRW dan Rencana Rinci Ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang

				growth, pro job, pro poor, dan pro environment	serta alih fungsi ruang dan Masih adanya konflik sengketa tanah/lahan.
			Kependudukan dan PS	1. Pembangunan dan pengoperasian Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) secara terpadu, dilakukan pembersihan data ganda antara data kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP elektronik untuk mendapatkan data akurat pemilihan Gubernur 2015. 2. Terlaksananya sosialisasi Administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui : a. Media cetak dengan penyebaran leaflet dan poster b. media elektronik yaitu siaran radio yang disiarkan secara berkala dan running teks SBTv c. Penyuluhan/ sosialisasi langsung ke masyarakat kelurahan dan desa. 3. Penyusun kebijakan kependudukan, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi, dengan keputusan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan sipil agar kualitas database kependudukan semakin baik.	1. Kendaraan dinas roda 2 untuk operasional belum mencukupi; 2. Belum ada gedung untuk pelayanan administrasi kependudukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selama ini masih menggunakan aula kantor Disdukcapil. 3. Jumlah pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai, dan pengelola SIK masih kurang. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki. 5. Upgrade Program SIK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIK; 6. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP, KK dan Akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang

					terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data; 7. Belum optimalnya kinerja aparatdesa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan. 8. Kelengkapan sarana dan prasarana (perangkat KTP-el) dan jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten belum optimal, sehingga menghambat pencapaian perekaman KTP-el kepada masyarakat dan jaringan komunikasi data kecamatan ke kabupaten. 9. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukab (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Disdukcapil tiap tahunnya.
			Pemberdayaan Perempuan dan PA	Komitmen pemerintah dan DPRD akan pelaksanaan pembangunan kesetaraan dan keadilan gender serta implementasi Kabupaten Menuju Layak Anak	1. Kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender. 2. Maraknya sex bebas pada anak usia sekolah.

			Keluarga Berencana dan KS	Komitmen pemerintah kabupaten akan pembangunan berwawasan kependudukan serta kesadaran dan partisipasi masyarakat	A. Keluarga Berencana 1. Seorang PKB membina 3-4 desa (SPM 1 PKB membina 1-2 desa) 2. Tenaga PPKBD sering berganti-ganti. 3. Register PUS desa tidak terdata maksimal. B. Keluarga Sejahtera 1. Kader tribina kurang maksimal bekerja. 2. Tidak semua PKB bisa membina kegiatan Tribina
			Sosial	Komitmen pemerintah kabupaten akan pembangunan berwawasan kependudukan serta kesadaran dan partisipasi masyarakat	Masih terdapatnya Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar yang bukan penduduk lokal
			Ketenaga-kerjaan	Tumbuhnya kesadaran kewirausahaan baru dan transformasi tingkatan usaha mikro, kecil dan menengah	Kurang sesuainya kualifikasi angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja
			Koperasi dan UMKM	Sinergitas antara gerakan koperasi, pemerintah, BUMN dan BUMD Kerjasama dengan praktisi pengembangan usaha	Masih rendahnya SDM pengawas, dan pengurus koperasi, teknologi, permodalan, pemasaran dan kemitraan Masih rendahnya inovasi Koperasi-UMKM dan kurangnya dukungan pemasaran produk
			Penanaman modal	Kemudahan dan kepastian hukum di bidang perijinan dan non perijinan	Belum adanya pelimpahan pelayanan perijinan dan non perijinan secara menyeluruh
			Kebudayaan	Penguatan budaya lokal dalam membangun karakter pembangunan kabupaten	Budaya lokal belum sepenuhnya menjadi sumber daya industri pariwisata dan belum optimalnya implementasi muatan budaya lokal pada kurikulum sekolah

			Pemuda dan OR	Pembangunan karakter terhadap generasi muda, sarana prasarana olah raga dan pembinaan olah raga	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan, potensi pengaruh negatif narkoba, menurunnya jiwa nasionalisme, serta belum optimalnya pembinaan cabang olah raga (sarana prasarana olah raga tidak merata, kurangnya kompetisi kelompok umur, target dan capaian target tidak jelas)
			Kesbangpol dalam negeri	Harmonisasi antar elemen masyarakat dan kerja sama antara aparat pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat	Masih adanya potensi konflik yang sewaktu-waktu mungkin terjadi
			Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Perencanaan program/ kegiatan bidang pemerintahan yang didasarkan pada landasan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) seperti pengembangan <i>e-government</i>	Masih perlu peningkatan kapabilitas dan kreasi pemanfaatan peluang mengatasi keterbatasan dengan menjalin kemitraan dengan pihak diluar pemerintahan
			Perpustakaan	Ketersediaan sarana prasarana, SDM, kesadaran masyarakat	Masih rendahnya minat baca dan terbatasnya koleksi buku-buku serta sarana prasarana
			PILIHAN		
			Pertanian	SDM petani dan penyuluh, sumber daya alam (lahan, iklim dan air), sarana prasarana dan kebijakan di bidang pertanian	SDM Petani masih rendah, kondisi lahan tanaman pangan yang marginal, kurang berfungsinya irigasi dan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
			Pariwisata	SDM kepariwisataan, sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata	Pelaksanaan program pariwisata yang masih parsial/ego sektoral, belum optimalnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata dan sumber daya manusia kepariwisataan.
			Perdagangan	Sarana prasarana perdagangan, pengelolaan sarana prasarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan	Rendahnya kemampuan SDM pelaku usaha sektor perdagangan usaha kecil dan menengah
			Perindustri-an	Kerja sama industri kecil, industri menengah, industri	Kurangnya kerja sama antar pelaku industri dan masih rendahnya

				besar dan pemerintah	daya saing industri
		Daya saing daerah	Wajib/ pilihan	Keamanan, kemudahan investasi dan kepastian hukum	Belum adanya regulasi tentang insentif bagi investor dan belum selasainya evaluasi perda RTRW Kabupaten
III		Daerah Otonomi Baru			
		Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Wajib/ pilihan	-	
		Pengisian personil	Wajib/p ilihan	-	
		Pengisian keanggotaan DPRD	Wajib/ pilihan	-	
		Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan	Wajib/ pilihan	-	
		Pembiayaan	Wajib/ pilihan	-	
		Pengalihan aset dan dokumen	Wajib/ pilihan	-	
		Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Wajib/ pilihan	-	

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibentuk oleh pergerakan kontribusi masing-masing sektor yang menunjukkan struktur ekonomi. Secara riil, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2016 sebesar 5,81% bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 7,32%, maka pertumbuhannya melemah sebesar 1,51%. Pada 2017 perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,00 – 6,20%.

Dengan menggunakan pendekatan *trend* data PDRB atas dasar harga konstan (AHK) tahun dasar 2010, pada tahun 2012-2016, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 hingga tahun 2018 diprediksikan tumbuh di kisaran 11.341.934,07 juta rupiah sampai 12.045.133,98 juta rupiah.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2013-2018

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*	2017^p	2018^p
Pertumbuhan Ekonomi	6,70%	6,99%	6,90%	7,32%	5,81%	6,00-6,20%	6,20-6,40%

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

Σ : angka sementara

^p : angka proyeksi

Dilihat secara sektoral, berdasarkan hasil penghitungan PDRB AHK 2010, pada umumnya sektor ekonomi memiliki angka pertumbuhan yang positif meskipun sedikit melemah pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Sektor yang mencatat angka pertumbuhan tertinggi adalah sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum 8,84%, sektor Informasi dan komunikasi sebesar 7,77% dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,08%. Namun angka ini tidak berpengaruh banyak pada pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, karena kontribusi ketiga Sektor tersebut relatif kecil, namun demikian Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebesar 27,22%, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sektor ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh kegiatan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Adapun sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan PDRB Tahun 2016 lebih tinggi dari Tahun 2015, yakni : Sektor Pertambangan dan Penggalian dari 1,47% menjadi 7,48%, Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,88%

tumbuh menjadi 6,08%. Sektor Jasa lainnya dari 6,77% menjadi 6,96%. Sektor Informasi dan komunikasi dari 7,68% menjadi 7,77%.

Sektor-sektor lain tercatat mengalami pertumbuhan lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dari 8,85% menjadi 8,71%, Sektor transportasi dan pergudangan dari 6,90% menjadi 6,71%, Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari 8,77% menjadi 7,08%, Sektor industri pengolahan dari 6,95% menjadi 4,97%, Sektor real estate dari 8,78% menjadi 6,53%, Sektor jasa perusahaan dari 7,09% menjadi 4,15%, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dari 8,20% menjadi 5,03%, Sektor konstruksi dari 8,69% menjadi 5,48%, Sektor jasa pendidikan dari 7,86% menjadi 4,47%, Sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dari 9,22% menjadi 4,86%, Sektor jasa administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dari 9,96% menjadi 4,91%, Sektor jasa keuangan dan asuransi dari 9,96% menjadi 4,08% dan Sektor listrik, gas dan air minum dari 16,58% menjadi 5,55%.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi tertinggi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 27,22%, sedangkan Sektor yang memberikan kontribusi yang paling rendah terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 0,05%.

Sektor lain yang juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,10%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,33%, Sektor Kontruksi sebesar 8,73%, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,27%, begitu juga Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi sebesar 5,01%., ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mulai mengarah keindustrialisasi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

a. Struktur Ekonomi dan Distribusi Persentase Persektor

Dilihat dari proporsi persektor, PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan proporsi pada tahun 2015 sebesar 26,38% dan sebesar 26,11% pada tahun 2016. Memperhatikan rata-rata pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB atas dasar harga berlaku (AHB) 2012 - 2016 terdapat kecenderungan bahwa proporsi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan 29,80% di tahun 2012 menjadi 26,11% pada tahun 2016.

Proporsi sektor Industri pengolahan dari tahun 2012 - 2014 mengalami peningkatan, kemudian terus menurun hingga tahun 2016, dari 25,72% di tahun 2014 menjadi 25,32% di tahun 2016.

Proporsi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan dari 11,91% menjadi 12,67%.

Dari ketiga sektor penyumbang terbesar PDRB tersebut diatas, dapat dilihat bahwasanya proporsi sektor perdagangan semakin meningkat seiring penurunan proporsi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan. Hal ini disebabkan produk dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sudah mengalami prosesing lebih lanjut menjadi produk olahan/olahan setengah jadi, sehingga kontribusi PDRB sektor pengolahan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin menurun.

Diperkirakan sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan proporsinya akan tetap sebesar 26,11% pada tahun 2017 dan 2018. Penurunan nilai tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan, namun hanyalah pergeseran persentase/komposisi. Hal tersebut harus dibaca bahwa sektor ekonomi lainnya juga mengalami pertumbuhan yang melebihi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga menyebabkan peningkatan persentase/proporsi di sektor lainnya, inilah yang menyebabkan proporsi atau persentase sektor pertanian menjadi bergeser, sebab persentase akhir PDRB secara total adalah tetap 100%. Sementara secara nominal, nilai sumbangan/kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB dalam rupiah selalu mengalami peningkatan (pada tahun 2015 sebesar Rp.3.449.449.600.000,00 diproyeksikan menjadi Rp.5.456.579.920.000,00 pada tahun 2019).

Secara riil, pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cukup baik, subsektor perkebunan yang sudah stabil terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Sedangkan subsektor perikanan, tanaman pangan, tanaman hortikultura dan peternakan juga digenjot agar dapat meningkatkan produktivitasnya.

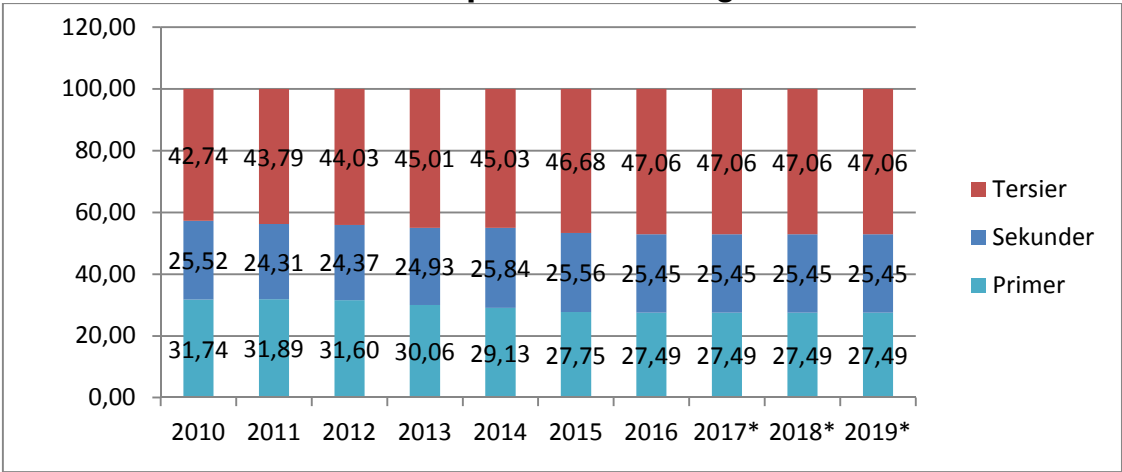
Sektor Industri Pengolahan berada di posisi kedua dengan proporsi sebesar 25,32%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan proporsi tiga terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 12,67%. Sektor konstruksi menempati

urutan ke empat dengan menyumbang sebesar 8,48%. Kelima, Sektor transportasi dan pergudangan menyumbang sebesar 8,41%, serta diikuti Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menempati urutan ke enam sebesar 5,26%.

Keenam sektor diatas merupakan sektor-sektor yang diperkirakan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2017. Sedangkan sektor lainnya memberikan kontribusi < 5,26%, yakni Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 3,25%, Sektor Jasa Pendidikan dengan kontribusi sebesar 2,59%, Sektor real estate dengan kontribusi sebesar 1,88%, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar 1,38%, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,15%, dan yang memberi kontribusi kurang dari 1% yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor jasa lainnya masing-masing sebesar 0,97%, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur ulang sebesar 0,09%, dan Sektor Listrik, Gas dan Air minum serta sektor Jasa Perusahaan masing-masing sebesar 0,05%.

Sementara itu apabila distrukturkan, pada periode 2010-2019, terlihat kecenderungan terjadi pergeseran proporsi. Secara perlahan, proporsi sektor primer dan sektor sekunder semakin lama semakin menurun, sementara sektor tersier semakin lama semakin meningkat. Sebagaimana ciri wilayah yang maju, PDRB lebih didominasi oleh sektor sekunder utamanya sektor industri pengolahan, melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat maka sektor sekunder perlu diperbaiki dengan penguatan aktivitas hilir pada sektor primer, utamanya dengan membenahi sektor industri pengolahan. Langkah ini diharapkan memberikan efek domino, yakni meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk sektor primer dan secara otomatis juga akan mendorong kinerja sektor tersier menjadi lebih baik.

Gambar 3.1
Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2010-2019



Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

b. Dukungan Investasi untuk Mencapai Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu ditetapkan dalam suatu periode perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan. Pada tahun perencanaan 2017* dan 2018*, angka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran 6,00% dan 6,20%. Untuk mencapai target/perkiraan yang ditetapkan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai sektor untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi secara riil.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan faktor produksi, antara lain meningkatkan modal atau lazim disebut investasi. Berdasarkan penghitungan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2009-2013, diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat cukup kondusif untuk berinvestasi, ditunjukkan dengan rendahnya angka ICOR akumulasi sebesar 1,52. Artinya jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6,20% pada tahun 2018, dengan menggunakan data dasar perhitungan PDRB AHK 2010, maka dibutuhkan investasi sebesar Rp.18.308.603.649.600,00 (proyeksi PDRB 2018 x nilai ICOR).

Untuk mendorong Kabupaten Kotawaringin Barat agar mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar target yang telah diproyeksikan pada tahun 2018 yakni 6,20%, diskenariokan memerlukan dukungan investasi sebesar Rp.18.308.603.649.600,00. Investasi tersebut dapat diarahkan pada sektor :

1. Dalam upaya pemerataan struktur ekonomi diarahkan investasi ke sektor sekunder yaitu industri pengolahan, listrik, gas, air minum, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dikarenakan sektor ini masih kecil kontribusi PDRB-nya, dengan meningkatnya investasi disektor sekunder, pergerakan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat semakin baik.
2. Dilihat dari sisi bisnis, maka investasi diarahkan ke sektor tersier (sektor jasa-jasa), karena sektor ini memiliki angka ICOR paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya, artinya investasi pada sektor ini paling menguntungkan dibandingkan berinvestasi pada sektor lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.745.466,5	27,15	2.912.562,4	27,22	3.087.316,14	27,22	3.278.729,74	27,22	3.488.568,45	27,22
B	Pertambangan dan Penggalian	133.371,6	1,32	143.353,1	1,34	151.954,29	1,34	161.375,45	1,34	171.703,48	1,34
C	Industri Pengolahan	2.558.264,8	25,30	2.685.480,4	25,10	2.846.609,22	25,10	3.023.099,00	25,10	3.216.577,33	25,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.447,9	0,05	5.750,2	0,05	6.095,21	0,05	6.473,12	0,05	6.887,39	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.896,0	0,09	9.343,1	0,09	9.903,69	0,09	10.517,71	0,09	11.190,85	0,09
F	Konstruksi	885.898,2	8,76	934.460,2	8,73	990.527,81	8,73	1.051.940,54	8,73	1.119.264,73	8,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.232.135,6	12,19	1.319.377,5	12,33	1.398.540,15	12,33	1.485.249,64	12,33	1.580.305,62	12,33
H	Transportasi dan Pergudangan	829.053,3	8,20	884.708,5	8,27	937.791,01	8,27	995.934,05	8,27	1.059.673,83	8,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128.555,8	1,27	139.756,1	1,31	148.141,47	1,31	157.326,24	1,31	167.395,12	1,31
J	Informasi dan Komunikasi	110.037,5	1,09	118.590,0	1,11	125.705,40	1,11	133.499,13	1,11	142.043,08	1,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	515.071,9	5,09	536.083,9	5,01	568.248,93	5,01	603.480,37	5,01	642.103,11	5,01

L	Real Estate	186.011,3	1,84	198.148,9	1,85	210.037,83	1,85	223.060,18	1,85	237.336,03	1,85
M,N	Jasa Perusahaan	4.666,2	0,05	4.859,7	0,05	5.151,28	0,05	5.470,66	0,05	5.820,78	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315.723,4	3,12	331.239,2	3,10	351.113,55	3,10	372.882,59	3,10	396.747,08	3,10
P	Jasa Pendidikan	252.615,9	2,50	263.906,9	2,47	279.741,31	2,47	297.085,28	2,47	316.098,73	2,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110.359,1	1,09	115.724,4	1,08	122.667,86	1,08	130.273,27	1,08	138.610,76	1,08
RSTU	Jasa Lainnya	90.308,9	0,89	96.593,3	0,90	102.388,90	0,90	108.737,01	0,90	115.696,18	0,90
JUMLAH TOTAL		10.111.883,80	100	10.699.937,8	100	11.341.934,07	100	12.045.133,98	100	12.816.022,55	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.3
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2015 - 2019
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.453.449,6	26,3 5	3.775.183,9	26,0 6	4.273.302,47	26,11	4.828.831,79	26,11	5.456.579,92	26,11
B	Pertambangan dan Penggalian	178.541,2	1,36	199.976,1	1,38	225.972,99	1,38	255.349,48	1,38	288.544,91	1,38
C	Industri Pengolahan	3.345.999,4	25,5 3	3.674.222,6	25,3 6	4.144.526,99	25,32	4.683.315,50	25,32	5.292.146,51	25,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.437,0	0,05	6.854,6	0,05	7.745,70	0,05	8.752,64	0,05	9.890,48	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.492,4	0,09	12.468,1	0,09	14.088,95	0,09	15.920,52	0,09	17.990,18	0,09
F	Konstruksi	1.103.333,4	8,42	1.228.807,5	8,48	1.388.552,48	8,48	1.569.064,30	8,48	1.773.042,66	8,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.644.760,6	12,5 5	1.835.617,6	12,6 7	2.074.247,89	12,67	2.343.900,11	12,67	2.648.607,13	12,67
H	Transportasi dan Pergudangan	1.092.337,1	8,33	1.217.972,1	8,41	1.376.308,47	8,41	1.555.228,57	8,41	1.757.408,29	8,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171.901,2	1,31	200.246,8	1,38	226.278,88	1,38	255.695,14	1,38	288.935,51	1,38
J	Informasi dan Komunikasi	128.076,0	0,98	139.983,4	0,97	158.181,24	0,97	178.744,80	0,97	201.981,63	0,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	693.110,0	5,29	761.271,0	5,26	860.236,23	5,26	972.066,94	5,26	1.098.435,64	5,26
L	Real Estate	240.223,9	1,83	272.923,3	1,88	308.403,33	1,88	348.495,76	1,88	393.800,21	1,88
M, N	Jasa Perusahaan	6.432,2	0,05	6.939,1	0,05	7.841,18	0,05	8.860,54	0,05	10.012,41	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	419.649,9	3,20	470.965,6	3,25	532.191,13	3,25	601.375,97	3,25	679.554,85	3,25

P	Jasa Pendidikan	339.955,8	2,59	375.290,8	2,59	424.078,60	2,59	479.208,82	2,59	541.505,97	2,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148.270,3	1,13	166.715,1	1,15	188.388,06	1,15	212.878,51	1,15	240.552,72	1,15
RS TU	Jasa Lainnya	122.369,4	0,93	140.483,2	0,97	158.746,02	0,97	179.383,00	0,97	202.702,79	0,97
JUMLAH TOTAL		13.106.339,4	100,00	14.485.921,0	100,00	100,00	100	.497.072,40	100	0.901.691,81	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.4
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019
Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK)
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	2015		2016		2017*		2018*		2019*	
		AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,38	27,15	26,11	27,22	26,11	27,22	26,11	27,22	26,11	27,22
B	Pertambangan dan Penggalian	1,37	1,32	1,38	1,34	1,38	1,34	1,38	1,34	1,38	1,34
C	Industri Pengolahan	25,43	25,09	25,32	25,10	25,32	25,10	25,32	25,10	25,32	25,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	8,44	8,76	8,48	8,73	8,48	8,73	8,48	8,73	8,48	8,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,59	12,18	12,67	12,33	12,67	12,33	12,67	12,33	12,67	12,33
H	Transportasi dan Pergudangan	8,39	8,20	8,41	8,27	8,41	8,27	8,41	8,27	8,41	8,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,31	1,27	1,38	1,31	1,38	1,31	1,38	1,31	1,38	1,31
J	Informasi dan Komunikasi	0,98	1,09	0,97	1,11	0,97	1,11	0,97	1,11	0,97	1,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,31	5,09	5,26	5,01	5,26	5,01	5,26	5,01	5,26	5,01

L	Real Estate	1,84	1,84	1,88	1,85	1,88	1,85	1,88	1,85	1,88	1,85
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	3,12	3,25	3,10	3,25	3,10	3,25	3,10	3,25	3,10
P	Jasa Pendidikan	2,50	2,50	2,59	2,47	2,59	2,47	2,59	2,47	2,59	2,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,09	1,15	1,08	1,15	1,08	1,15	1,08	1,15	1,08
RSTU	Jasa Lainnya	0,94	0,89	0,97	0,90	0,97	0,90	0,97	0,90	0,97	0,90
	JUMLAH TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.5
Rata-rata Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun 2015- 2019
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	Rata-rata	
		AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,68	27,88
B	Pertambangan dan Penggalian	1,53	1,50
C	Industri Pengolahan	25,11	25,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09
F	Konstruksi	8,37	8,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,33	12,22
H	Transportasi dan Pergudangan	8,00	8,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,30	1,26
J	Informasi dan Komunikasi	0,98	1,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,89	4,70
L	Real Estate	1,81	1,79
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,04
P	Jasa Pendidikan	2,58	2,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,09
RSTU	Jasa Lainnya	0,94	0,90
	JUMLAH TOTAL	100	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2017

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat

No .	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi		
			2015	2016		2017*	2018*	2019*
1	2	3	4	5	6	8	9	9
1.	PDRB Harga Berlaku (dalam juta)	Rp	13.075.238,4	14.485.920,9	1.410.682,5	16.369.090,62	18.497.072,40	20.901.691,81
2.	PDRB Harga Konstan (dalam juta)	Rp	10.111.883,8	10.699.937,8	588.054	11.341.934,07	12.045.133,98	12.816.022,55
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu	%	11,04	10,79	-0,25	13,00	13,00	13,00
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	%	7,32	5,81	-1,51	6,00	6,20	6,40
5.	Tingkat Inflasi	%	4,08	4,08	0	4,00	3,80	3,60
6.	Angka Kemiskinan	%	5,07	4,96	-0,11	4,72	4,50	4,35
7.	Tingkat Pengangguran	%	3,25	3,16	-0,09	3,10	3,05	3,00
8.	PDRB perkapita (AHB)	Rp	47.010.000	50.390.000*	3.380.000	55.090.000	60.230.0000	65.850.000

Sumber : BPS dan hasil analisis 2017, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 -2016, Rantek RPJMD Kobar 2017-2022

Catatan:

* Angka PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi AHK dan AHB 2017, 2018, 2019 adalah angka proyeksi

* Angka inflasi 2015 dan 2016 adalah realisasi bersumber dari BPS

* Angka inflasi 2017, 2018 dan 2019 diambil dari Target Rantek RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

3.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2016 sama dengan dibandingkan Tahun 2015. Angka Inflasi ini masih terbilang terkendali karena angka inflasi masih dibawah dua digit. Pada bulan Desember 2016 terjadi inflasi sebesar 1,25%, laju inflasi *Tahun Kalender* (Jan-Des 2016) sebesar 4,08 % dan laju inflasi *year on year* (Des 2015 – Des 2016) sebesar 4,08 %. Angka ini sama dibandingkan dengan angka inflasi 2015 yakni sebesar 4,08%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah baik *year on year* maupun kumulatif untuk tahun 2016 yaitu sebesar 2,11% dan juga masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional 2016 yakni sebesar 3,07%.

Komoditas pemicu inflasi pada 2016 adalah daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan gabus, ikan mas, ikan nila, cabe rawit, cabe merah, cabe hijau, bawang merah, bawang putih, tomat, kentang, kubis, rokok kretek, bahan bakar rumah tangga, jasa angkutan, wortel, petai, kacang panjang, dan beras.

Tabel 3.7. Nilai dan Target Inflasi Tahun 2011 - 2018
Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
Tingkat Inflasi	3,99 %	6,29%	7,97%	4,08%	4,08 %	4,00 %	3,80 %

Sumber : BPS dan Target Inflasi pada Target Rantek RPJMD Kobar Tahun 2017-2022,2017
Catatan : *diambil dari target Rantek RPJMD Kobar 2017-2022

Kebijakan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait langsung dengan pengembangan sektor ekonomi adalah :

1. Melaksanakan Program terpadu bidang pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak;
2. Mempersiapkan pengembangan sektor industri pengolahan (aspek hilir produk pertanian) sebagai lokomotif ekonomi baru selain pertanian dalam arti luas;
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Mempersiapkan pengembangan kawasan berdasarkan sektor unggulan dan potensi masing-masing (kompetensi inti kawasan)
6. Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah daerah di atas memerlukan dukungan mutlak berupakomitmen Perangkat Daerah (PD) teknis dalam pelaksanaan dilapangan. PD teknis diwajibkan mengawal kebijakan yang telah digariskan, yang dituangkan dalam program/kegiatan. Untuk itu PD teknis wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan daerah.

Selaras dengan kebijakan ekonomi tahun 2017, maka kebijakan ekonomi tahun 2018 diarahkan antara lain untuk:

1. Meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan;
2. Mengembangkan kawasan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mengurangi pengangguran;
4. Menurunkan angka kemiskinan;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
6. Peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian dan pertambangan.
7. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan daerah.

Terkait dengan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka Pemerintah menetapkan strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2018, guna menjamin konsistensi rencana pembangunan tahun 2017, yaitu melalui :

a. Percepatan penyediaan infrastruktur

Percepatan penyediaan infrastruktur dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan penyediaan infrastruktur diutamakan pada infrastruktur dasar berupa prasarana untuk peningkatan aksesibilitas wilayah, kelistrikan dan lahan pertanian.

Selain membuka keterisolasian wilayah, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b. Peningkatan investasi daerah.

Investasi di daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar.

Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberikan kepastian hukum dan pemberian insentif bagi investor.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil di daerah dalam rangka menarik investasi ke daerah.

d. Pemerataan Hasil Pembangunan.

Dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan maka didorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pengembangan, pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan/ minapolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core business* daerah) yang meliputi: agribisnis (CPO, Kerupuk Amplang, Daging Sapi), industri manufaktur dan pariwisata (eko wisata, agrowisata dan wisata budaya).

Dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan dana ADD dan Dana Desa.

e. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen Koperasi dan UMKM serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan *multiplier effect* terhadap pendapatan masyarakat.

f. Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Untuk menjamin *sustainable* pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan peningkatan kualitas lingkungan melalui

upaya pemantauan kualitas lingkungan, rehabilitasi lahan, pola tanam dan pengaturan pemanenan serta penegakan hukum bagi pelanggar masalah lingkungan.

g. Pengembangan Industri Hilir.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan pertambangan, pemerintah akan mendorong pengembangan hilirisasi melalui diversifikasi produk. Sementara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, dilakukan standarisasi produk dan proses produksi.

h. Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dilakukan upaya pengendalian komoditas pemicu inflasi, seperti : daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan air tawar, beras yang sebenarnya telah dapat diproduksi di tingkat lokal meskipun dengan skala yang terbatas. Pengendalian komoditas lokal dan yang berasal dari luar daerah dilakukan meliputi proses produksi, produktivitas dan pendistribusiannya. Selain itu pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lokal, dengan dukungan strategi lainnya, seperti strategi pengembangan kawasan dan demplot komoditas pemicu inflasi, pembinaan UMKM, mempermudah akses permodalan dan jaringan pemasaran.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dilakukan pada tahun 2018 masih ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan langkah sebagai berikut :

a. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya Peningkatan PAD ditempuh melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya:

- 1) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- 2) Peningkatan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan Penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah; Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga

terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.

- 4) Penyesuaian peraturan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Perbaikan mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 6) Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 7) Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
- 8) Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya;
- 9) Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh.

b. Memperkuat Posisi Tawar (*bargaining position*).

Pemerintah Daerah memperkuat posisi tawar dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan Daerah yang sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi operasional yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Review perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- Peningkatan koordinasi antara PD dalam upaya meningkatkan PAD.

c. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, pengalokasian didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan 2 (dua) tahun terakhir kecuali untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya bisa dianggarkan jika sudah ada informasi atau ketetapan dari Pemerintah Pusat. Semua penganggaran itu juga dalam rangka mengantisipasi menurunnya beberapa asumsi makro ekonomi pemerintah, seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar, peralihan kewenangan terhadap pemerintah Provinsi, penurunan tarif listrik, fluktuasi harga minyak dan harga komoditas lainnya.

Pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.166.301.374.000,00 atau turun sebesar -14,52% dibandingkan dengan target Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 1.364.483.031.000,00. Adapun komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 214.200.167.000,00 atau naik sebesar 9,84 % apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada Perubahan APBD tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 195.019.868.500,00.

b. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 798.760.035.000,00 mengalami penurunan sebesar 17,25 % dibandingkan dengan target pendapatan pada Perubahan APBD tahun 2017 Rp. 965.242.160.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 153.341.172.000,00 mengalami penurunan sebesar 24,91 % dari target Perubahan APBD tahun 2017 Rp. 204.221.002.500,00.

Secara rinci perkiraan target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016 - 2018

NO	JENIS PENDAPATAN	Realisasi APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017	Proyeksi pada Tahun 2018	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	6	5
4.1	Pendapatan Asli Daerah	71.675.643.395,87	195.019.868.500	214.200.167.000	19.180.298.500
4.1.1	Pajak Daerah	35.939.311.482,80	46.980.000.000	51.195.251.000	4.215.251.000
4.1.2	Retribusi Daerah	14.116.026.541,00	15.526.206.000	18.000.000.000	2.473.794.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.050.925.491,34	8.110.574.000	9.309.174.000	1.198.600.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.569.379.880,73	124.403.088.500	135.695.742.000	11.292.653.500
4.2	Dana Perimbangan	999.504.184.473,00	965.242.160.000	798.760.035.000	(166.482.125.000)
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.757.165.453,00	69.242.980.000	73.281.849.000	4.038.869.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	662.249.343.000,00	652.906.913.000	667.688.406.000	14.781.493.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	261.497.676.020,00	243.092.267.000	57.789.780.000	(185.302.487.000)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	143.494.621.069,31	204.221.002.500	153.341.172.000	(50.879.830.500)
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.983.000.000,00	3.600.000.000	1.500.000.000	(2.100.000.000)
4.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	64.476.297.693,31	65.452.716.500	70.725.351.000	5.272.634.500
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	58.634.768.000,00	121.363.286.000	66.735.731.000	(54.627.555.000)
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	15.400.555.376,00	13.805.000.000	14.380.090.000	575.090.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.214.674.448.938,18	1.364.483.031.000	1.166.301.374.000	(198.181.657.000)

Sumber : BPKAD, Tahun 2017

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan mengupayakan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif dan Perpres nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta peningkatan alokasi dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin.

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya 30 % dari belanja Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 untuk pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik.
3. Alokasi Belanja Pegawai maksimal 50 % dari total belanja APBD dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah maksimal 3 % dari target Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Peningkatan kedaulatan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan *prospektif* dan mendukung percepatan kawasan/*cluster* industri berbasis pertanian.

5. Penyediaan anggaran Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat.

III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/*interisolasi*, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, pelabuhan laut dalam dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya hayati dan kearifan budaya lokal serta teknologi informasi;
4. Mempercepat reformasi regulasi dan birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparan dan akuntabel menuju *good governance*;
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kedaulatan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6. Membuat kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang bersifat selektif dan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat-alat pertanian dan lain-lain, serta penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dan Dana Desa dalam upaya pelaksanaan kegiatan secara optimal dan tepat sasaran.
8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan/ Hibah harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif bagi kelompok berbadan hukum.

9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1.175.989.816.000,00 atau turun sebesar 15,60 % (Rp. 217.351.086.000,00) apabila dibandingkan dengan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu Rp. 1.393.340.902.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 632.025.415.000,00 atau naik sebesar Rp. 15.026.817.000,00 (2,44 %) dibandingkan dengan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 616.998.598.000,00.
2. Belanja Langsung (BL) Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 543.964.401.000,00 mengalami penurunan 29,93 % (Rp. 232.377.903.000,00) bila dibandingkan dengan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 776.342.304.000,00. Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran belanja daerah Tahun 2018 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana disajikan dalam tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 - 2018

NO	JENIS BELANJA	Realisasi APBD Tahun 2016	Target Perubahan APBD TA. 2017	Proyeksi pada Tahun 2018	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	6	5
5.1	Belanja Tidak Langsung	452.462.411.330,00	616.998.598.000	632.025.415.000	15.026.817.000
5.1.1	Belanja pegawai	429.310.503.848,00	431.635.541.000	471.895.741.400	40.260.200.400
5.1.2	Belanja bunga	858.680.569,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja hibah	19.840.520.000,00	26.936.865.000	6.307.680.000	(20.629.185.000)
5.1.5	Belanja bantuan sosial	354.550.000,00	2.448.000.000	2.448.000.000	-
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	1.980.543.000,00	8.701.168.700	6.919.525.100	(1.781.643.600)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik		145.277.023.300	141.954.468.500	(3.322.554.800)
5.1.8	Belanja tidak terduga	117.613.913,00	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000
5.2	Belanja Langsung	667.486.023.627,64	776.342.304.000	543.964.401.000	(232.377.903.000)
5.2.1	Belanja Pegawai	81.474.081.069,00			
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.296.720.852,56			
5.2.3	Belanja Modal	378.715.221.706,08			
	TOTAL BELANJA DAERAH	1.119.948.434.957,64	1.393.340.902.000	1.175.989.816.000	(217.351.086.000)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

BAB IV

PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun karena RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berakhir dan daerah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, maka penyusunan RKPD tahun 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 pasal 8 ayat (1), Penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada: (a) arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, Program Prioritas Nasional dalam RKP serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih dan (b) Peraturan Daerah Mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2018 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJPD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Korelasi terhadap pencapaian prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional (Nawacita), seperti terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
 - b. Korelasi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

- c. Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
 - d. Korelasi terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
 3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, PD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
 4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
 5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
 6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1 Visi dan Misi Pembangunan

RPJMD periode 2017 -2022 berakhir pada tahun 2022, maka sesuai dengan PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010 pasal 287 ayat 2 bahwa *“Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan pembangunan daerah Provinsi”*. Maka pada bab ini visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan mengacu pada RPJPD yang didalamnya memuat arah pembangunan dua puluh (20) tahun ke depan dengan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut : **“KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU dan SEJAHTERA, MANDIRI, DEMOKRATIS dan BERKEADILAN”**.

Mengingat penyusunan RKPD tahun 2018 simultan dengan penyusunan RPJMD tahun 2017 -2022, maka visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan mengacu pada visi misi kepala daerah terpilih yaitu : **“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA dan IKHLAS”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Misi yang harus dilaksanakan meliputi :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas, bahwa wujud dari pembangunan untuk RPJMD tahap III periode 2017 - 2022 adalah : “Mengurangi disparitas antar wilayah melalui realokasi dan redistribusi sumber daya yang ada di Kotawaringin Barat” dengan tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis teknologi informasi,
2. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan,
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah,
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah,
6. Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah,
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari,
8. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah,
9. Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas,
10. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama,
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat,
12. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat,
13. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya,
14. Peningkatan pariwisata daerah.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 tertuang dalam indikator kinerja yang mengacu pada indikator RPJMN 2014-2019, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih. Sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Utama Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
1.	Pendidikan			
1.1	Pendidikan dasar			
	SD/MI			
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SD/MI	1:17,28	1:20	
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah	98,80	98,89	
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	162,15	190,95	
	SMP/MTs			
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SMP/MTs	1:14,90	1:15	
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah	86,65	93,55	
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	332,19	322,52	
1.3	Fasilitas Pendidikan			
1.3.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	33,10	93,66	
1.3.2	Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	52,80	96,59	
1.4	Angka Putus Sekolah			
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14	0,15	
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,70	0,39	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			
1.5.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98	98,05	
1.5.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,50	96,75	
1.6	Angka Kelulusan			

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,92	100	
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,98	100	
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,75	100	
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,99	100	
2.	Kesehatan			
2.1	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1: 963		
2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	1:3863	1:3863	
2.3	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	1:753	1:569	
2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	86	
2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	80	89,4	
2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88	98	
2.7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86,10	100	
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	
2.9	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC/BTA	72	99,44	
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	
2.12	Cakupan Kunjungan Bayi	91,83	96,5	
2.13	Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup	7,0	17	
2.14	Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup	194	102	
2.15	AKABA per 1000 Balita	7	7	
3.	Pekerjaan Umum			
3.1	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik	892,27	0,24	
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	88,61	0,73	
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	97,79	96,78	blm
3.4	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	771,8	771,8	Blm

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
3.5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	7,5	6,2	Blm
3.6	Rasio rumah layak huni	0,65	0,64	Blm
3.7	Rasio permukiman layak huni (%)	0,99	0,99	Blm
3.8	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	2.650,00	2.600,00	Blm
4.	Perumahan			
4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	72	77,00	
4.2	Rumah Tangga Bersanitasi	77,96	80,52	
4.3	Rumah Layak Huni	65	63,60	
5	Penataan Ruang			
5.1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,096	0,12	
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1	Tersusunnya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	1	1	
6.2	Tersusunnya RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Dokumen)	1	1	
6.3	Tersusunnya RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	2	
6.4	Kesesuaian Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	156	70	
6.5.	Kesesuaian RKPD dengan usulan musrenbang (%)	70	70	
6.6.	Kesesuaian muatan RPJMD dengan Visi Misi Program Bupati Terpilih (%)	70	70	
6.7	Tersusunnya evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan (Dokumen)	1	1	
6.8	Tersusunnya data dan informasi pembangunandaerah (paket)	2	2	
6.9	Tersusunnya data pendukung perencanaan pembangunan daerah (bidang sarana prasarana, bidang ekonomi dan bidang kesra) (dokumen)	5	5	
7.	Perhubungan			
7.1	Jumlah Bandara (Unit)	1	1	
7.2	Jumlah Dermaga Sungai (Unit)	22	4	
7.3	Jumlah Pelabuhan Laut (Unit)	4	4	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
8	Lingkungan Hidup			
8.1	Persentase Penanganan sampah	96	65	
8.2	Jumlah Duta Lingkungan	2	2	
8.3	Jumlah Kader lingkungan	60	50	
8.4	Jumlah Sekolah Adhiwiyata (Sekolah)	4	4	
8.5	Pencemaran status mutu air	2	2	
8.6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	600	600	
8.7	Penegakan Hukum Lingkungan	3	3	
9	Kependudukan dan Catatan Sipil			
9.1	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	63,70	70	
9.2	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	100	100	
9.3	Presentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	80	80	
9.4	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	78,37	86	
9.5	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e-KTP)	82,67	98	
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	4,50	32,83	
10.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	18,06	517	
10.3	Rasio KDRT	34	15,00	
10.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	56,67	60	
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2,5	
11.2	Rasio akseptor KB	86,65	90,98	
11.3	Cakupan peserta KB aktif (orang)	71,19	86,05	
11.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	32,64	15	
12	Sosial			
12.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan Panti Rehabilitasi (unit)	21	19	
12.2	PMKS yang memperoleh	2.675	25	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
	bantuan sosial (orang)			
12.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)	1.024	30	
13	Ketenagakerjaan			
13.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,19	79,00	
13.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,16	2,10	
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
14.1	Persentase koperasi aktif (%)	81	89,10	Blm
14.2	Jumlah BPR/LKM (unit)	26	24	Blm
14.3	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	62	64	Blm
15	Penanaman Modal			
15.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	35	40	Blm
15.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional			
15.2.1	- PMDN	714.448.540.000	3.500.000.000.000	Blm
15.2.2	- PMA (US \$)	459.100.000	650.000.000	
15.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	108.805.880.000	1.500.000.000.000	Blm
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	11	12	
16.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	3	
16.3	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	36	
17	Kepemudaan dan Olahraga			
17.1	Jumlah organisasi pemuda	235	112	
17.2	Jumlah organisasi olah raga	124	84	
17.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	8	8	
17.4	Lapangan olahraga	150	165	
18	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat			

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
	Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
18.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	10	9	Blm
18.2	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kel	100	90	Blm
18.3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	
18.4	Penegakan PERDA	Ada	Ada	
18.5	Assesmen manajerial (orang)	120	120	Blm
20	Pangan			
20.1	Regulasi kedaulatan Pangan (Perbup)	Ada	Ada	
20.2	Ketersediaan pangan utama/pokok (%)	30		Blm
20.3	Diversifikasi pangan pangan (%)			Blm
20.4	Desa mandiri pangan (desa)	100	100	Blm
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
21.1	Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	77	94	
21.2	Jumlah Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	94	94	
21.3	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat	1	1	
21.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg Terlatih	0	188	
21.5	Jumlah Desa/Kelurahan yg mendapat akses TTG	1	1	
21.6	Jumlah desa tertinggal	9	6	
22	Statistik			
22.1	Buku “Kotawaringin Barat Dalam Angka”	Ada	Ada	
22.2	Buku “PDRB Kotawaringin Barat”	Ada	Ada	
23	Kearsipan			
23.1	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	
24	Komunikasi dan Informatika			
24.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	10	
24.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	4	6	
24.3	Website milik pemerintah daerah (buah)	16	37	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
24.4	Pameran/expo	Ada	Ada	
25	Perpustakaan			
25.1	Jumlah Perpustakaan	343	122	
25.1.1	Anggota	8.732	1.997	
25.1.2	Pengunjung	93.737	68.843	
25.1.3	Peminjam	73.393	37.697	
25.1.4	Jumlah koleksi bahan pustaka(eksemplar)	21.799	3.999	
II	Pelayanan Urusan Pilihan			
1.	Pertanian dan Peternakan			
1.1.	<i>Luas tanam tanaman pangan</i>			
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	4.209	8.453	
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	746	3.881	
1.1.3	Jagung (Ha)	2.438	1.678	
1.2.	<i>Luas Panen Tanaman Pangan</i>			
1.2.1	Padi sawah (Ha)	4.731	8.030	
1.2.2	Padi ladang (Ha)	1.296	3.687	
1.2.3	Jagung (Ha)	1.171	1.399	
1.3	<i>Produktivitas tanaman pangan</i>			
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,63	3,79	
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,05	2,50	
1.3.3	Jagung (Ton/Hektar)	3,73	3.63	
1.4	<i>Produksi tanaman pangan</i>			
1.4.1	Padi sawah (Ton)	17.174	30.435	
1.4.2	Padi ladang (Ton)	2.657	7.816	
1.4.3	Jagung (Ton)	4.368		
1.5	<i>Populasi Ternak</i>			
1.5.1	Sapi (ekor)	17.203	18.726	
1.5.2	Kerbau (ekor)	0	0	
1.5.3	Kambing /Domba(ekor)	2.538	3,040	
1.5.4	Babi (ekor)	5.881	6.178	
1.5.5	Ayam buras (ekor)	346.843	451,038	
1.5.6	Ayam ras petelur (ekor)	50.794	51.150	
1.5.7	Ayam ras pedaging (ekor)	210.115	224.984	
1.5.8	Itik (ekor)	42.574		
1.6	<i>Produksi Daging Ternak</i>			
1.6.1	Sapi (ekor)	625.860	694,99	
1.6.2	Kerbau (Ton)	0,00	0,00	
1.6.3	Kambing / Domba(Ton)	33,02	63,95	
1.6.4	Babi (Ton)	86,56	115,14	
1.6.5	Ayam buras (Ton)	400.60	433.95	
1.6.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	0,00	0,00	
1.6.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	1.031,75	892,1	
1.6.8	Itik (Ton)	17.09	15.14	
1.7	<i>Produksi Telur</i>			
1.7.1	Ayam buras(Ton)	212,71	281.84	
1.7.2	Ayam Ras Petelur (Ton)	366,36	230,17	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
1.7.3	Itik(Ton)	176,97	161.17	
1.8	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	3,85	3,80	
1.9	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,78	4,68	
2	Perkebunan			
2.1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	21,61	37	
2.2	eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	189.439,16	199.182,20	
2.3	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	55.160	79.820	
2.4	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	15	1	
2.5	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.447.807.384	13.000.000.000	
2.6	Kemitraan/Plasma	28.785,91	31.663	
2.7	Pengembangan/perluasan areal perkebunan	212.426,46		
2.7.1	Karet	14.560,30	18.284	
2.7.2	Kelapa sawit	196.541,30	204.909	
2.7.3	Kelapa	738,75	1.205	
2.7.4	Lada	318,60	1.042	
2.8	Produksi komoditi perkebunan			
2.8.1	Karet (lump)	7.253,83	15.600	
2.8.2	Kelapa (kopra)	265,45	347	
2.8.3	Kelapa Sawit (Tbs)	2.974.134,28	4.550.000	
2.8.4	Lada (putih/hitam)	156,49	432	
3.	Kehutanan			
3.1	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	25	170.57	
4.	Pariwisata			
4.1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	80.696	69.609	
4.2	Jumlah Destinasi wisata (obyek)	14	15	
4.3	Jumlah devisa (Rp)			
4.4	Jumlah even tahunan wisata daerah (kegiatan)	6		
5.	Perikanan			
5.1	Produksi perikanan (ton)	19.922,39	17.661,82	
5.2	Perikanan tangkap (ton)	14.792,70	13.000	
5.3	Perikanan Budi daya (ton)	5.129,69	4.550,00	
5.4	Konsumsi ikan perkapita (Kg)	43,50	45,48	
5.5	Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)	1.577.193	2,000	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2016	Target Capaian Tahun 2018	Ket.
5.6	Peningkatan produksi perikanan budidaya(ton)	518,66	589,00	
5.7	Penurunan <i>illegal fishing</i> (kasus)	6		
6.	Perdagangan			
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	18	17,5	Blm
6.2	Ekspor bersih perdagangan (US \$)	400.000	390.000	Blm
6.3	Pasar daerah (unit)			Blm
6.4	Penanganan sengketa konsumen (kasus)	-		
6.5	Alat ukur yang ditera ulang (unit)	-		
7.	Perindustrian			
7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	25,30		
7.2	Pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	17	10	
7.3	Pembinaan pengrajin (Kelompok)	0		

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

4.3.1 Tema dan Strategi

4.3.1.1. Tema

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025, maka tema pembangunan daerah tahun 2018 adalah “Pemantapan Infrastruktur Untuk Mengurangi Disparitas Antar Wilayah di Kotawaringin Barat”. Selanjutnya, penjelasan dari tema tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) program utama yaitu :

- a. Pemantapan dan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi disparitas dan mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup,
- b. Pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dengan menitikberatkan pada sub sektor perkebunan,
- c. Pembangunan bidang pariwisata yang berbasis pada pelestarian situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Selain 3 (tiga) program utama juga dilaksanakan pembangunan pada bidang lainnya baik urusan pemerintahan wajib (terkait dan tidak terkait pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan.

4.3.1.2. Strategi

Mengacu pada evaluasi pembangunan tahun 2016 serta perkiraan pelaksanaan pembangunan tahun 2017, maka permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2018 dijabarkan dalam bentuk isu strategis daerah sebagaimana berikut :

a. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

Meskipun secara umum pembangunan infrastruktur sudah memadai, namun pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan pemerataan dan kualitas pembangunannya agar dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah pelosok. Kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan Industri, Kawasan *Agropolitan* dan Kawasan *Minapolitan* perlu lebih ditingkatkan sehingga akan terlihat nyata manfaatnya.

b. Kualitas layanan dan aksesibilitas Layanan Dasar

Dalam bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada upaya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara proporsional dan berkeadilan. Saat ini aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan belum berjalan secara optimal. Oleh karenanya pemerintah senantiasa berupaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas puskesmas dan mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat serta sanitasi yang layak. Dalam bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya mewujudkan dan menjamin pemerataan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

c. Penanggulangan Kemiskinan dan masalah sosial lainnya

Untuk tahun ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penguatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah mencoba untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, lansia, penyandang cacat dan masyarakat miskin. Kebijakan pengembangan

manajemen penanggulangan bencana diharapkan akan lebih efektif dengan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara itu, dalam hal perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

d. Pengembangan agribisnis dan kedaulatan pangan

Dalam bidang ini, kebijakan diarahkan pada peningkatan sinergitas agribisnis dan ketahanan pangan lintas sektor. Langkah yang diambil yaitu meningkatkan pemberdayaan petani dan kelembagaan pendukungnya, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat, serta meningkatkan pengamanan kedaulatan pangan.

e. Peningkatan daya beli masyarakat.

Pada periode ini, Kabupaten Kotawaringin Barat ingin mencapai kemandirian dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, maupun daerah lain. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian itu. Kebijakan diarahkan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

f. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju pada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Kemajuan suatu daerah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai kemajuan itu, kebijakan diarahkan pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan hasil pembangunan.

g. Penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup

Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi adalah pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung capaian ketahanan pangan, pengendalian bencana dan kawasan lindung. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud keserasian pemanfaatan ruang dan pendayagunaan tanah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

h. Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik

Kinerja aparatur dalam melayani masyarakat selalu menjadi sorotan dimasa sekarang ini. Untuk itu kebijakan diarahkan pada upaya mewujudkan kualitas

dan kapasitas aparatur yang profesional dan peningkatan pelayanan publik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima. Kearifan lokal berbasis sumber daya lokal yang dikembangkan dengan optimal akan menjadi modal dalam membangun Kotawaringin Barat. Sumber daya lokal dimaksud antara lain adalah potensi usaha pertanian dan perkebunan, potensi sumber daya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat.

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tersebut terdiri dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan, aspek fisik dan prasarana wilayah.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022, berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2018, sehingga prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 ditetapkan sebagaimana Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2.
Rekapitulasi Program Prioritas SKPD Tahun 2018

NO.	PROGRAM PRIORITAS
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini
8	Program Pendidikan Sekolah Dasar
9	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
10	Program Pendidikan Sekolah Non Formal

NO.	PROGRAM PRIORITAS
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan
18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
24	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
25	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
26	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
27	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
28	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
29	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
30	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
31	Program Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
32	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
33	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
36	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
37	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
38	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
39	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
40	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
41	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
42	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

NO.	PROGRAM PRIORITAS
43	Program Pengendalian Banjir
44	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
45	Program Pembangunan Infrastruktur Pemukiman
46	Program Pembinaan Konstruksi
47	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
48	Program Pengembangan Perumahan
49	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
50	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
51	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
52	Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
53	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
54	Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
55	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
56	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
57	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
58	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
59	Program Pendidikan Politik Masyarakat
60	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan
61	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
62	Program Tanggap Darurat
63	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
64	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
65	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
66	Program Pembinaan Anak Terlantar
67	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
68	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
69	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
70	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
71	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
72	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
73	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
74	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
75	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

NO.	PROGRAM PRIORITAS
76	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
77	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
78	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
79	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak
80	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak
81	Program Keluarga Berencana
82	Program Pelayanan Kontrasepsi
83	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
84	Program Pengendalian Penduduk
85	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
86	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
87	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
88	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
89	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
90	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
91	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
92	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
93	Program Pengendalian Kebakaran Hutan
94	Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup
95	Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
96	Program penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
97	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
98	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
99	Program Penataan Administrasi Kependudukan
100	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
101	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal
102	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
103	Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
104	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
105	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
106	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
107	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

NO.	PROGRAM PRIORITAS
108	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
109	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP
110	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
111	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
112	Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika
113	Program Implementasi dan Pengembangan E-Government
114	Program layanan penyediaan informasi publik pemerintah daerah
115	Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah
116	Program informasi, komunikasi dan publikasi masyarakat
117	Program Pengebangan Data/ Informasi Statistik Daerah
118	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
119	Program Pengembangan Usaha Koperasi
120	Program Penumbuhan Wirausaha Baru
121	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro
122	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
123	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
124	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
125	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan
126	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
127	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
128	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri
129	Proram Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri
130	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
131	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
132	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
133	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
134	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
135	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga
136	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
137	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
138	Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis
139	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
140	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
141	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
142	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
143	Program Pengembangan Perikanan

NO.	PROGRAM PRIORITAS
144	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
145	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
146	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
147	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
148	Program Pengembangan Kemitraan
149	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
150	Program Peningkatan Produksi Hortikultura
151	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
152	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
153	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
154	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
155	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
156	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
157	Program Peningkatan Agribisnis Peternakan
158	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
159	Program Pengembangan data/informasi
160	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
161	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
162	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
163	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
164	Program Pendidikan Politik Masyarakat
165	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
166	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
167	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
168	Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum
169	Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia
170	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
171	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
172	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
173	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
174	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
175	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
176	Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan

NO.	PROGRAM PRIORITAS
177	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
178	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
179	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
180	Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan keuangan desa
181	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah
182	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
183	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
184	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
185	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan
186	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
187	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
188	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
189	Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat
190	Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
191	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah
192	Program Pengembangan Karir
193	Program Peningkatan Kinerja Aparatur
194	Program Pembinaan Aparatur

4.3.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2018

Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pememrintah kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Sinkronisasi prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel. 4.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No	Program Prioritas Nasional (Nawacita)	No	Program Prioritas Provinsi	No	Program Prioritas Kabupaten
I	PENDIDIKAN	7	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
1	Pendidikan Vokasi				
2	Peningkatan kualitas guru				
II	KESEHATAN				
3	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak				
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2	Pemerataan infrastruktur wilayah	8	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah,
5	Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)				
III	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
6	Penyediaan Perumahan Layak	8	Pengelolaan industri pariwisata	14	Peningkatan pariwisata daerah.
7	Air Bersih dan Sanitasi				
IV	PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA				
8	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)				
9	Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)	10	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	5	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah,
10	Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)				
11	Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja				
12	Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi				

V	KETAHANAN ENERGI				
13	EBT dan Konservasi Energi	9	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan		
14	Pemenuhan Kebutuhan Energi				
VI	KETAHANAN PANGAN				
15	Peningkatan Produksi pangan	4	Stabilitas ekonomi daerah		Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah,
16	Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)				
VII	PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
17	Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	5	Peningkatan pendapatan masyarakat	6	Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah,
18	Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
19	Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi				
VIII	INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN				
20	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)	1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	9	Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas
21	Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	2	Pemerataan infrastruktur wilayah		
IX	PEMBANGUNAN WILAYAH				
22	Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	3	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari,
23	Pembangunan Perdesaan				
24	Reforma Agraria				
25	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)				
26	Percepatan Pembangunan Papua				
X	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN				
		6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berbasis teknologi informasi,
27	Penguatan Pertahanan			2	Peningkatan kemandirian pembiayaan

					pembangunan
28	Stabilitas Politik dan Keamanan			11	Peningkatan pemberdayaan masyarakat,
29	Kepastian Hukum			12	Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat
30	Reformasi Birokrasi				Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, sasaran pembangunan nasional dan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*, *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial*. Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran, prioritas dan program kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung-jawab dan pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 pada Tabel. 5.1. Adapun Rincian Program dan Rincian Rencana Kerja setiap PD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana terlampir.

Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun 2018

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
	TOTAL BELANJA	543,964,401,000.00	
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	72,242,494,000.00	
2.	Dinas Kesehatan	45,979,232,000.00	
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	93,910,106,000.00	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	150,076,000,000.00	
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3,435,504,000.00	
6.	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	4,389,660,000.00	
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,401,921,000.00	
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,430,450,000.00	

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
9.	Dinas Sosial	2,038,610,000.00	
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,273,836,000.00	
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1,819,233,000.00	
12.	Dinas Ketahanan Pangan	1,827,496,000.00	
13.	Dinas Lingkungan Hidup	12,881,440,000.00	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,411,338,000.00	
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,461,050,000.00	
16.	Dinas Perhubungan	9,999,837,000.00	
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2,346,804,000.00	
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8,696,803,000.00	
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,663,728,000.00	
20.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4,290,313,000.00	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,713,842,000.00	
22.	Dinas Perikanan	10,109,981,000.00	
23.	Dinas Pariwisata	5,367,641,000.00	
24.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10,087,461,000.00	
25.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4,713,779,000.00	
26.	Sekretariat Daerah	33,589,427,000.00	
27.	Sekretariat DPRD	8,631,328,000.00	
28.	Inspektorat Kabupaten	3,808,919,000.00	
29.	Kecamatan Arut Selatan	3,111,724,000.00	

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
30.	Kecamatan Arut Utara	1,042,549,000.00	
31.	Kecamatan Kumai	1,694,668,000.00	
32.	Kecamatan Kotawaringin Lama	3,132,624,000.00	
33.	Kecamatan Pangkalan Lada	836,812,000.00	
34.	Kecamatan Pangkalan Banteng	785,567,000.00	
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,775,647,000.00	
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10,938,000,000.00	
37.	Badan Pendapatan Daerah	3,902,174,000.00	
38.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5,146,403,000.00	

BAB VI

PENUTUP

RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Substansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi.

Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :

1. Komitmen seluruh SKPD untuk memanfaatkan Sisrenbangda yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, guna menunjang akuntabilitas perencanaan daerah,
2. Melaksanakan program terpadu antar sektor dan pelaksanaan kegiatan secara disiplin untuk menghasilkan sasaran yang direncanakan,
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan kemanfaatannya bagi masyarakat,
4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten secara vertikal dan horizontal.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH



**Rincian Program dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2018**

